

Oktober 2008

Percik

Media Informasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

PRODUKSI MEDIA RAKYAT
PARTISIPASI MASYARAKAT
PEMBANGUNAN AIR MINUM
PENYHATAN LINGKUNGAN

**MEDIA
RAKYAT**

DALAM KOMUNIKASI AMPL

ISSN 1829-5967



9 771829 596760

Media Informasi Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan

Diterbitkan oleh:
Kelompok Kerja Air Minum
dan Penyehatan Lingkungan
(Pokja AMPL)

Penasihat/Pelindung:
Direktur Jenderal Cipta Karya
DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

Penanggung Jawab:
Direktur Permukiman dan Perumahan,
BAPPENAS
Direktur Penyehatan Lingkungan,
DEPKES
Direktur Pengembangan Air Minum,
Dep. Pekerjaan Umum
Direktur Pengembangan Penyehatan
Lingkungan Permukiman,
Dep. Pekerjaan Umum
Direktur Bina Sumber Daya Alam dan
Teknologi Tepat Guna, DEPDA
Direktur Penataan Ruang dan
Lingkungan Hidup, DEPDA

Pemimpin Redaksi:
Oswar Mungkasa

Dewan Redaksi:
Zaenal Nampira,
Indar Parawansa,
Bambang Purwanto

Redaktur Pelaksana:
Maraita Listyasari, Rheidda Pramudhy,
Raymond Marpaung, Bowo Leksono

Desain/Illustrasi:
Rudi Kosasih

Produksi:
Machrudin

Sirkulasi/Distribusi:
Agus Syuhada

Alamat Redaksi:
Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta Pusat.
Telp./Faks.: (021) 31904113
<http://www.ampl.or.id>
e-mail: redaksipercik@yahoo.com
redaksi@ampl.or.id
oswar@bappenas.go.id

Redaksi menerima kiriman
tulisan/artikel dari luar. Isi berkaitan
dengan air minum dan penyehatan lingkungan
dan belum pernah dipublikasikan.
Panjang naskah tak dibatasi.
Sertakan identitas diri.
Redaksi berhak mengeditnya.
Silahkan kirim ke alamat di atas.

Dari Redaksi	1
Suara Anda	2
Laporan Utama	
Komunikasi dan Pembangunan AMPL	3
Media Rakyat	5
Pojok Sanitasi	
Lima Pesan Sanitasi	8
Peraturan	
Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem (KSNP-SPAM)	9
Wawasan	
Air Bersih, Sanitasi, dan Pengurangan Resiko Bencana	11
Community Based Landfill Monitoring	12
Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia	13
Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Air Minum	
Mengamati Kasus Jakarta dalam Konteks Dinamika KPS	16
Inovasi	
Hidayat Penghasil Energi dari Sampah	18
Reportase	
Peresmian Toilet Sekolah di Tangerang	19
Cermin	
Djamaludin Suryohadikusumo Membuat Kompos dengan Kasih Sayang	20
Seputar Plan	21
Seputar ISSDP	23
Seputar WASPOLA	25
Tamu Kita	
Dewi Motik: "Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Kualitas Kebersihan"	26
Seputar Pokja AMPL Daerah	28
Seputar UNICEF	29
Seputar STBM	33
Seputar Jejaring AMPL	37
Seputar ProAir	39
Seputar AMPL	42
Program	
Kredit Mikro untuk Air Minum	47
Klinik IATPI	48
Info CD	49
Info Buku	50
Info Situs	51
Pustaka AMPL	52
Agenda	

Kita baru saja merayakan kemerdekaan Republik Indonesia ke 63. Sepertinya hal ini menjadi suatu yang rutin saja tanpa kita sadari bahwa sebenarnya banyak hal yang masih perlu kita capai agar kemerdekaan ini menjadi bermakna. **Percik** teringat ucapan dari peserta di acara pertemuan dengan masyarakat di salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Pernyataannya singkat tapi menyengat "Bapak, kami sampai saat ini belum merdeka". Mengapa mereka berkata demikian?. Ternyata pasalnya sederhana, penduduk masih mengalami kesulitan mendapatkan air untuk keperluan sehari-hari. Jangan tanya tentang kebiasaan buang air besar (BAB) mereka yang ternyata juga masih dilakukan di tempat terbuka. Kenyataan ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum, bahwa sekitar 90 juta penduduk Indonesia belum mempunyai akses terhadap air yang layak, dan sekitar 80 juta penduduk masih BAB sembarangan. Tapi menjadi luar biasa ketika kemudian penduduk mengkaitkannya dengan arti kemerdekaan.

Mungkin bagi penduduk perdesaan, arti kemerdekaan sangat sederhana yaitu mempunyai akses terhadap air yang layak. Sedemikian sederhananya. Tetapiutupan belum bisa kita berikan kepada mereka. Sampai kapan mereka merasa belum merdeka?. Ini pekerjaan rumah bagi kita semua. Pada perayaan kemerdekaan ke berapakah kemudian tidak ada lagi saudara kita yang masih merasa belum merdeka.

Kenyataan ini yang sebenarnya mendasari terbitnya **Percik** pada 5 tahun yang lalu. Ketika masih banyak sekali saudara kita yang belum memperoleh layanan AMPL yang memadai, sementara pengambil keputusan dan pihak terkait lainnya masih belum menjadikan isu ini sebagai prioritas. Kehadiran **Percik**, sesuai dengan filosofi namanya, dimaknai sebagai usaha memercikkan kesadaran pentingnya AMPL kepada pengambil keputusan dan kita semua.

Usia 5 tahun bagi sebuah majalah memang masih terasa sangat singkat. Walaupun bagi kami, keberadaan **Percik**



Foto: Meddy Chandra

sampai pada tahap sekarang ini saja sudah merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Hal ini mengingat lahirnya majalah ini hanya didasari oleh semangat tanpa berpikir apakah kemudian diminati atau tidak. Walaupun kemudian dengan berjalannya waktu, oplah **Percik** meningkat terus dari hanya 5.000 eksemplar menjadi 10.000 eksemplar setiap edisi. Menariknya, hanya separuhnya yang dibiayai oleh kami, selebihnya dibiayai bersama oleh pemangku kepentingan lainnya. Sementara sebagian besar berita dan artikel yang disampaikan berasal dari pembaca setia. Kenyataan ini menyadarkan kami bahwa keinginan menjadikan **Percik** sebagai majalah komunitas semakin dekat.

Satu hal yang juga menggembirakan adalah semakin banyak dan beragamnya berita tentang AMPL yang perlu disampaikan, sehingga mendorong pengelola **Percik** untuk menerbitkan *news letter* cetak setiap bulan, *news letter on line* yang disebarkan melalui milis setiap minggu, termasuk menerbitkan majalah **Percik Junior** bagi kalangan anak-anak

yang telah memasuki edisi ke-5 bekerjasama dengan Plan Indonesia. Upaya meningkatkan pemahaman masyarakat tentang AMPL juga kami lakukan melalui penerbitan Buku, VCD, Kliping, mengembangkan perpustakaan, menyelenggarakan pameran, mengelola situs internet (situs AMPL, situs AMPL Yuniior, situs Jejaring AMPL). Kesemuanya dalam balutan semangat menyampaikan segala hal terkait AMPL pada masyarakat luas. Dengan sadar kami memilih komunikasi sebagai fokus perhatian kami

Untuk itu, sengaja pada edisi ulang tahun kali ini kami mengangkat tema komunikasi dan AMPL. Berangkat pada kenyataan bahwa masih terpuruknya kondisi AMPL salah satunya disebabkan oleh kelemahan kita dalam melakukan komunikasi antarpelaku, dengan pengambil keputusan, dan dengan masyarakat.

Sebagai penutup, pernyataan penduduk desa bahwa "Tanpa air yang layak, kita belum merdeka" patut menjadi bahan renungan dan cambuk bagi kita semua. Tabik. ■ OM.

Butuh Materi Informasi AMPL

Salam hormat,

Saya seorang pengajar bidang Kimia, sangat tertarik dengan Majalah **Percik**. Saya ingin mendapatkan Majalah **Percik** dan informasi lain yang berhubungan dengan masalah air bersih dan sanitasi seperti program Menuju Sekolah Hijau (*Go to Green School*) sebagaimana pernah dibahas dalam edisi Agustus 2007. Apa boleh saya mendapatkan bukunya atau fotokopinya. Kalau boleh mohon dikirimkan pada alamat saya di bawah ini:

Saiful

Jl. Jeumpa D-46 Sektor Timur Darussalam, Banda Aceh

Nanggroe Aceh Darussalam 23111

Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatian dan bantuannya.

Wassalam,
Saiful

Yth. Bp Saiful,

dengan senang hati, kami akan memenuhi permohonan Bapak dengan mengirimkan secara rutin Majalah **Percik** dan informasi yang Bapak butuhkan, seperti buku Menuju Sekolah Hijau dalam bentuk fotokopi.

Terima kasih.

Mencari Funding

Kepada Redaksi Majalah **Percik**,

Kami dari YPAM yang beralamat di Jl Kentingan 28 Mudal, Boyolali, Jawa Tengah berdiri 4 Agustus 1995 dan bergerak secara aktif dibidang pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan prasarana air bersih dengan sistem gravitasi. YPAM pernah menjadi mitra *Mercy Corp Int & Australian Embassy* melalui DAP.

Seiring semakin langkanya air bersih, kami mencoba melakukan pendekatan pemberdayaan masyarakat ke pemilik sumber di Dusun Sendang, Cepogo Boyolali yang kaya akan sumber daya air. Kami mencoba menawarkan satu sumber dengan kapasitas 60 ribu liter sampai dengan 75 ribu liter/hari. Dimana pada

Ilustrasi: RudiKoz



musim kemarau ini harga satu tanki air Rp 70 ribu sampai dengan 150 ribu.

Bila sumber air tersebut kami suplai ke RSU Pandanarang di Boyolali sepanjang 14 kilometer dengan paralon AW diameter 11/4 Inc akan membutuhkan biaya sebesar Rp 150 juga. Pada saat ini pajak RSU ke PDAM sebesar Rp 14 juta/bulan dan pada musim kemarau air sering kurang. Bila RSU berani membayar Rp 30 ribu/tanki, masyarakat pemilik sumber akan mempunyai pendapatan kotor Rp 9 juta/bulan dalam periode 18 bulan inverstasi akan kembali dan bisa untuk perlindungan sumber air dan kepentingan lain.

Melalui rubrik setia **Percik**, kami berharap ada *funding agency* yang tertarik dan berminat dengan konsep YPAM. Kami bersedia untuk ekspos hasil survei kami tersebut. Terima kasih.

Hormat kami,
H Subardi
diyaheko@yahoo.com
(0276)3293385
Pelaksana Harian

Cara Mendapatkan Buku-buku dan CD

Yth Redaksi **Percik**,

1. Bagaimana cara berlangganan Majalah **Percik** dan mendapatkan buku-buku dan CD yang ada dalam katalog AMPL?

2. Dalam daftar info buku di perpustakaan AMPL terdapat Majalah Tekno Limbah, saya sangat berminat untuk mendapatkannya sebagai referensi mengajar, bagaimana caranya? Apakah *soft copy*-nya dapat didownload seperti

Majalah **Percik**?

Jika tidak keberatan mohon dikirim ke:

Eko Hartini, ST

Jl. Sentiaki Tengah 1 No 10

RT 05 RW VII Kel Bulu Lor

Semarang 50179

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Salam,
Eko Hartini, ST

Yth. Ibu Eko Hartini, ST

1. Untuk berlangganan Majalah **Percik**, akan segera kami proses pengiriman rutinnya. Untuk buku dan CD, silahkan menghubungi Perpustakaan Pokja AMPL, Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta telepon (021) 31904113.

2. Akan lebih baik bila Ibu langsung menghubungi majalah Tekno Limbah Jl. Kaliurang KM 7, Gg Jurugsari IV/19 PO BOX 19 YKPS Yogyakarta 55281 telepon (0274)885423/885247

Berlangganan Rutin

Redaksi Yth,

Terima kasih atas kiriman Majalah **Percik**, walaupun selama ini kami terima tidak secara rutin. Mengingat sangat pentingnya Majalah **Percik** bagi kami, kiranya redaksi dapat mengirim kami secara rutin/berlangganan (maaf berapa besar biaya yang harus dikirim) dan Majalah **Percik** terbit berapa bulan sekali?

Terima kasih atas perhatian dan dibulkannya permohonan kami.

Edi Rahman, SKM
Seksi Penyehatan Lingkungan
Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Ilir
Provinsi Sumatera Selatan 30662

Yth. Bp. Edi Rahman,
sebelumnya kami minta maaf dengan tidak lancarnya kiriman Majalah **Percik**. Ke depan semoga tidak terulang lagi. Bapak tidak usah berpikir biaya berlangganan, kecuali kebutuhan dalam jumlah yang banyak. **Percik** terbit setiap 3 bulan.

Demikian. Terima kasih.

KOMUNIKASI DAN PEMBANGUNAN AMPL

Pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL) tidak hanya terbatas pada pembangunan infrastruktur saja.

Namun, untuk menjaga keberlangsungan fasilitas yang telah diberikan, diperlukan keterlibatan dan partisipasi aktif masyarakat melalui advokasi dan sosialisasi pembangunan AMPL.

Untuk itu, tidak dapat dipungkiri, komunikasi memegang peranan penting dalam pembangunan AMPL di Indonesia.

Konsep komunikasi pembangunan sendiri dapat dilihat dalam arti yang luas dan terbatas. Dalam arti yang luas, komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi (sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal-balik) diantara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan, terutama antara masyarakat dengan pemerintah.

Dalam arti yang sempit, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan dan keterampilan-keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam melaksanakan



Media radio tetap menjadi media komunikasi yang efektif untuk menyampaikan program-program AMPL. Foto Istimewa

gagasan-gagasan yang disampaikan tadi.

Kedua pengertian tadi merupakan acuan dari konsep komunikasi pembangunan pada umumnya. Sedangkan konsep komunikasi pembangunan khas Indonesia dapat didefinisikan sebagai proses penyebaran pesan oleh seseorang

atau sekelompok orang kepada khalayak guna mengubah sikap, pendapat dan perilakunya dalam rangka meningkatkan kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah, yang dalam keselarasannya dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat.

Sebagai salah satu contoh, fasilitasi yang diberikan kepada masyarakat tidak hanya sebatas pembangunan fisik jamban. Tetapi juga sosialisasi agar perilaku masyarakat dapat berubah menjadi tidak hanya menggunakan jamban tetapi juga menjaga dan merawat jamban tersebut.

Untuk mengatasi hal ini, strategi komunikasi dalam penerapannya perlu melibatkan masyarakat, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga penilaian terhadap pembangunan jamban tersebut.

Prinsip Komunikasi Pembangunan

Perubahan perilaku masyarakat merupakan tujuan dari komunikasi pembangunan AMPL, dan upaya untuk mengubah perilaku masyarakat bukanlah suatu persoalan yang mudah. Dalam proses perubahan perilaku terdapat tiga tahapan perubahan, yakni perubahan persepsi, perubahan sikap dan kemudian perubahan tersebut diterapkan dalam suatu tindakan.

Perubahan perilaku masyarakat ini dapat dihasilkan dengan menerapkan strategi komunikasi yang efektif dan tepat sasaran. Komunikasi pembangunan akan lebih berhasil mencapai sasarannya serta dapat menghindarkan kemungkinan efek-efek yang tidak diinginkan akibat kekeliruan cara-cara komunikasi, bila menggunakan strategi komunikasi pembangunan yang dirumuskan sedemikian rupa, yang mencakup prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Penggunaan pesan yang dirancang secara khusus (*tailored message*) untuk khalayak yang spesifik.
- b. Pendekatan "*ceiling effect*" yaitu dengan mengkomunikasikan pesan yang bagi golongan yang dituju (katakanlah golongan atas) merupakan pengulangan (tidak lagi begitu berguna karena sudah dilampaui mereka atau kecil manfaatnya, namun tetap berfaedah bagi golongan khalayak yang hendak dicapai).
- c. Penggunaan pendekatan "*narrow casting*" atau melokalisir penyampaian pesan bagi kepentingan khalayak.
- d. Pemanfaatan saluran tradisional, yaitu berbagai bentuk pertunjukan rakyat yang sejak lama berfungsi sebagai saluran pesan yang akrab dengan masyarakat setempat (lihat tulisan pada halaman lain).
- e. Pengenalan para pemimpin opini di kalangan lapisan masyarakat yang berkekurangan (*disadvantage*) dan meminta bantuan mereka untuk menolong mengkomunikasikan pesan pembangunan.
- f. Mengaktifkan keikutsertaan agen



Kelompok masyarakat yang sedang membuat materi kampanye AMPL berupa produk audiovisual.
Foto Dok. WASPOLA

Komunikasi internal dibutuhkan untuk saling koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menghindari adanya tumpang tindih program atau kegiatan dan dalam mengatasi permasalahan AMPL secara bersama-sama.

perubahan yang berasal dari kalangan masyarakat sendiri sebagai petugas lembaga pembangunan yang beroperasi di kalangan rekan sejawat mereka sendiri.

- g. Diciptakan dan dibina cara atau mekanisme keikutsertaan khalayak (sebagai pelaku pembangunan itu sendiri) dalam proses pembangunan, yaitu sejak tahap perencanaan sampai evaluasinya.

Kunci Utama Pembangunan AMPL
Selain komunikasi yang bersifat

eksternal yang disampaikan kepada khalayak luas, juga tidak kalah penting untuk diperhatikan yaitu komunikasi yang bersifat internal. Komunikasi internal yang tidak baik antarpelaku AMPL akan menjadi kendala besar dalam pembangunan AMPL. Strategi komunikasi secanggih apapun yang diterapkan kepada masyarakat tidak akan berhasil secara maksimal jika tidak didukung komunikasi internal yang baik antarpelaku AMPL.

Komunikasi internal ini dibutuhkan untuk saling koordinasi antarpemangku kepentingan untuk menghindari adanya tumpang tindih program atau kegiatan. Selain itu, adanya koordinasi yang baik antarpemangku kepentingan menunjukkan perhatian semua pihak dalam mengatasi permasalahan AMPL secara bersama-sama, sehingga hasil yang didapat menjadi lebih maksimal.

Salah satu bentuk upaya meningkatkan komunikasi internal adalah dengan terbentuknya Jejaring AMPL yang merupakan wadah komunikasi diantara pemangku kepentingan AMPL di Indonesia (lihat edisi *Percik* Agustus 2008). ■ DHA

Media Rakyat

Media yang Dibuat oleh Masyarakat, Bukan Media yang Dibuat untuk Masyarakat

Gagasan ini muncul dari keprihatinan tentang rendahnya keterlibatan masyarakat sehingga banyak sarana air minum rusak dan tidak efektif digunakan, belum lagi pengalaman sulitnya merubah perilaku sanitasi di masyarakat. Sementara dari pihak aparat daerah merasa sosialisasi nampaknya tiada hentinya dilakukan, baik penyuluhan maupun penyebaran leaflet, brosur dan sebagainya.

Padahal penyelesaian permasalahan AMPL sangat membutuhkan partisipasi multielemen, terutama masyarakat untuk menjamin efektifitas dan keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarannya. Dibutuhkan alternatif pendekatan lain yang tidak hanya mengandalkan kekuatan komunikasi dari pemerintah, tetapi justru kekuatan dari pihak masyarakat itu sendiri sebagai salah satu potensi komunikasi perubahan perilaku.

Mengapa Media Rakyat?

Sebagaimana di kabupaten lain di seluruh Indonesia, Kebumen yang merupakan salah satu dari 29 kabupaten di Jawa Tengah, menghadapi berbagai persoalan kompleks dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi sebagian penduduknya. Di sebagian besar wilayah, pemenuhan kebutuhan air minum memang bisa dipenuhi dengan mudah, tetapi di sebagian wilayah lain sangat susah.

Berbagai upaya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air minum di wilayah yang mengalami kesulitan dengan membangun sarana air perpipaan gravitasi, sarana perpipaan dengan pompa, sumur dangkal, sumur bor, dan sebagainya. Persoalan muncul karena sebagian sarana tersebut rusak tanpa ada upaya penduduk untuk memper-



Cergam (cerita bergambar), salah satu media komunikasi yang efektif bagi masyarakat.
Foto Dok. WASPOLA

baiknya.

Keadaan semakin dipersulit karena perubahan lingkungan di wilayah tangkapan air. Di daerah tangkapan air yang merupakan hutan heterogen, penduduk melakukan penebangan pohon secara ilegal. Juga perubahan hutan heterogen menjadi hutan homogen dengan jenis tanaman pinus telah menyebabkan berkurangnya kemampuan daerah resapan dan di musim hujan, kondisi demikian menyebabkan banjir, erosi, dan longsor di beberapa wilayah yang rawan.

Berbagai masalah yang timbul sesungguhnya bisa dipandang sebagai masalah sosial, dalam arti bahwa masyarakat memang tidak mengetahui makna hutan sebagai resapan air (karena mereka menebangi hutan), tidak mengetahui dampak dari penebangan hutan terhadap ketersediaan air tanah, lalu juga keterkaitan antara ketersediaan sarana air minum dengan peningkatan kesejahteraan mereka. Masih banyak

persepsi keliru penduduk bahwa perawatan, pembangunan sampai pemeliharaan sarana menjadi kewajiban/tugas pemerintah, apalagi didukung persepsi warga bahwa air adalah benda yang bisa di dapatkan tanpa pengorbanan ekonomi (gratis), dan sebagainya.

Cara berpikir yang demikian tentu saja tidak bisa dibiarkan tetapi segera diperlukan perubahan. Apabila tidak, pemenuhan kebutuhan air akan semakin sulit karena berbagai faktor seperti perubahan kualitas ekosistem daerah tangkapan air yang berakibat pada menurunnya debit dan persediaan air tanah yang tampak nyata dari semakin meluasnya wilayah kekeringan di musim kemarau.

Ini bukan masalah fisik semata tetapi akar masalahnya adalah permasalahan sosial, sehingga untuk menanggulangnya perlu dilakukan perubahan perilaku yang bertahap sejak dari aspek *cognitive* (pengetahuan), *affective* (pera-

saan/emosi/sikap), dan *practice* (tindakan/aksi) masyarakat.

Untuk mengubah perilaku tersebut tidak mungkin hanya mengandalkan kekuatan komunikasi sepihak (pemerintah), namun diperlukan suatu proses yang lebih dialogis dan metode yang tepat dengan kearifan lokal setempat, apalagi menyangkut sesuatu yang sudah *internalized* (mendarah daging).

Disinilah baru dirasakan bahwa tidak cukup hanya dengan menggunakan cara dan jalur-jalur media komunikasi yang sudah ada untuk menyampaikan penyuluhan. Diperlukan cara alternatif untuk upaya yang lebih membangun, daripada sekedar memberi tahu dan menghimbau semua orang untuk berubah, tetapi komunikasinya bersifat satu arah dimana pesan dan desain medianya disiapkan dari pihak pemerintah.

Media rakyat dirasakan menjadi salah satu metode untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, karena dalam pelatihan media rakyat bukan hanya mengandalkan hasil akhir media yang dibuat. Media rakyat justru mengandalkan proses interaksi yang berlangsung secara dialogis untuk menemukan solusi bersama diantara para peserta, sehingga terjadi proses internalisasi dimana warga menyadari bahwa dirinya menjadi bagian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, lalu tergerak dengan suka rela bersedia mengubah perilakunya dan pada akhirnya mau terlibat didalamnya.

Ide ini muncul pada waktu lokakarya strategi komunikasi pembangunan AMPL untuk persiapan 11 desa yang akan mendapatkan program AMPL di tahun 2008. Istilah media rakyat pada awalnya dipahami sebagai kesenian rakyat, kemudian berkembang menjadi sarana komunikasi antarmasyarakat dan akhirnya disepakati menjadi media yang akan menyuarakan isu/tema AMPL disesuaikan kearifan lokal, dibuat bersama-sama antara berbagai pihak yang terkait AMPL, serta menggunakan potensi yang sudah ada seperti kesenian rakyat maupun radio dan televisi lokal dan di Kebumen sudah menjadi bagian hidup masyarakat.



Para tokoh masyarakat berdiskusi strategi komunikasi terkait program-program AMPL.
Foto Dok. WASPOLA

Tahapan Media Rakyat

Pada awalnya sebelum dilakukan pelatihan dilakukan bersama pemetaan masalah dan mendata potensi kelompok strategis di enam kecamatan yang akan bersama-sama melakukan pelatihan di Kecamatan Poncowarno. Diperoleh beberapa nama tokoh masyarakat dan tokoh kesenian setempat maupun peserta lainnya.

Pelatihan pada Maret 2008 yang melibatkan tidak kurang dari 30 orang tersebut diikuti Pokja AMPL-BM Kabupaten Kebumen, aparat Kecamatan Poncowarno, Karang Sambung, Aliyan, Padureso, dan Sadang, LSM, organisasi masyarakat seperti Tim Penggerak PKK dan karang taruna, tokoh kesenian dan media massa setempat seperti Ratih TV, In-FM, dan Mass FM.

Inti dari pelatihan ini adalah menggali bersama pemahaman bahwa permasalahan AMPL adalah permasalahan bersama, sehingga dibutuhkan komunikasi dan kerjasama yang baik dari semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Peran masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam keberlanjutan pembangunan AMPL sehingga dimasa mendatang cadangan air minum tetap ada dan pada akhirnya warga bisa ter-

cukupi kebutuhan air minum dan sanitasinya.

Ada beberapa materi pokok yang digali dalam pelatihan media rakyat ini, yaitu :

- Pentingnya komunikasi dan kerjasama yang baik dari berbagai pihak.
- Permasalahan dan prioritas AMPL sesuai kebutuhan yang kemudian menjadi tema dan pesan yang berorientasi pada kepentingan warga.
- Menggali potensi dan media yang tepat di sekitar kita untuk digunakan.
- Membuat produksi media bersama baik kesenian yang bisa dipentaskan, cerita yang bisa dibaca, siaran radio yang bisa didengarkan maupun ditayangkan.
- Penggunaan metode kelompok media sebagai sarana penggerak aksi di masyarakat.
- Rencana tindak lanjut dan kesepakatan pemantauan dan evaluasi.

Keunikan dari pelatihan media ini adalah sejak permasalahan ditentukan, penulisan naskah maupun pembuatan produksi dilakukan sendiri oleh peserta, difasilitasi tim media dari WASPOLA dan Pokja AMPL.

Pengalaman Hasil Pelatihan

Hasil monitoring yang dilakukan tim WASPOLA pada Mei dan Juni 2008 kepada enam kecamatan peserta, menunjukkan bahwa peserta pelatihan telah menggunakan pengalaman dan pengetahuan komunikasinya melalui media rakyat. Dari hasil pengisian kuesioner sederhana, acara berlanjut dengan berbagai pengalaman dalam menerapkan media rakyat.

Adapun hasil umum pemantauan yang didapatkan melalui daftar pertanyaan yang diisi oleh mereka adalah:

kelanjutan fasilitasi ketrampilan terutama pembuatan cergam dan poster karena cukup efektif, biaya murah dan bisa dibawa pulang ke rumah. Pokja Kabupaten telah menindaklanjuti pada bulan Juli yang lalu dengan pelatihan cergam dan poster AMPL kepada Sanggar Lukis Gombang yang terdiri dari guru dan para siswanya, diakhir acara mereka menghasilkan dua cergam dan satu poster yang siap digunakan warga untuk sosialisasi AMPL.

Dari Ratih TV diperoleh informasi bahwa hasil pelatihan Media Rakyat sete-

bahwa mereka sering melihat tayangan iklan televisi tersebut dan Bupati Rustriningsih (yang saat ini sudah menjadi wakil gubernur Jawa Tengah) mendapat julukan baru sebagai Bupati AMPL.

Media Rakyat Menjadi Inspirasi

Kelompok Kerja AMPL Kabupaten Kebumen telah menyelenggarakan pelatihan Media Rakyat dengan melibatkan *stakeholder* secara luas. Peserta pelatihan bukan saja secara antusias mengikuti pelatihan tetapi juga telah menggunakannya untuk membangun partisipasi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

Dengan demikian rencana pembangunan AMPL di tahun 2008 dan 2009 ini telah dimulai dengan membangun kesadaran terlebih dahulu, sebelum pembangunan fisik dilaksanakan.

Sebagian besar warga telah menyadari bahwa kontribusi sekecil apapun dari mereka sangat berarti bagi keberlanjutan. Muncul juga kesadaran bahwa kaum perempuan sangat berperan dalam pembangunan AMPL, maka salah satu tindak lanjut yang telah dilakukan Juli lalu adalah lokakarya penguatan komunikasi untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan AMPL yang dilaksanakan untuk sembilan kecamatan lainnya, termasuk didalamnya membagikan pengalaman media rakyat yang lalu.

Hasilnya kecamatan lain ingin mendapatkan pengalaman media rakyat agar masyarakat lebih proaktif. Tim pelatih lokal sedang disiapkan agar mampu melatih kecamatan lain yang berminat. Eks-peserta seperti Ratih TV, Mass FM dan Sanggar Lukis Gombang siap membantu Pokja Kabupaten sebagai pelatih.

Adanya komunikasi dengan berbagai pihak ini, diharapkan akan menciptakan iklim kondusif bagi pembangunan AMPL, sehingga dimasa mendatang pembangunan yang partisipatif bisa terwujud, keberlanjutan dan efektifitas sarana yang dibangun bukan hanya menjadi angan-angan kosong belaka. ■ Wiwiet Heris & Alma Arief

HASIL PEMANTAUAN PASCA PELATIHAN MEDIA RAKYAT DI KABUPATEN KEBUMEN				
No.	Item	Belum	Pernah 1s/d 3 kali	Pernah > 3 kali
1.	Terjadi kontak dan komunikasi sesama peserta pelatihan termasuk dengan Pokja AMPL	-	69,2%	30,8%
2.	Menyiarkan atau menggunakan media sosialisasi AMPL dalam pertemuan warga	-	76,9%	23,1%
3.	Mengangkat isu AMPL dalam pertemuan kelompok atau kegiatan yang berkaitan dalam tugas sehari-hari di masyarakat	15,4%	61,5%	23,1%
4.	Melaksanakan/merencanakan tindak lanjut bersama antarkecamatan atau instansi terkait	38,8%	69,2%	-

Diakhir acara monitoring, peserta memberikan masukan kepada Pokja AMPL dan WASPOLA agar terdapat

lah direvisi kembali akhirnya ditayangkan setiap pagi. Dari pertemuan di Desa Karang Sari, beberapa ibu menuturkan



Seorang siswa SMP sedang membuat poster untuk sosialisasi AMPL. Foto Dok. WASPOLA

Lima Pesan Sanitasi



Sanitasi yang baik akan mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Foto: Istimewa

Tahun 2008 telah ditetapkan oleh PBB menjadi Tahun Sanitasi Internasional. Untuk itu, PBB mengkampanyekan Lima Pesan Sanitasi sebagai bagian dari upaya agar sanitasi mendapat perhatian yang memadai.

Pesan 1: Sanitasi meningkatkan derajat kesehatan dan menyelamatkan kehidupan

Setiap hari, diare yang disebabkan oleh sanitasi buruk membunuh 5.000 bayi dan anak-anak di dunia. Ketersediaan toilet yang sehat dapat mengurangi kematian bayi dan anak akibat diare lebih dari 30 persen dan cuci tangan sebesar 40 persen. Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) merupakan salah satu pembunuh terbesar anak. Praktek higienitas seperti cuci tangan pakai sabun sesudah buang air besar dan

sebelum makan dapat mencegah setengah kejadian ISPA.

Pesan 2: Sanitasi mempunyai manfaat ekonomi bagi negara, komunitas dan keluarga.

Sanitasi buruk menghambat pembangunan nasional melalui berkurangnya produktifitas pekerja, menurunnya angka harapan hidup, menurunnya investasi dan tabungan, dan berkurangnya kemampuan menyekolahkan anak.

Sanitasi yang baik akan menolong kondisi perekonomian melalui beragam cara yaitu (i) hemat waktu. Kita kehilangan waktu ketika sakit, menjaga dan merawat orang sakit dan mengantri untuk buang air besar; (ii) mengurangi biaya kesehatan sehingga dapat meningkatkan tabungan; (iii) meningkatkan hasil investasi pendidikan. Berkurangnya diare

meningkatkan jumlah kehadiran anak sekolah. Anak perempuan akan lebih rajin sekolah jika tersedia toilet yang ramah wanita. Keseluruhannya berujung pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Potensi kerugian yang terjadi akibat buruknya sanitasi di Indonesia mencapai besaran angka Rp 58 Triliun sebagaimana tertulis dalam buku hasil studi berjudul *Economic Impacts of Sanitation in Southeast Asia* yang diterbitkan oleh *Water and Sanitation Program - East Asia and the Pacific (WSP-EAP) World Bank East Asia and the Pacific Region* terbitan Nopember 2007.

Besarnya kerugian tersebut mencapai 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau sekitar Rp. 240 ribu per kapita per tahun. Rincian potensi kerugian tersebut berasal dari biaya kesehatan sebesar Rp. 31 Triliun, penurunan kualitas air sebesar Rp. 13,5 Triliun, penurunan kualitas lingkungan sebesar Rp. 1 Triliun, kesejahteraan sosial sebesar Rp. 11 Triliun, dan pariwisata sebesar Rp. 1,5 Triliun.

Pesan 3: Sanitasi mendorong pembangunan sosial.

Sanitasi memadai akan membangkitkan rasa percaya diri karena tidak perlu buang air besar di tempat terbuka, terutama bagi kaum perempuan.

Pesan 4: Sanitasi melindungi lingkungan

Khususnya di daerah padat penduduk, kondisi sanitasi yang tidak memadai akan menyebabkan tercemarnya air tanah, air permukaan/sungai, danau, dan sumber air lainnya. Akibatnya, bayi dan anak balita akan terkena diare.

Pesan 5: Kita bersama dapat melakukannya

Sekarang saatnya untuk bertindak. Rumah tangga, komunitas, pemerintah daerah dan pemerintah nasional, masyarakat madani, dan perusahaan swasta perlu bekerja bersama. Media dan pendapat publik dapat mempengaruhi pengambil keputusan untuk segera bertindak. ■ OM

Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM)

Sejak awal tahun 1979 sampai dengan saat ini penyediaan air minum khususnya perpipaan telah dibangun dan dikembangkan menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat sektoral maupun pendekatan keterpaduan dan kewilayahan (perkotaan dan perdesaan).

Pada awalnya, pengembangan sistem penyediaan air minum banyak dilakukan pemerintah pusat, namun demikian sejalan dengan upaya pelaksanaan desentralisasi dan perkembangan sosial politik dalam negeri, penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) menjadi kewenangan wajib pemerintah daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan wajib tersebut lebih ditegaskan lagi dan dalam pelaksanaannya Pemerintah Pusat dapat memfasilitasi/membantu pengembangan SPAM khususnya dalam rangka pengamanan (*safeguard*) pencapaian sasaran nasional dan pengendalian pelaksanaan untuk perwujudan standar pelayanan minimal.

Seiring peraturan perundang-undangan yang terkait pengembangan air minum, pemerintah telah menyusun Rencana dan Strategi tahun 2005-2009 yang bertujuan:

- Memberikan akses ke seluruh pelosok tanah air dan menangani tanggap darurat untuk memberikan pelayanan minimal bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sosial ekonomi, agar terwujud Indonesia yang aman dan damai.
- Membina penyelenggaraan infrastruktur secara transparan dan terbuka dengan melibatkan masyarakat, meningkatkan peran Peme-

rintah Daerah agar terwujud Indonesia yang adil dan demokratis.

- Menyelenggarakan infrastruktur yang efisien, efektif dan produktif agar terwujud Indonesia yang lebih sejahtera.

Sementara itu, dalam rangka percepatan pelayanan pada sektor air bersih, sanitasi, dan persampahan, dan untuk mencapai sasaran yang tertuang dalam MDG (*Millennium Development Goals*) dengan dilatarbelakangi kondisi ketersediaan prasarana dan sarana Air Minum dan Kesehatan Lingkungan (AMKL) yang masih sangat terbatas maka perlu kiranya suatu kebijakan dan strategi dalam bidang air minum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas, syarat kuantitas dan syarat kontinuitas.

Untuk mencapai tujuan di atas dan menindaklanjuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, perlu disusun Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM) yang dapat dijadikan acuan bagi para pelaku pembangunan/penyelenggaraan SPAM di tingkat nasional dan daerah dengan memperhatikan:

- Adanya keinginan untuk meningkatkan kondisi air minum Indonesia yang ada saat ini, sesuai sasaran atau kondisi yang diinginkan dalam pengembangan SPAM, baik dilihat dari aspek teknis, manajemen, keuangan maupun hukum.
- Upaya pencapaian sasaran yaitu melalui Perumusan Tujuan dan

Sasaran Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi sasaran pencapaian, yaitu penyesuaian dari kondisi yang diinginkan dengan kemampuan dari Pemerintah terutama dalam hal pendanaan.

- Perumusan Tujuan dan Sasaran Kebijakan dan Strategi Pengembangan SPAM yang kemudian berpedoman pada landasan hukum yang ada dan berdasarkan isu-isu strategis dan permasalahan yang dihadapi saat ini, serta memperhatikan Deklarasi Internasional dan Nasional.

KSNP SPAM perlu disepakati bersama oleh seluruh *stakeholder* penyelenggaraan SPAM di pusat maupun di daerah. Perlu dibangun konsensus ini dengan sektor terkait, dan lintas departemen, melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Karena itu, menteri pekerjaan umum mengeluarkan Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/ M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM).

Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM (KSNP-SPAM) ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan teknis, perencanaan, pemrograman, dan pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan pengembangan SPAM di perkotaan dan perdesaan, baik di lingkungan Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, maupun bagi masyarakat dan dunia usaha.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pe-

ngembangan SPAM (sistem jaringan perpipaan dan sistem bukan jaringan perpipaan) atau KSNP-SPAM sebagaimana dimaksud di atas, bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional pengembangan SPAM melalui rencana, program dan pelaksanaan kegiatan yang terpadu, efisien dan efektif.

Visi dan Misi

Maksud dan tujuan tersebut tercantum dalam Pasal 1 (ayat 1) Peraturan Menteri PU Nomor 20/PRT/ M/2006. Sementara pada (ayat 2) membicarakan mengenai visi dan misi pengembangan sistem penyediaan air minum dan isu strategis.

Visi pengembangan sistem penyediaan air minum untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera di masa datang, baik yang berada di daerah perkotaan maupun yang tinggal di daerah perdesaan, akan sangat membutuhkan ketersediaan air minum yang memadai secara berkelanjutan.

Air minum sebagai sumber kehidupan manusia perlu dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan kesehatan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia tanpa terkecuali. Daerah perkotaan dan perdesaan di masa depan harus dapat menjamin kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui air minum yang berkualitas. Upaya pencapaian visi tersebut di atas perlu dilakukan, dengan misi meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan air minum, meningkatkan kemampuan manajemen dan kelembagaan penyelenggaraan SPAM dengan prinsip *good and corporate governance*, mobilisasi dana dari berbagai sumber untuk pengembangan sistem penyediaan air minum, menegakkan hukum dan menyiapkan peraturan perundangan untuk meningkatkan penyelenggaraan SPAM, menjamin ketersediaan air baku yang berkualitas secara berkelanjutan, dan memberdayakan masyarakat dan dunia usaha berperan aktif dalam penyelenggaraan SPAM.

Kebijakan dan Strategi

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam

Kebijakan dan strategi pengembangan SPAM dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan SPAM.

pengembangan SPAM. Berdasarkan kelompok kebijakan yang telah dirumuskan, ditentukan arahan kebijakan sebagai dasar dalam mencapai sasaran pengembangan SPAM yang diarahkan juga untuk memenuhi sasaran MDG baik jangka pendek tahun 2009 maupun jangka panjang 2015.

Adapun arahan kebijakannya antara lain peningkatan cakupan dan kualitas air minum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan secara konsisten dan bertahap, menurunkan tingkat kehilangan air melalui perbaikan dan rehabilitasi serta memprioritaskan pembangunan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Sementara strateginya, mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang dilakukan secara bertahap di setiap provinsi.

Strategi ini dilaksanakan melalui rencana tindak sebagai berikut:

Untuk daerah yang sudah dilayani SPAM:

1. Bantuan fasilitasi perluasan pelayanan melalui penambahan kapasitas dan pengembangan jaringan untuk PDAM-PDAM sehat.
2. Bantuan teknis/program fasilitasi penyelenggaraan SPAM dengan pola Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) terutama di kota metro dan besar maupun kawasan perumahan baru.
3. Bantuan Program Penyehatan PDAM melalui:
 - a. Perluasan pelayanan bagi PDAM kurang sehat untuk meningkatkan pendapatan.

- b. Optimalisasi sistem dengan menurunkan kapasitas tak termanfaatkan hingga kurang dari 10 persen.
- c. Perluasan pelayanan hingga mencapai skala ekonomis.

Untuk daerah yang belum dilayani SPAM

1. Bantuan fisik pembangunan baru SPAM untuk kota sedang/kecil (IKK) diutamakan:
 - a. Ibukota kecamatan yang belum memiliki sistem.
 - b. Ibukota kabupaten/kota pemekaran.
 - c. Kawasan/desa rawan air, kawasan perbatasan, daerah pesisir, pulau-pulau terpencil.
2. Bantuan fisik pengembangan SPAM melalui perluasan pelayanan dari wilayah tetangga yang sudah memiliki SPAM.
3. Bantuan fisik pengembangan SPAM untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah di kawasan RSH.

Penutup

Dengan terselesainya Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), maka selanjutnya seluruh kebijakan yang telah disepakati akan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan SPAM.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM ini bersifat umum sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu penterjemahan yang lebih operasional dari pihak yang berkepentingan. Adopsi dan adaptasi Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM akan berbeda di setiap daerah, disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing daerah.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan SPAM ini perlu dijabarkan lebih lanjut oleh masing-masing instansi teknis terkait sebagai panduan dalam operasionalisasi kebijakan dalam pengembangan SPAM. Hal ini diatur dalam Pasal 2 dan 3 Peraturan Menteri PU ini. ■ BW

AIR BERSIH, SANITASI, DAN PENGURANGAN RESIKO BENCANA

Oleh: Avianto Amri

Disaster Risk Reduction Specialist
Plan Indonesia

Indonesia, di samping memiliki kekayaan alam yang melimpah, merupakan salah satu negara di dunia yang paling rawan terkena bencana. Negara kita terletak di antara tiga lempeng tektonik sehingga rawan akan gempa bumi, memiliki 129 gunung berapi yang aktif, memiliki iklim yang basah sehingga rawan akan banjir dan tanah longsor. Pada tahun 2007, 14 dari 33 provinsi di Indonesia terkena banjir bandang yang mengakibatkan puluhan ribu orang meninggal. Indonesia juga rentan akan kebakaran hutan yang disebabkan oleh manusia ataupun secara alami.

Bencana adalah gangguan serius dari berfungsinya satu masyarakat yang menyebabkan kerugian yang besar terhadap lingkungan, material dan manusia, yang melebihi kemampuan dari masyarakat yang terkena dampak untuk menanggulangi dengan hanya menggunakan sumber dari masyarakat itu sendiri.

Dari definisi ini dapat dilihat bahwa bencana memiliki tiga faktor yaitu adanya gangguan, adanya kerugian yang besar, dan melebihi kemampuan dari masyarakat yang terkena dampak. Tanpa keberadaan ketiga faktor tersebut, maka bukanlah merupakan suatu bencana.

Oleh karena itu, mengingat kembali bahwa negara kita terletak di daerah yang rawan akan bencana, seluruh pembangunan harus memperhatikan kaidah-kaidah resiko bencana sesuai konteks lokalnya. Dampak dari bencana bisa dicegah dengan melakukan perencanaan yang matang, melakukan kajian resiko terlebih dahulu dengan melihat data historis mengenai kejadian yang terjadi pada dahulu kala dan melakukan pembangunan sesuai dengan yang diren-

canakan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang didalamnya memuat kewajiban pemerintah untuk memperhatikan pembangunan tata ruang sesuai dengan kajian resikonya dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran.

Berbagai upaya dapat diusahakan untuk membuat fasilitas air bersih dan sanitasi "tahan" akan resiko bencana. Di India dan Bangladesh, negara yang rawan akan banjir, masyarakat meninggikan bibir sumurnya sehingga air limpasan banjir tidak mengkontaminasi air tanah dan pasokan air bersih tetap terjamin walaupun terjadi banjir. Di banyak negara-negara di Afrika, komunitas petani membangun dam dan menanam tanaman konservasi sehingga pasokan air terjaga pada masa kekeringan. Penggunaan air tanah yang tidak berlebihan juga dapat menjaga pasokan air tanah yang berkelanjutan terhadap kemungkinan terjadinya kekeringan atau kontaminasi air tanah akibat banjir.

Salah satu contoh dari usaha-usaha Pengurangan Resiko Bencana adalah usaha Palang Merah di Vietnam yang melakukan penanaman tanaman bakau di delapan provinsi di Vietnam untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pesisir dari topan dan badai. Usaha ini menghabiskan biaya US\$ 0.13 juta dolar setiap tahunnya dari tahun 1994 hingga 2001 namun mengurangi biaya tahunan memperbaiki tanggul yang biasanya menghabiskan biaya US\$ 7.1 juta dolar. Program ini juga dapat menyelamatkan nyawa dan menjaga serta meningkatkan sumber mata pencaharian masyarakat sekitar.

Untuk masyarakat yang rawan akan bencana, pasokan air bersih dan adanya fasilitas sanitasi memegang peranan vital dalam mengurangi dampak dari bencana tersebut. Bencana-bencana terutama

banjir dan tsunami dapat mengakibatkan terkontaminasinya fasilitas air bersih sedangkan gempa bumi dan tanah longsor dapat mengakibatkan rusaknya fasilitas tersebut.

Pada masa tanggap darurat, masyarakat terutama anak-anak rentan akan penyakit apabila tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi. Adapun standar-standar yang diakui secara internasional pada saat tanggap darurat tercantum di dalam dokumen yang bernama *Sphere* (<http://www.sphereproject.org>). Di dalam dokumen *Sphere*, selain standar air bersih, sanitasi dan promosi kesehatan, terdapat juga standar lainnya dalam bidang bantuan pangan, kesehatan, dan permukiman.

Beberapa contoh indikator kunci di bidang Air Bersih dan Sanitasi:

- Minimal 15 liter air bersih per orang per hari.
- Jarak dari permukiman ke lokasi pengambilan air maksimum 500 meter, 250 gram sabun untuk kebersihan pribadi per orang per bulannya.
- Terdapat satu kakus untuk maksimum 20 orang.
- Kakus tidak berjarak lebih dari 50 meter dari permukiman.
- Para pengguna (terutama anak-anak dan perempuan) terlibat dalam konsultasi desain

Pembangunan yang memperhatikan kaidah-kaidah resiko bencana merupakan suatu hal yang penting dilakukan dan merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah, masyarakat, pihak swasta, akademisi, LSM, dan pihak-pihak lainnya memiliki tanggung jawab bersama untuk menciptakan masyarakat yang siap, tanggap, dan tahan akan bahaya bencana. Adanya pemahaman bersama dan kerjasama dengan seluruh pihak merupakan faktor kunci keberhasilan dari usaha pengurangan resiko bencana. ■

Community Based Landfill Monitoring

Peristiwa longsoalnya tempat pembuangan akhir (TPA) Leuwigajah pada 2005 yang memakan korban jiwa, mendorong adanya pengelolaan sampah yang lebih baik. Berbagai upaya dilakukan berbagai pihak untuk mengatasi tidak terulangnya kejadian yang mengenaskan itu. Salah satunya dengan *Community Based Landfill Monitoring* (CBLM) yang merupakan suatu program kerjasama yang diprakarsai EU-Asia Pro Eco II.

Sedangkan untuk kerjasama akademis melibatkan Institut Teknologi Bandung (ITB), *BOKU-University Vienna Austria*, *Institute of Waste Management*, dan *TU Braunschweig Germany*, *Department of Waste Management*. Selain itu, program ini melibatkan pula pemerintah Indonesia melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat dan lembaga swadaya masyarakat di Kota Bandung, yaitu Katur Nagari.

Dari peristiwa Leuwigajah tersebut teretuslah ide kegiatan pengembangan model pemantauan berbasis masyarakat yang direncanakan berlokasi di daerah TPA Leuwigajah dengan periode kerjasama mulai Februari 2006 sampai Desember 2008. Pemantauan dilakukan oleh ITB dan masyarakat setempat yang datanya akan dipublikasikan BPLHD.

Program ini dilatarbelakangi permasalahan belum terkelolanya manajemen dan pembuangan sampah di Asia yang belum baik. Target masyarakat yang dilindungi adalah masyarakat yang berada di wilayah sekitar TPA dan berhubungan langsung dengan TPA dan bahaya yang diidentifikasi antara lain gas, pencemaran air, longsor, dan masalah sanitasi.

Sebelum kegiatan program ini dimulai, terlebih dahulu telah dilakukan perte-

Oleh: Benno Rahardyan

Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB

muan dengan masyarakat setempat pada tahun 2007, hingga akhirnya masyarakat setuju dengan program tersebut. Masyarakat yang terlibat dalam kegiatan pemantauan diberikan pelatihan singkat mengenai deskripsi kegiatan, tujuan dan pelatihan pemakaian alat pemantauan, pencatatan data harian hingga evaluasi di akhir kegiatan.

Respon dari masyarakat Desa Cilimus dan Desa Pojok menyatakan bahwa masyarakat merasa lebih mendapatkan gambaran keadaan terhadap kondisi lingkungan di area TPA.

Lokasi pemantauan yang dilakukan di TPA Leuwigajah antara lain di sekitar Kampung Cireunde dan Kampung Pojok. Untuk pemantauan kualitas air ditempatkan di daerah Cireunde dan daerah hilir yang berada di wilayah Desa Pojok. Pemantauan air juga dilakukan untuk sumur yang berada di bagian hilir sungai dan air dari *jet pump* yang berada di wilayah tengah sungai yang masih dalam kawasan Desa Pojok.

Selain air, pemantauan udara juga dilakukan di 15 titik, namun sampai saat ini hanya tersisa dua alat pemantau, hal ini dikarenakan sebagian besar titik pemantauan hilang karena diambil pemulung. Untuk potensi kelongsoran di sekitar TPA, dilakukan pengukuran data geoteknik di 12 titik.

Pemantauan Sanitasi

Masalah sanitasi yang dipantau berdasarkan *fly indeks* yang diperoleh dari tiga alat penghitung lalat. Untuk data kualitas air yang dipantau antara lain pH, daya hantar listrik dan temperatur air. Untuk emisi gas, parameter yang diukur antara lain CH₄, CO₂, O₂, dan CO.

Kondisi cuaca yang diamati hanya meliputi curah hujan, temperatur udara dan kelembaban harian. Pelatihan yang telah dilakukan dalam rangka edukasi pada masyarakat Kampung Pojok dan Kampung Cireunde diantaranya pelatihan komputer dan internet, pelatihan penggunaan alat ukur air yang disosialisasikan melalui media situs www.cblm-leuwigajah.org. Media ini dapat diakses tim terkait kegiatan serta masyarakat luar termasuk dari negara lain.

Respon dari masyarakat Desa Cilimus dan Desa Pojok menyatakan bahwa masyarakat merasa lebih mendapatkan gambaran keadaan terhadap kondisi lingkungan di area TPA. Hal ini tentunya dapat membantu mengurangi kekhawatiran karena ketidaktauhan akan situasi yang ada, terutama berkaitan dengan potensi bahaya di daerah TPA.

Dampak tidak langsung dari kegiatan CBLM ini antara lain pemberdayaan masyarakat sebagai pendukung operasional *landfill*, pengembangan antisipasi dan pencegahan pegoperasian *landfill* yang tidak/kurang baik. Sedangkan untuk *stakeholders* yang terlibat, adanya model peningkatan untuk sistem komunikasi yang lebih baik. Untuk melihat hasil pemantauan lapangan serta laporan lengkap kegiatan ini, dapat diakses melalui situs yang telah disebutkan di atas. ■



Dirjen P2 & PL Depkes I Nyoman Kandun dan Dirjen Cipta Karya PU Budi Yuwono bersama siswa-siswi sekolah dasar mempraktikkan CTPS. Foto Istimewa

HARI CUCI TANGAN PAKAI SABUN SEDUNIA

Penyakit diare adalah masalah global dan banyak berjangkit di negara-negara berkembang dengan kondisi sanitasi lingkungan yang buruk, tidak cukup pasokan air bersih, kemiskinan dan pendidikan yang rendah. Insiden diare bervariasi di setiap wilayah, musim, dan masa-masa endemik seperti kejadian luar biasa kolera.

Umumnya insiden tertinggi terjadi pada dua tahun pertama usia anak yang menurun dengan meningkatnya usia. Pada balita, dilaporkan sekitar empat miliar kasus diare akut terjadi tiap tahun di dunia, dengan jumlah kematian sekitar dua juta. Di Indonesia, Survei Kesehatan

Nasional tahun 2001 menempatkan diare pada posisi tertinggi kedua sebagai penyakit paling berbahaya pada balita setelah Infeksi Saluran Pernapasan Akut atau ISPA. Padahal survei yang sama tahun 1995, diare masih kurang berbahaya dibandingkan ISPA dan sindrom pasca kelahiran.

Kajian ilmiah yang disusun oleh Curtis and Cairncross (2003) menyarankan bahwa perilaku cuci tangan pakai sabun (CTPS) khususnya setelah kontak dengan feses (setelah ke jamban dan membantu anak ke jamban), dapat menurunkan insiden diare hingga 42-47 persen. Kajian lainnya oleh *Rabie and*

Curtis (2005) menyebutkan bahwa perilaku CTPS juga dapat menurunkan transmisi ISPA hingga lebih dari 30 persen, bahkan pada kondisi lingkungan dengan kontaminasi feses yang sangat tinggi serta sanitasi yang buruk.

Kajian lainnya menemukan bahwa anak di bawah lima tahun yang tinggal di perumahan yang menerima intervensi perilaku CTPS memiliki 53 persen insiden diare lebih rendah dari pada mereka yang tinggal di daerah kontrol di Pakistan (Luby 2004). Bahkan UNICEF menemukan CTPS dapat juga menurunkan 50 persen insiden Avian Influenza. Hal ini membuat intervensi CTPS dianggap sebagai pilihan perilaku yang efektif untuk pencegahan berbagai penyakit menular.

Perilaku CTPS telah terbukti secara ilmiah sebagai cara yang efektif untuk mencegah diare jika dilakukan secara tepat pada saat-saat yang tepat. Sebuah inisiatif CTPS menggalakkan kerjasama dan menggabungkan berbagai sumber daya dan kemampuan dari berbagai sektor termasuk pemerintah, produsen sabun, lembaga swadaya masyarakat, serta media. Mereka kemudian membentuk Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Cuci Tangan Pakai Sabun (KPS-CTPS).

Kampanye nasional CTPS di Indonesia mengadopsi mekanisme KPS-CTPS untuk mempercepat penyampaian pesan kepada seluruh masyarakat. Departemen Kesehatan RI sebagai pemimpin dalam kemitraan ini senantiasa menggalakkan partisipasi berbagai pihak untuk mendukung kampanye. Disadari, walaupun intervensi pencegahan ini telah dilaksanakan oleh berbagai pihak sejak lama, namun praktek CTPS masyarakat dalam kehidupan sehari-hari masih rendah.

Penyampaian pesan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan masyarakat secara aktif sehingga tumbuh keinginan untuk mempraktekkan perilaku ini dari diri mereka sendiri.

Artikel ini akan memperkenalkan kegiatan CTPS yang bergaung global untuk memicu kesadaran masyarakat

lebih tinggi lagi, serta dukungan dari pemerintah untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan penerapan di masyarakat. Hal dimaksud adalah Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia (HCTPS) serta pelaksanaannya di Indonesia.

Tujuan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia

Rapat Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tahun 2008 sebagai Tahun Sanitasi Internasional dan menyerukan perlunya upaya meningkatkan praktik higienitas dan sanitasi di seluruh dunia. Kegiatan HCTPS merupakan perwujudan dari seruan tersebut dan ditetapkan pelaksanaannya secara serentak pada 15 Oktober 2008.

Pada tingkat global, HCTPS ini diperkenalkan oleh The Public-Private Partnership for Handwashing with Soap (PPP-HWWS), suatu koalisi kemitraan internasional yang terdiri dari UNICEF, USAID, WSSCC, LSTM, Centers for Disease Control and Prevention, JHU, Water and Sanitation Program, Care International, Unilever and Procter & Gamble.

Kegiatan ini akan menjadi kegiatan tahunan dan melibatkan banyak negara. Tahun ini merupakan pelaksanaan yang pertama kali dan akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari dua puluh negara di dunia yang akan melakukan cuci tangan pakai sabun secara serentak pada 15 Oktober mendatang. Negara-negara tersebut adalah China, Indonesia, India, Bangladesh, Vietnam, Pakistan, dan Filipina. Di Asia; Madagaskar, Afrika Selatan, Uganda, Kenya, Mesir, Mali dan Etiopia. Di Afrika; Kolombia, Peru, Nikaragua, dan Mexico di Amerika Latin, serta negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris.

Untuk jangka panjang, HCTPS diharapkan mendukung peningkatan kesadaran akan pentingnya perilaku CTPS, khususnya kesadaran akan segi positif dan manfaat dari CTPS. Selain itu diharapkan dapat mendorong dan menciptakan advokasi dikalangan pembuat kebijakan, serta dapat menggalang

komitmen dari berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang memungkinkan peningkatan praktek CTPS.

Pelaksanaan HCTPS yang pertama kali pada 2008 ini diharapkan dapat menciptakan platform pembentukan koalisi HCTPS yang bekerjasama untuk pelaksanaan HCTPS setiap tahunnya. Juga mendukung upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perilaku CTPS secara terus-menerus pada tingkat lokal maupun global.

Pelaksanaan HCTPS inipun diharapkan dapat menginspirasi tumbuhnya komitmen berbagai negara terhadap program CTPS. Singkatnya, dua poin utama yang dituju oleh HCTPS adalah peningkatan kesadaran berperilaku (*awareness raising*) dan perlunya advokasi (*advocacy*).

Fokus HCTPS tahun 2008 ini adalah anak sekolah sebagai "agen perubahan" namun tidak berarti pelaksanaan hanya melibatkan anak sekolah saja. Tahun ini HCTPS mengedepankan simbolisasi bersatunya seluruh komponen keluarga, rumah dan masyarakat dalam merayakan komitmen untuk perubahan yang lebih baik dalam berperilaku sehat melalui CTPS.

Untuk menggugah keterlibatan berbagai lapisan masyarakat dan pemerintah, HCTPS 2008 memberikan tantangan berupa pemecahan rekor "jumlah terbe-

sar anak sekolah mencuci tangan pakai sabun pada hari yang sama pada 20 negara yang berbeda". Tantangan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman kegiatan kunci bagi seluruh negara yang berpartisipasi, menciptakan kreatifitas, memacu kompetisi positif antarnegara peserta, serta membuat HCTPS sebuah hari yang menyenangkan.

Kelompok sasaran utama dari HCTPS kali ini adalah wartawan/media, komunitas pendidikan; guru, pejabat dari departemen pendidikan, pengambil keputusan, serta anak sekolah. Selain itu, komponen masyarakat lainnya seperti kalangan akademis, tokoh agama, selebritis, kelompok wanita, merupakan kelompok yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan lebih lanjut.

Partisipasi Pemerintah dan Pemangku Kepentingan Lainnya

Setiap daerah dapat memilih mitra yang akan diajak bekerjasama dalam menyukseskan HCTPS ini, sesuai dengan kebijakan wilayahnya. Di tingkat nasional, Departemen Kesehatan RI bertindak melalui Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Cuci Tangan Pakai Sabun untuk:

- Mengidentifikasi pemangku kepentingan utama dari organisasi terkait kesehatan anak dan program CTPS, baik dari pemerintah maupun swasta yang menunjukkan minat untuk bergabung dalam HCTPS.



Secara bersama-sama, siswa-siswi sekolah dasar mempraktikkan CTPS untuk membiasakan hidup bersih dan sehat. Foto Bowo Leksono

- Mengundang para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan HCTPS dan membangun kesepakatan kerjasama dalam mendukung HCTPS.
- Bekerjasama dengan para mitra tersebut untuk menentukan kegiatan/tantangan khusus, kelompok sasaran yang dituju serta lokasi untuk ditunjukkan pada HCTPS 2008.
- Membagi informasi dengan pengelola HCTPS pada tingkat global mengenai HCTPS yang dilakukan di Indonesia.

Pemerintah daerah provinsi dan kota/kabupaten diharapkan dapat melakukan duplikasi di daerah masing-masing. Untuk kepentingan kompilasi data nasional HCTPS dan peningkatan pelaksanaan pada tahun-tahun mendatang, maka diharapkan agenda dan informasi tentang kegiatan yang dilakukan di tingkat daerah dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (DitJen PP-PL). Penyampaian informasi dapat ditujukan kepada Direktur Penyehatan Lingkungan Wan Alkadri, di Jalan Percetakan Negara 29, Salemba, Jakarta Pusat 10560.

Lokasi Pelaksanaan HCTPS 2008

Pelaksanaan kegiatan di tingkat daerah dapat dilakukan di tempat-tempat umum terbuka yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat terutama anak sekolah. Lapangan kabupaten/kota, alun-alun, lapangan di sekitar lingkungan sekolah, bumi perkemahan, halaman pesantren/masjid raya, merupakan contoh tempat yang dapat dijadikan lokasi peluncuran HCTPS.

Oleh karena pelaksanaan HCTPS jatuh pada hari sekolah (Rabu, 15 Oktober), diharapkan pelaksanaan dapat melibatkan sebanyak mungkin komunitas sekolah seperti anak didik, guru, orang tua murid, dan organisasi orang tua murid, ustad dan kyai, serta para pakar pendidikan jika memungkinkan. Hal ini sebaiknya telah dikomunikasikan

dengan baik sebelumnya dengan pihak sekolah melalui bantuan Dinas Pendidikan setempat.

Pilihan Kegiatan pada HCTPS 2008

1. Peluncuran HCTPS

Peluncuran HCTPS akan dilakukan secara serentak di minimal enam provinsi dimaksud di atas dan akan dipimpin dari Jakarta. Oleh karena itu koordinasi sangat diperlukan antara panitia pusat dan panitia di daerah. Perincian kegiatan ini akan dilakukan saat daerah mengkonfirmasi keikutsertaannya.

2. Seminar sehari/setengah hari mengenai CTPS diikuti dengan diskusi mengenai contoh-contoh kasus yang baik dan kasus yang buruk dengan fokus pada sekolah.

3. Kegiatan yang menargetkan media

Dengan menghadirkan pembicara yang dikenal baik masyarakat setempat, selebriti, pejabat pemerintah, atau berupa kunjungan ke sekolah yang memiliki keunggulan dari segi infrastruktur dan praktik CTPS yang bernilai untuk diberitakan oleh media.

4. Penetapan Duta Cuci Tangan

Dengan menunjuk seseorang yang dikenal baik oleh masyarakat dan dapat menjadi idola anak untuk ditiru dalam membiasakan praktik CTPS. Bisa selebriti, atlet, bintang film, tokoh politik, dan sebagainya.

5. Membentuk Panitia Tahunan HCTPS

Memudahkan pelaksanaan pengkoordinasian dan kesinambungan pada tahun berikutnya.

6. Pertandingan berbasis sekolah

Beraneka jenis kegiatan yang digemari anak-anak seperti lomba lagu jingle CTPS, lomba menulis surat yang menginspirasi kepatuhan untuk praktik CTPS, lomba puisi tentang CTPS.

7. Lomba merancang sarana CTPS

Dapat dibuat berbagai kategori misalnya anak sekolah dari STM, kategori insinyur, kategori seni untuk anak sekolah jurusan seni budaya, dan kategori guru.

8. Kampanye melalui radio

Wawancara selebriti di radio, debat anak sekolah di radio, atau wawancara guru dan pemerintah setempat.

9. Lomba foto

Fokus pada anak sekolah dan sekolah

untuk foto anak sedang melakukan CTPS
10. Libatkan pihak swasta

Untuk mendukung HCTPS, dapat melibatkan perusahaan sabun, hotel, restoran, rumah makan, rumah sakit, dan perusahaan lain yang memiliki komitmen pada kesehatan anak.

11. Identifikasi adanya kemungkinan pembuatan perangko khusus HCTPS 2008

12. Partisipasi pada Penganugerahan WASH Media Award

Penghargaan yang diberikan pada media di negara berkembang yang berjasa mengangkat masalah hygiene dan sanitasi sebagai hal yang patut dibicarakan pada media mereka.

13. Bekerjasama dengan perusahaan sabun

Membuat pertanyaan pada sampul sabun yang dapat dijawab dan dikirim untuk memenangkan hadiah dari Panitia. Hadiah sebaiknya terkait dengan upaya membiasakan praktik CTPS bagi anak sekolah.

Singkatnya, setiap negara peserta HCTPS diberi wewenang untuk menentukan sendiri jumlah sekolah atau anak sekolah yang akan diikutsertakan. Pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan lainnya yang berminat dapat bekerjasama dengan program-program kesehatan lingkungan binaan Ditjen PP-PL seperti WSSLIC, PAMSIMAS, CWSH, kerjasama dengan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Untuk peluang dukungan sponsor maupun kerjasama lainnya, silakan berkoordinasi dengan Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk Cuci Tangan Pakai Sabun melalui Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Sub Direktorat Penyehatan Air. Email dapat pula dikirimkan ke adelinahutauruk@yahoo.com atau irafiqah@worldbank.org, dan telepon ke (021) 424 7608 ext 208 atau Hp 0816.936.086.

Mari bergabung bersama kami untuk menyelamatkan hidup balita Indonesia. ■

I Rafiqah
Koordinator KPS-CTPS
Ditjen PP-PL Departemen Kesehatan RI

Kerjasama Pemerintah dan Swasta Bidang Air Minum: Mengamati Kasus Jakarta dalam Konteks Dinamika KPS

Oleh: Alizar Anwar

Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS) yang berlangsung antara Pemda DKI Jakarta, yang diwakili PAM Jaya, dan Palyja/Aetra saat ini merupakan produk dari gagasan yang berkembang secara global pada tahun 1990-an dimana dipercaya bahwa pengelolaan air minum oleh swasta lebih efisien dibanding pengelolaan oleh perusahaan milik daerah. Keterlibatan swasta ini kemudian merambah Indonesia sehingga menjadi kebijakan Pemerintah dalam pengembangan pelayanan air minum, satu dan lain hal karena tidak ada lagi tersedia pinjaman lunak untuk pembangunan air minum dari Bank Dunia dan ADB.

Selain Jakarta, pola kerjasama ini juga ada di wilayah lain, antara lain pada perusahaan air minum di Batam, Bali, Tangerang dan Medan. Kontrak kerjasama ada yang berbentuk konsesi seperti Batam dan Jakarta, ada pula BOT seperti di Medan dan Tangerang. Dengan PDAM lain, banyak pula berlangsung kerjasama dengan pola yang sama atau berbeda.

Pada awalnya, pihak swasta yang melakukan kerjasama adalah perusahaan yang bergerak disektor air minum dan termasuk dalam kategori yang disebut sebagai *Trans National Corporation* (TNC). Mereka beroperasi di banyak negara. *Suez Environment* yang mendapat konsesi di wilayah barat Jakarta, misalnya sudah terkenal lebih dari satu abad sebagai operator air minum sehingga memiliki pengalaman yang diharapkan bisa mendongkrak kinerja pelayanan air minum di bagian barat Jakarta.

Konsesi wilayah timur Jakarta semula juga dipegang *Thames Water Overseas Limited*, tetapi kemudian pada



Sumber air baku belum secara maksimal dimanfaatkan oleh PDAM.
Foto: Bowo Leksono

2006 diakuisisi oleh Recapital/Acuatico, suatu perusahaan berbasis di Singapura, pendatang baru di bidang air minum. Proses akuisisi dimediasi oleh Goldman Sachs, konsultan kondang berskala internasional.

Peristiwa dimana pendatang baru mengambil alih perusahaan air minum menggejala di dunia pada awal 2000-an dan terkenal dengan istilah *Merger, Buy out and Acquisition* atau MBA. Ini merupakan tren yang boleh dikata merupakan anti klimaks dari apa yang menjadi dasar pemikiran KPS pada 1990-an, yaitu swasta lebih efisien daripada PDAM.

Diakuisisinya TPJ oleh *Acuatico* yang notabene pendatang baru dibidang air minum, artinya belum punya *track record* sebagai operator air minum yang handal, membalikkan tesis yang menyatakan bahwa Operator Air Minum Swasta

lebih efisien. Kejadian ini bukan hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di luar negeri. Pada saat proses akuisisi TPJ berlangsung ditahun 2006 itu kabarnya *Macquarie Group*, perusahaan finansial berbasis di Sydney, Australia dalam proses membeli *RWE Thames* yang mengelola air minum dan air limbah di beberapa kota di Inggris.

RWE, perusahaan Jerman dibidang energi yang membeli *Thames* untuk ikut menyemarakkan peran swasta dalam air minum berubah pikiran dengan melepas bisnis air minum dan kembali berkonsentrasi ke kompetensi intinya yaitu energi. Hal ini dilakukan tentu dengan pertimbangan efisiensi.

Perubahan kepemilikan ini sudah pasti akan membawa dampak ikutan atas keberadaan pola kerjasama yang ada, karena perubahan atau dinamika yang

terjadi dimana semula pemegang konsesi adalah Operator Air Minum bertaraf internasional, sekarang beralih kepada perusahaan yang baru dan masih muda dalam pengalaman sebagai operator air minum.

Ada pergeseran dalam kompetensi inti operator, dari yang mempunyai kompetensi inti bidang air minum ke yang tidak memunyainya. Dan ini pasti ada pengaruhnya terhadap kesinambungan dan keberlanjutan dalam pengembangan pelayanan air minum kepada masyarakat. Guna mengantisipasi dinamika perubahan ini Pemda perlu jeli melihat peluang-peluang untuk memperbaiki *terms* dalam kontrak sekarang ini.

Beberapa pemikiran dapat disebutkan sebagai berikut:

- Perlu pengkajian apakah model kerjasama konsesi masih sesuai dengan perkembangan saat ini mengingat kontrak hanya mengatur masalah pokok tidak sampai detail, sehingga dalam perjalanannya terasa kurang adil, risiko tidak berimbang dan lain sebagainya.
- Di Prancis ada jenis kontrak yang disebut *administrative contract*, di mana otoritas Pemda memiliki kewenangan untuk merubah kontrak sekaligus membatasi ruang gerak swasta untuk renegotiasi mendapatkan harga tinggi.
- Terjadi pergeseran ke kerjasama yang bersifat mutualisasi, di mana diadakan pemisahan antara pengelolaan aset dan pengoperasian aset; aset dikelola oleh *asset holder* dan swasta hanya mengoperasikannya saja. Perkembangan ke arah ini terjadi di Inggris.

Malah dalam kegiatan yang bersifat pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan (*fly over, underpass* dll) ada jenis kerjasama yang disebut *contract alliancing*. Tidak seperti biasanya yang melalui proses tender, beberapa perusahaan terdiri dari konsultan, investor dan kontraktor bersepakat untuk mengembangkan suatu proyek infrastruktur dengan nilai proyek tertentu. Jika ternyata dalam proses pemba-

ngunannya terdapat efisiensi dalam penggunaan dana maka kelebihan dana itu menjadi keuntungan yang dibagi secara adil bersama sesuai porsi *share* masing-masing entitas perusahaan.

Pelajaran apa yang dapat kita petik dari semua ini? Ada banyak jalan menuju Roma. Pemerintah hingga saat ini tidak henti-hentinya mempromosikan agar pihak swasta bersedia melakukan investasi di bidang air minum untuk menunjang pencapaian MDGs, terutama untuk wilayah perkotaan. Dari uraian singkat di atas, kiranya Bappenas dan Departemen Pekerjaan Umum seyogyanya melakukan pengkajian lebih jauh berkenaan dengan kecenderungan yang terjadi seperti diuraikan di atas guna mencari pola ker-

jasama yang lebih pas di masa yang akan datang, terutama perlu pengkajian dalam hal proses pemilihan operator dan bentuk kerjasama.

Khusus mengenai kasus Jakarta, perlu juga dikaji, dengan beralihnya kepemilikan perusahaan dari yang memiliki kompetensi inti bidang air minum ke yang tidak memilikinya. Dapatkah pola kerjasama sebagaimana diatur dalam kontrak konsesi yang ada masih bisa mengakomodasi pemenuhan kinerja Operator Air Minum sebagaimana harapan pada saat kerjasama ini dicetuskan? Jika tidak, bagaimana? ■

Penulis adalah pengamat masalah air minum dan juga sebagai *Coordinator the Water Dialogues Indonesia* (www.waterdialogues.com). Alamat email azr@cbn.net.id



PAM Jaya dalam suatu acara launching buku di Jakarta. Foto Bowo Leksono

BENTUK KERJASAMA PEMERINTAH-SWASTA

Secara garis besar, bentuk keterlibatan swasta dalam air minum dapat diklasifikasi sebagai berikut (dari yang lebih rendah keterlibatannya hingga lebih tinggi):

- Kontrak pelayanan: swasta melakukan pekerjaan berjangka waktu singkat 1 hingga 2 tahun untuk kepentingan Operator Air Minum.
- Kontrak manajemen: swasta melakukan pekerjaan berjangka waktu 3 hingga 5 tahun.
- BOT: swasta melakukan investasi untuk bagian tertentu dari proses

pengelolaan air minum (kebanyakan pada bagian produksi air minum) dan mengelolanya selama 10-15 tahun, output-nya dijual kepada Operator Air Minum.

- Konsesi: Operator Air Minum mengelola aset dan melakukan investasi untuk melayani pelanggan air minum, termasuk penagihan rekening air untuk jangka 25 - 30 tahun; dan,
- Swastanisasi penuh (*divestiture*): semua aset milik swasta dan biasanya dijual-belikan di bursa saham. ■

Hidayat Penghasil Energi dari Sampah

Manusia hidup tidak mungkin terlepas dari masalah. Untuk itulah manusia hidup. Semakin manusia kreatif, semakin ia mampu menghadapi masalah hidup. Seberat apapun masalah, akan menemukan solusinya.

Salah satu masalah bagi rakyat Indonesia adalah ketika pemerintah mengumumkan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM). Sepertinya, ini menjadi masalah bagi seluruh rakyat Indonesia, tak terkecuali kaum berada.

Di kalangan kaum miskin, kenaikan minyak tanah terasa menjerat leher karena jalannya dapur mereka menjadi tersendat. Dari sinilah diperlukan kreativitas

untuk menghasilkan inovasi bagaimana mengakali kenaikan harga BBM.

Di pinggiran Jakarta, tepatnya di daerah Pondok Gede, Bekasi, ada seseorang yang kreatif dalam menghasilkan bermacam energi. Ia adalah Hidayat yang mampu berinovasi dari materi sampah.

Ternyata yang dilakukan Hidayat tak sekedar hobi dalam mengelola sampah. Ia terang-terangan mengelola sampah sebagai bisnis untuk menopang hidup. Di bawah naungan PT Mitratani Mandiri Perdana (Mittran), Hidayat yang menjabat sebagai direktur, saat ini memiliki sekitar 60 karyawan yang sebagian anak putus sekolah dan 10 staf.

Briket untuk Menggandeng BGG

Orang mengenal pengelolaan sampah hanya sebatas menghasilkan kompos. Di tangan Hidayat, sampah mampu menghasilkan bermacam bahan bakar seperti biomassa dan briket untuk sampah organik.

Untuk sampah plastik, PT Mittran sudah melakukan daur ulang (*plastic recycle*) dengan jalan pemisahan manual untuk kemudian dipres dan dipasarkan. Untuk daur ulang plastik ini merupakan kegiatan lama, bahkan Hidayat sendiri sudah lebih dari 15 tahun memproduksi mesin pengolah sampah, seperti mesin pencacah plastik atau pengepres sampah.

Briket adalah produk unggulan PT Mittran saat ini. Ia mampu menggantikan batu bara bahkan minyak tanah dengan harga yang lebih murah hanya Rp 750 per kilogram. "Karena itu, briket dihasilkan untuk menggandeng gas," tutur Hidayat kepada **Percik** saat ditemui di bengkel kerjanya.

Meski demikian, Hidayat mengakui bahan bakar briket masih memiliki kelemahan disamping lebih rumit juga api yang dihasilkan berjelaga. "Kelemahan ini yang sedang kita pelajari. Tapi paling tidak, briket ini bisa menjadi alternatif bahan bakar keluarga," kata alumni Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini.

Biomassa

Setiap hari, PT Mittran menampung sekitar 10 ton sampah dari lingkungan sekitar. Di tempat pengolahan seluas satu hektar, sampah diproses di mesin sortasi. Sampah organik menjadi briket dan kompos sedangkan anorganik mengalami proses lagi yaitu melewati mesin pencah dan pencuci.

Hasil dari sampah anorganik ada dua opsi. Sampah plastik yang kondisinya masih bagus akan dijual untuk didaur ulang oleh pihak lain, sementara sampah plastik sisanya akan dipadatkan untuk dijadikan biomassa.

Hidayat mengakui mampu memasok biomassa ke beberapa perusahaan besar antara lain pabrik semen PT Holcim Indonesia Tbk dan PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. "Untuk PT Indocement saja membutuhkan 10.000 ton biomassa per bulan, kami baru bisa menghasilkan 300 ton," ujar Pria kelahiran Magelang, 26 Agustus 1963.

Saat ini, lanjut Hidayat, pihaknya tengah menjajaki kerja sama dengan Jepang untuk teknologi pengubah plastik menjadi solar dan pengekstraksi gas metan yang terkandung dalam sampah untuk dijadikan tenaga listrik. "Dengan dukungan regulasi berkaitan dengan pengelolaan sampah, saya yakin lima tahun mendatang semua pihak akan mengolah sampah," tegasnya. ■ Bowo Leksono



Hidayat di depan tungku api dengan bahan bakar briket ciptaannya. Foto Bowo Leksono

Peresmian Toilet Sekolah di Tangerang



Ketua SIKIB Murniati Widodo AS memukul gong menandai peresmian toilet sekolah di SD Negeri I Sepatan, Tangerang. Foto Bowo Leksono

Nevy bolak-balik ke jamban rumahnya saat bermain congklak dengan teman-temannya. Ternyata ia terkena diare akibat jajan sembarangan karena ternyata makanan yang dimakannya sudah dihindangi banyak lalat.

Di kampung Nevy, kebiasaan *bolbon* (*be'ol* di kebon) masih dianggap lumrah. Laki-laki maupun perempuan, anak-anak dan orang dewasa, tanpa rasa malu, membuang hajat setiap hari di kebon sendiri maupun di kebon orang. Tanpa menyadari akibat dari kebiasaan yang kurang baik itu terhadap kesehatan.

Demikian sebuah drama singkat yang ditampilkan murid-murid Sekolah Dasar Sepatan I Tangerang di depan para istri kabinet dan Bupati Tangerang Ismet Iskandar dan istri, serta tamu undangan lain. Hari itu, Selasa, 26 Agustus 2008,

Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) meresmikan lima toilet percontohan di lima SD Negeri di Tangerang, Banten, yang dipusatkan di SD Negeri Sepatan I.

Kelima SD di Tangerang yang mendapat bantuan pembangunan toilet dalam rangka peningkatan fasilitas sanitasi sekolah dan lingkungan, antara lain SD Negeri Sepatan I, IV, dan V, serta SD Negeri Kedaung I dan III.

Membutuhkan Pemeliharaan

Sudah hampir empat bulan sejak peletakan batu pertama pada 7 Mei 2008 (*Percik* edisi Agustus 2008), jamban sekolah yang merupakan hasil kerjasama SIKIB dan Departemen Pekerjaan Umum ini sudah berdiri di tengah-tengah lima sekolah percontohan.

Ketua SIKIB Murniati Widodo AS

mengenang saat meletakkan batu pertama pembangunan toilet sekolah itu. Saat itu, ia mengamati banyak murid yang memotret wakil bupatinya (Rano Karno). "Kini saatnya anak-anak memotret toilet supaya bersama-sama menjaga kebersihan dan kesehatannya," ungkapnya.

Murniati juga merasa bangga kepada komite sekolah yang sanggup untuk menanggung biaya pemeliharaan toilet. "Contoh seperti ini diharapkan bisa ditiru sekolah-sekolah lain," katanya.

Disamping menyumbang toilet, pada kesempatan peresmian itu, SIKIB juga menyumbang puluhan pohon buah untuk ditanam dan dirawat di lingkungan sekolah dan ratusan buku khusus sumbangan dari Ani Soesilo Bambang Yudhoyono.

Bupati Tangerang Ismet Iskandar dalam sambutan berkesempatan mengucapkan terima kasih atas bantuan dan sepakat bahwa bantuan itu tidak akan bermakna bila tidak dipergunakan dan dipelihara dengan baik. "Kami berharap, toilet di sekolah ini tidak hanya menjadi percontohan dari sisi keberadaannya, tapi juga dari fungsi dan pemeliharaannya," ujarnya.

Teknologi Biofilter

Direktur Kesehatan Lingkungan Pemukiman Dirjen Cipta Karya Departemen PU Susmono mengatakan pembangunan toilet sekolah ini menggunakan tanki septik dengan teknologi biofilter, yaitu dengan memanfaatkan bambu, batu apung, dan batok kelapa. "Bahan-bahan itu mempercepat proses penguasaan kotoran yang dilakukan oleh bakteri," katanya.

Penggunaan teknologi biofilter ini, menurut Susmono, menghasilkan kualitas air hasil penguraian yang lebih baik. "Bakteri dalam memakan kotoran akan menghasilkan mineral dan ini jauh lebih aman untuk lingkungan," tuturnya.

Setiap sekolah, toilet dibangun dengan dua tanki septik dengan pertimbangan banyaknya pemakai toilet. Sementara sumber air menggunakan sumur bor. "Total setiap unit toilet menghabiskan sekitar Rp 140 juta sudah dengan biaya edukasinya," ujar Susmono. ■ BW

Djamaludin Suryohadikusumo Membuat Kompos dengan Kasih Sayang

Berawal dari kesenangan yang sama terhadap tanaman, sepasang suami-istri, Djamaludin dan Sri Murniati Djamaludin membangun kawasan Perumahan Bumi Karang Indah Lebak Bulus menjadi hijau dan sejuk. Halaman rumah mereka yang berada di Blok C, penuh dengan tanaman bunga dan bermacam sayuran. Pun yang terlihat di halaman rumah para tetangga.

Djamaludin Suryohadikusumo nama pria itu, yang tentu sudah tidak begitu asing karena dia pernah menjabat sebagai menteri kehutanan pada 1993-1998. Sementara istrinya sempat berkarir di Departemen Kesehatan. Setelah masa pensiun, Djamaludin tetap aktif di berbagai lembaga yang peduli pada lingkungan. Kemudian ia memboyong keluarganya ke komplek perumahan itu pada tahun 2000.

"Setiap kali kami jalan-jalan ke luar kota untuk menikmati keindahan, pasti yang dicari bibit tanaman untuk kemudian ditanam di halaman rumah," jelas Djamaludin yang didampingi istri, mengawali perbincangan dengan Percik di Kebun Karinda tak jauh dari rumahnya.

Kebun Pembibitan dan Pengomposan

Sebelum dibangun Kebun Pembibitan dan Pengomposan Karinda (Karang Indah) pada tahun 2006, Djamaludin dengan dibantu sang istri melakukan pembibitan dan praktik pengomposan di rumahnya.

Di rumah yang asri itulah, Djamaludin menerima siapa saja yang mau belajar membuat kompos atas nama Komite Lingkungan. Namun karena permintaan pelatihan yang semakin banyak,

diperlukan tempat khusus untuk itu.

"Secara kebetulan, pengembang perumahan memberikan lahan yang tidak terpakai untuk dijadikan pusat pelatihan," ungkap Djamaludin. Dengan lokasi yang lebih memadai, Djamaludin dan istri lebih leluasa dalam memberi bekal pelatihan pengomposan.



Djamaluddin dan istri. Foto Bowo Leksono

Pelatihan Membuat Kompos

Jangan pernah membayangkan bahwa pusat pelatihan di Kebun Karinda itu penuh dengan tumpukan sampah yang kotor dan bau. Wajah bersih dan indah sudah terlihat dari bagian depan kebun.

Berbagai tanaman bunga dan sayuran seperti cabe dan bayam menghiasi bagian kanan dan kiri kebun seluas 300 meter persegi. Di bagian sudut kanan, tempat untuk praktik pengomposan. Beberapa tempat pembuatan kompos terbuat dari bahan-bahan murah dan tak terpakai seperti batu bata, paving blok, kayu, dan bambu.

"Tidak usah kita berniat membuat

kompos dengan tempat dari barang yang mahal. Cukup dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai," ujar Djamaludin. Demikian pula dengan bahan untuk membuat kompos. "Kita bisa memulai membuat kompos dengan sampah organik dari dapur atau dari sampah sekeliling rumah kita," kata Niniek, panggilan Sri Murniati menimpali.

Sementara di bagian belakang kebun, terdapat bangunan sederhana dan cukup luas yang dipergunakan sebagai tempat pelatihan pengomposan. Kebun Karinda membuka pelatihan cuma-cuma setiap Selasa dan Sabtu. Sekali pelatihan dengan peserta antara 10 hingga 45 orang.

"Peserta pelatihan banyak datang dari wilayah Jakarta dan sekitarnya. Ada juga yang dari Cirebon. Sebagian besar dari mereka ibu-ibu PKK, ibu-ibu arisan, ibu-ibu pengajian, dan ibu-ibu kompleks. Ada juga anak-anak sekolah," tutur ibu enam anak dan nenek lima cucu ini.

Banyak orang beranggapan, tidak gampang dalam mengolah sampah menjadi kompos. Namun tidak demikian dengan Djamaludin dan istri. Ketua dan Wakil Ketua Komite Lingkungan ini memperlakukan kompos dengan penuh kasih sayang dan membuat kompos dengan tujuan untuk mengurangi sampah.

Menurut Djamaludin, pengomposan itu seperti halnya manusia atau makhluk hidup lainnya. "Dalam proses pengomposan itu terdapat bakteri yang harus dipelihara. Mereka juga butuh makan, minum dan udara untuk bernapas," ujar pria yang mengaku belajar pengomposan dari Ibu Harini Bambang Wahono dari Banjarsari, Cilandak, Jakarta Selatan. ■

Bowo Leksono



Masyarakat Desa Sawe terpicu dengan mulai membangun jamban. Foto Istimewa

Desa Sawe Kabupaten Dompu Menjawab Tantangan Menteri Kesehatan

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari, Sp.J(PK) membuka Konferensi Nasional Pengelolaan Air Minum Rumah Tangga (Konas PAM-RT) dan meluncurkan 10.000 desa kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), 21 Agustus 2008, di Jakarta. Lima hari berselang, tepatnya 26 Agustus 2008, masyarakat Desa Sawe, yang berada di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah menjawab tantangan tersebut dengan berani mendeklarasikan desanya yang telah terbebas dari kebiasaan Buang Air Besar (BAB) Sembarangan.

Deklarasi yang dilakukan 34 perwakilan masyarakat Desa Sawe ini diresmikan Bupati Dompu, Syaifurrahman Salman, melalui penanda-

tanganan papan deklarasi desa terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan. Kegiatan deklarasi yang merupakan cetusan hati dan keinginan dari masyarakat Desa Sawe ini bertujuan menyampaikan kepada khalayak bahwa masyarakat Desa Sawe telah terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan. Kebiasaan yang selama ini merendahkan harga diri dan mengurangi kekhusuan masyarakat Desa Sawe yang seluruhnya beragama Islam dalam beribadah.

Rendahnya Kesadaran Sanitasi

Berdasarkan informasi dari pemerintah kecamatan setempat yang disampaikan melalui laporan Camat Hu'u Imran M. Hasan, sejak tahun 1990-an, warga Desa Sawe yang dulu masih bergabung dengan Desa Rasabou, sudah

banyak menerima program sanitasi dari pihak luar, baik dari pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat seperti program SWS tahun 1990-an, Dinas Sosial tahun 2001, WSLIC tahun 2005-2006, program MCK umum dan TSC Plan Indonesia tahun 2005-2007 dan sebagainya. Program-program tersebut menawarkan berbagai bentuk bantuan, mulai dari pembangunan jamban hingga selesai sampai hanya pemberian subsidi kloset dan semen saja.

Namun sangat disayangkan ternyata pemanfaatannya masih kurang maksimal karena banyak jamban yang tidak jadi dan bahkan ada jamban sudah terbangun tapi tidak digunakan. Hanya sedikit masyarakat Desa Sawe (dibawah 50 persen) yang sudah menggunakan jamban, sedangkan sisanya masih terbiasa BAB sembarangan di sawah, bukit, parit, sungai, lapangan, dan halaman rumah.

Bahkan mereka menyebutnya WC helikopter karena ketika ada orang datang dari arah depan, maka untuk menghindari pandangan mereka akan berputar ke arah yang lain. Begitu seterusnya jika ada orang hingga mereka berputar posisi seperti baling-baling helikopter.

Di sejumlah pinggiran sungai yang melintasi wilayah Desa Sawe, dulunya merupakan daerah yang tidak ramah bagi anak-anak karena banyak ditemukan kotoran manusia sehingga menimbulkan bau yang sangat mengganggu. Kondisi ini juga berkaitan dengan data Puskesmas kecamatan yang menunjukkan Desa Sawe sebagai salah satu daerah di Kecamatan Hu'u yang berkategori rawan diare dan kolera. Serta tidak sedikit para orang tua di Desa Sawe menceritakan bahwa anak mereka sering terserang mencret-mencret dan memiliki perut yang buncit namun berbadan kurus akibat terkena cacingan.

Pemicuan yang Membawa Hasil

Dengan adanya kegiatan Tim Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (CLTS) yang menamakan dirinya Tim Pemberantas Kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan Kecamatan Hu'u yang bekerja sama de-

ngan kepala desa, BPD, bidan desa, Babinsa dan tokoh-tokoh agama, masyarakat Desa Sawe yang tersebar di tiga dusun yakni Lodo, Sawe dan Samakarya dipicu kesadarannya akan akibat buruk dari kebiasaan BAB sembarangan baik dari rasa malunya, rasa jijik, harga diri, segi agama dan juga kesehatan.

Proses pemicuan ini cukup berhasil menimbulkan kesadaran masyarakat, hal ini terlihat pada perubahan kebiasaan masyarakat yang sudah tidak lagi membuang air besar di sembarangan tempat. Sejumlah jamban yang tidak dipakai diperbaiki dan diaktifkan lagi penggunaannya. Jika ada yang belum mampu, maka untuk sementara menumpang dulu ke MCK umum atau jamban tetangga.

Bantuan kloset yang dulu menjadi pajangan di rumah, dimanfaatkan untuk membangun jamban dengan menggunakan bahan-bahan yang ada seperti kayu dan bambu. Bagi keluarga yang tidak mampu membeli kloset, mereka menggunakan teknik sendiri dari jerigen atau bambu yang dibuat sedemikian rupa menjadi pengganti kloset.

Hingga saat ini total sarana sanitasi yang dimiliki masyarakat Desa Sawe sebanyak 136 jamban permanen, 163 jamban semi permanen dan 6 MCK umum. Berdasar penggunaan tanki septik, hanya sebesar 10 persennya dan sisanya menggunakan lubang penampungan kotoran dengan model cubluk tunggal.

Bahkan upaya pemicuan kesadaran yang terus-menerus dilakukan tersebut, selain membawa dampak pada perubahan perilaku juga berhasil dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat desa yang baru seumur jagung ini (definitif April 2008).

Menurut data Puskesmas Kecamatan Hu'u, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya penderita diare jauh menurun bahkan dalam tiga bulan terakhir (April-Juli 2008) sudah tidak ada satupun dari 1.484 jiwa penduduk Desa Sawe yang menderita penyakit diare.

Di Balik Berhasilan

Upaya keberhasilan mendeklarasikan desa yang telah terbebas dari kebiasaan



Perwakilan masyarakat Desa Sawe, Kabupaten Dompu membaca Deklarasi Terbebas dari BAB Sembarangan. Foto Istimewa

BAB sembarangan ini tidak terlepas dari kerja keras para kampiun (*champion*). Mereka yang tidak berpikir bahwa perbuatan yang dilakukan hanyalah bagian dari pekerjaan untuk menafkahi keluarga. Namun, ada keinginan dan rasa tanggung jawab moral untuk mendorong kondisi ideal tanpa mengharap bayaran.

Upaya untuk mewujudkan keinginan memiliki desa yang bebas dari najis inilah yang dilakukan tanpa pamrih oleh Asikin (pegawai kecamatan), Imran (ustad), Haris (guru SD), Nasrun (kepala dusun), Haryono (mantri Puskesmas), dan Din (tokoh remaja). Mereka pada awalnya mengikuti pelatihan CLTS yang difasilitasi Plan Indonesia Program Unit Dompu dan Dinas Kesehatan Kabupaten.

Dari hasil praktek pemicuan langsung pada saat pelatihan yang dilakukan pada Februari 2008 lalu, mereka yang tergabung dalam Tim Pemberantasan Kebiasaan BAB Sembarangan ini berhasil memicu kesadaran 12 orang di salah satu dusun untuk siap membangun jamban sendiri tanpa bantuan pihak luar. Selanjutnya pemicuan dilanjutkan melalui kegiatan keagamaan, kegiatan sosial masyarakat, kunjungan dari rumah ke rumah, serta mendorong para keluarga yang telah terpicu dan telah membangun jamban sendiri untuk melakukan pemicuan kepada keluarga yang lain.

Teknik yang berbeda juga dilakukan para kampiun ini untuk memicu anak-

anak, yakni dengan mengajarkan lagu-lagu, yang pernah mereka dapatkan pada pelatihan CLTS, yang berhubungan dengan pesan tentang larangan BAB sembarangan, seperti "Cucakrowo" dan "Jablai Tai". Metode ini terbukti efektif dalam mengajak anak-anak untuk tidak BAB sembarangan lagi.

Tantangan Selanjutnya

Sebagai desa yang pertama di Kabupaten Dompu yang telah terbebas dari kebiasaan BAB sembarangan, masyarakat Desa Sawe berharap upayanya dapat diikuti desa-desa lain di kecamatan mereka khususnya dan Kabupaten Dompu pada umumnya. Oleh karena itu, sejumlah tukang yang ada di Desa Sawe mencoba menjadi pengrajin kloset dalam rangka menyediakan kloset yang murah dan mudah didapat bagi masyarakat yang telah terpicu kesadarannya.

Dengan meminjam cetakan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, mereka mencoba memproduksi kloset dengan menggunakan bahan semen dan pasir. Hasilnya cukup memuaskan, meski perlu sedikit sentuhan dengan amplas guna menghaluskan bagian permukaannya sebelum dicat. Mereka berharap selain membantu masyarakat lain juga dapat menyediakan kloset yang dihargai Rp 40 ribu hingga Rp 50 ribu untuk menambah pendapatan. ■

M. Afrianto Kurniawan

WES facilitator Plan Indonesia Dompu

Dari Konferensi "Sanitation Challenge": Kunci Keberlanjutan Sanitasi

Pada 19-21 Mei lalu berlangsung Konferensi "Sanitation Challenge" di Wageningen, Netherlands. Dua perwakilan Indonesia yakni Haryo Sasongko, Direktur Perkotaan, Ditjen Pembinaan Pembangunan Daerah DEPDA GRI, yang juga Ketua 2 Tim Teknis Pembangunan Sanitasi Nasional dan Syarif Puradimadja, Co-Team Manager ISSDP memperoleh kesempatan mengikuti konferensi tersebut. Banyak pelajaran yang dipetik dari konferensi tersebut.

Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat sering mengklaim keberhasilan keberlanjutan program air minum dan sanitasi mereka. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Tak jarang, banyak inisiatif air minum dan sanitasi di daerah perdesaan dan bagian perkotaan yang miskin di negara berkembang yang dianggap sukses pada awalnya, ternyata gagal karena berbagai macam alasan.

Penduduk lokal hanya beralih ke pemakaian metode pasokan air minum dan sanitasi tradisional yang menimbulkan banyak beban dan tak terlindungi. Selain itu, penduduk tetap tergantung pada bantuan dan keahlian dari luar karena kurangnya pemberdayaan lokal dan alih ketrampilan.

Dari fakta tersebut aspek keberlanjutan perlu didalami kembali. Ada dua komponen utama yang saat ini kurang diperhatikan dalam banyak proyek tapi penting bagi keberlanjutan, kedua komponen ini adalah perencanaan yang holistik serta operasi dan pemeliharaan (O dan P) yang efektif. Khusus yang terakhir perlu perhatian khusus, sebab hal ini sering terlupakan atau tidak ada dalam proyek. Padahal ini penting untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang. Berikut uraian ringkas dua komponen keberlanjutan tersebut.

Perencanaan Sanitasi dan Air yang Holistik

Perencanaan holistik di bidang sanitasi dan air minum mencakup beberapa

aspek penting, diantaranya:

1. Perencanaan holistik memerlukan pemahaman yang menyeluruh mengenai kebutuhan lokal, pencantuman mekanisme pembiayaan, dan hubungan dengan kebijakan dan usaha terkait di sektor air minum dan sanitasi.
2. Perencanaan holistik memakai pendekatan yang tanggap kebutuhan (*demand responsive approach*/DRA) yang memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang tepat mengenai opsi air minum dan sanitasi mereka. Pihak luar berfungsi sebagai fasilitator informasi, diskusi dan penyedia layanan.
3. Perencanaan yang holistik menganalisa hasil DRA dengan mekanisme pembiayaan yang ada, baik lokal dan dari luar, untuk mengembangkan rencana sanitasi dan air minum yang berlanjut.
4. Perencanaan holistik mempertimbangkan cara untuk mewujudkan kebijakan air minum dan sanitasi nasional melalui program dan proyek, dan berusaha mencantumkan sumber daya (orang, jaringan pasokan) juga pelajaran yang ditarik dari proyek yang sama di daerah sekitar untuk memaksimalkan efisiensi.

Operasi dan Pemeliharaan yang Efektif

Operasi dan pemeliharaan (O dan P) menentukan keberlanjutan sarana. Pro-

ses ini penting untuk memastikan bahwa investasi awal bisa terus memberikan manfaat bagi pengguna. Selain itu, proses ini harus mampu menjadikan sistem terus diperluas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berubah. Hal yang patut diperlukan dalam operasi dan pemeliharaan ini adalah:

1. O dan P yang efektif tergantung pada lingkungan yang mendukung dan memberdayakan, yang memungkinkan pengumpulan pendapatan, penyelesaian perbaikan secara tepat waktu, perencanaan perluasan di masa depan dan/atau penumbuhan-kembangan kebersihan dan sanitasi.
2. Melalui semangat keberlanjutan, proyek difokuskan pada perencanaan holistik dan pembiayaan lokal.
3. Operasi dan pengelolaan yang efektif sangat penting dalam inisiatif sanitasi jika dibandingkan dengan proyek air minum. Sebab O dan P dalam sanitasi memerlukan waktu yang lebih lama karena perlu usaha yang lebih besar bagi masyarakat untuk menerapkan perilaku dan teknologi baru.

Selama ini operasi dan pemeliharaan kurang mendapat perhatian. Ada dua alasan yang menyebabkannya yaitu:

1. LSM dan pemerintah terfokus pada berapa banyak jumlah pengguna yang terlayani pada tahap awal, bukan bagaimana masyarakat pengguna merawat sarana yang telah dibangun dengan tepat. Karena itu, proyek difokuskan pada infrastruktur dan hasil fisik, bukan pada kemampuan merawat dan mengelola sistem.
2. Jangka waktu proyek yang dikelola dan didanai pihak luar pada awalnya-biasanya 3-5 tahun-sering lebih pendek dibandingkan waktu yang diperlukan untuk membentuk struktur

tur O dan P yang kuat dan efektif.

Dalam kaitannya dengan inisiatif sanitasi, proses ini sebenarnya membutuhkan waktu lama jauh lebih panjang dari usia proyek dibandingkan proyek air minum. Masyarakat tidak mudah mengubah perilaku hidupnya dan meraih keberhasilan seperti diharapkan oleh proyek. Sebagai contoh, cuci tangan secara teratur merupakan salah satu perilaku yang terbukti sulit untuk diterapkan meskipun di negara maju dimana air bersih dan sabun siap tersedia.

Mengatasi Hambatan

Biasanya solusi untuk mewujudkan keberlanjutan menuntut kehadiran ahli teknik dan praktisi kesehatan masyarakat untuk mengurangi fokus pada konstruksi dan teknologi. Mereka tidak memfokuskan pada cara menyusun rencana yang efektif untuk merawat sistem. Padahal yang terakhir inilah yang lebih penting. Berikut beberapa langkah untuk mengatasi hambatan utama:

1) Meningkatkan Komunikasi

Perlu langkah-langkah untuk meningkatkan komunikasi antara warga dan penyedia bantuan dan untuk memungkinkan pemberdayaan. Kondisi sistem seperti saat ini dimana warga menunggu bantuan dari luar (pasif) tidak boleh terjadi. Karena itu beberapa hal yang bisa dilakukan antara lain:

a. Pentingnya ada posisi "Pewarta Air" (water messenger).

Dia bisa dirotasi setiap tahun. Orang yang menduduki posisi ini bertugas memberikan data terbaru bulanan mengenai situasi air bersih dan sanitasi kepada kantor air bersih dan sanitasi kabupaten. Pesan dapat dikirimkan dengan berbagai cara. Misalnya dititipkan pada angkutan yang ada, seperti distributor minuman yang menjangkau desa terpencil, atau melalui toko obat/apotik yang mendapat pasokan obat dari kabupaten.

b. Keberadaan kantor air minum dan sanitasi kabupaten yang berfungsi sebagai pusat informasi mengenai kebutuhan

dan inisiatif lokal untuk pemerintah dan pemangku kepentingan non-pemerintah di sektor air minum dan sanitasi. Di desa, pendapat, pemikiran dan ide untuk meningkatkan air minum/sanitasi dapat dikumpulkan oleh mereka yang bertugas mengelola sistem air minum dan sanitasi. Pengumpulan data dan masukan warga ini bisa dilakukan dalam pertemuan yang diselenggarakan di tempat peribadatan seperti masjid atau gereja atau di balai desa.

2) Meningkatkan Akses ke Modal dan Jaminan Keuangan

a. *Pentingnya upaya peningkatan akses ke dana* dengan memakai metode non-tradisional seperti pinjaman modal perdesaan. Skema keuangan mikro di Asia, seperti yang didokumentasikan oleh lembaga keuangan mikro, telah membuktikan bahwa warga miskin layak dipercaya dan rajin melunasi pinjaman kecilnya.

b. *Akses terhadap dana dapat dilakukan melalui kerjasama dengan proyek* yaitu dengan membentuk dana bergulir yang dikelola desa. Penerima pinjaman harus memberikan deposit awal dan setuju untuk menumbuhkembangkan jamban dan sanitasi. Imbalannya, penerima pinjaman diberi dana untuk membeli bahan-

memungkinkan keluarga yang berminat untuk membangun jamban. Atau, dana bergerak dapat dibentuk untuk melayani beberapa desa, dimana setiap tiga bulan pengelola dana mengunjungi desa-desa untuk menagih dan membagikan uang.

3) Operasi dan Pemeliharaan Jangka Panjang

Operasi dan pemeliharaan yang efektif memerlukan perencanaan jangka panjang. Kondisi umum di masyarakat adalah mereka tidak terbiasa melakukan karena alasan kultural dan ekonomi. Untuk itu penting:

a. *Melakukan formalisasi prosedur.* Contohnya, suku cadang sarana air dan sanitasi yang sering rusak, seperti kran air atau penghubung pipa, dibeli dalam jumlah besar agar perbaikan bisa segera dilakukan jika terjadi kerusakan. Selain itu, jangka waktu perbaikan ditentukan jika kerusakan terjadi. Jika jangka waktu ini tidak dipenuhi, maka otoritas air desa akan mengenakan hukuman.

b. *Kerja sama dengan operator swasta.* Cara yang kian umum untuk meningkatkan O dan P adalah mempekerjakan operator swasta dalam bentuk kelompok pengguna air bersih dan sanitasi desa atau organisasi dari luar untuk mengumpulkan iuran pengguna, memperbaiki kerusakan dan melakukan perawatan berkala. Selain itu keberhasilan sektor swasta dalam pasokan layanan air minum dan sanitasi skala kecil perlu didokumentasikan.

3. Pelibatan perempuan sebagai pengelola utama air minum dan kesehatan keluarga. Ini penting sebab mereka mempunyai lebih banyak kepentingan dalam mempertahankan pasokan layanan air minum dan sanitasi masyarakat. Langkah meningkatkan pengaruh perempuan dapat dilakukan dengan jalan menawarkan ke kelompok kerajinan atau pertanian perempuan, yang umum ditemukan di desa-desa sehingga mereka terlibat langsung dalam O dan P. ■



Co-Team Manager ISSDP Syarif Puradimadja (kiri depan) saat Konferensi "Sanitation Challenge" di Wageningen, Belanda.
Foto Istimewa

bahan jamban, yang sebagian besar adalah balok beton untuk lantai. Mereka setuju untuk melunasi pinjaman tanpa bunga selama kurun waktu tertentu, dengan demikian dana kembali dan

Dialog Interaktif di RRI Dianggap Acara Bermakna dan Langka

Acara *talkshow*/dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dianggap sebagai acara bermakna dan langka. Ungkapan tersebut disampaikan salah satu narasumber dialog, Herman Suhadi selaku anggota Komisi D, DPRD Kabupaten Bangka.

Dialog interaktif ini telah dilaksanakan di studio RRI Sungailiat, Kabupaten Bangka, pada 27 Mei 2008 dengan menghadirkan sejumlah narasumber berkompeten, yaitu H Tarmizi selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka, Fredy selaku Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka, Herman Suhadi selaku Komisi D, DPRD Kabupaten Bangka, Yudi Kristanto selaku Direktur PT Polman Timah, Albana mewakili Pers Bangka Pos, dan dipandu Rustian Al-Anshori dari RRI Sungailiat dengan topik "Menyelamatkan Sumber Air dengan Pencegahan Pengrusakan Lingkungan dan Perilaku Sanitasi di Kabupaten Bangka".

Turut hadir dalam acara ini sebanyak 40 orang, terdiri dari unsur Pokja AMPL provinsi, Pokja AMPL kabupaten, pers, undangan, narasumber, perguruan tinggi, Kelompok Pengelola Air Minum Berbasis Masyarakat, Forum Advokasi Babel dan WASPOLA. Acara ini disiarkan langsung melalui pemancar radio dan memperoleh respon masyarakat yang positif.

Proses pelaksanaan dialog interaktif diawali dengan memutar beberapa film yang menunjukkan fakta terkait tema yang dibahas, seperti film "Selamatkan Babelku", "Kebijakan AMPL" dan "Krisis AMPL". Dilanjutkan dialog penajaman peserta terkait isu dan alternatif solusi yang dibutuhkan. Para narasumber memberikan respon dan penyikapan terhadap isu-isu AMPL yang berkembang,

yang dianggap sesuai kebutuhan daerah.

Hasil penting kegiatan ini meliputi, a) membentuk pemahaman dan opini publik mengenai isu air minum dan penyehatan lingkungan, b) memanfaatkan media massa sebagai mitra advokasi pelaksanaan kebijakan AMPL di daerah, c) menyadarkan dan mendorong segenap elemen pemangku kepentingan untuk bekerjasama secara sinergis dalam pembangunan AMPL di daerah secara berkelanjutan, d) sarana pembelajaran bersama dan penguatan kapasitas Pokja AMPL daerah dalam operasionalisasi kebijakan di daerah, e) meningkatkan komitmen peningkatan penganggaran bagi pembangunan AMPL secara partisipatif di daerah, dan lain-lain.

Acara ini diinisiasi Pokja AMPL Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bekerjasama dengan Pokja AMPL Kabupaten Bangka, Pokja AMPL Pusat dan WASPOLA, dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan lokakarya strategi advokasi kebijakan AMPL di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung awal 2008, sekaligus sebagai sarana *launching* Tahun Sanitasi Indonesia 2008 yang bertempat di Kabupaten Bangka dengan melibatkan partisipasi segenap elemen pemangku kepentingan.

Rekomendasi acara ini meliputi, a)

pentingnya menggalakkan advokasi kebijakan untuk merubah perilaku secara berulang-ulang dan terus menerus, b) pentingnya menyediakan sarana sanitasi dan persampahan di masyarakat secara memadai, c) pendidikan PHBS sejak usia dini, d) peningkatan peranan wanita dalam pembangunan AMPL di daerah, e) pengembangan teknologi perbaikan kualitas air yang memadai, f) akses cakupan AMPL harus segera dipenuhi, g) peningkatan penganggaran AMPL di daerah, serta h) implementasi Renstra AMPL-BM Kabupaten Bangka dengan melibatkan partisipasi segenap elemen pelaku AMPL.

Rencana Tindak Lanjut Daerah, meliputi a) melanjutkan keterkaitan materi kegiatan hari pertama dengan pelatihan fasilitasi lanjutan yang diselenggarakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, b) Pokja AMPL provinsi akan melakukan desiminasi kegiatan *talkshow* ke daerah dampingan lainnya, c) Pokja AMPL provinsi akan membuat format kampanye dengan media massa dalam bentuk yang lebih sesuai di tingkat provinsi.

Catatan penting dalam kegiatan ini adalah, a) acara *talkshow* adalah acara yang masih langka di daerah. Langka model penyelenggaraan dan ketersediaan narasumbernya, b) cara semacam ini

dianggap sesuai kebutuhan daerah sebagai media kampanye untuk mendorong partisipasi semua pihak dalam operasionalisasi kebijakan di daerah, dan c) penting dipertimbangkan fasilitasi lanjutan untuk menyiapkan tokoh lokal/daerah menjadi narasumber yang memiliki kapasitas memadai dalam mengampayekan operasionalisasi kebijakan di daerah secara berkelanjutan.

Acara ini ditutup dengan penyerahan kaos kampanye



Dialog interaktif di RRI Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Foto: WASPOLA

Dewi Motik:

"Tingkat Pendidikan Mempengaruhi Kualitas Kebersihan"

Meskipun menyanggah jabatan di berbagai perusahaan dan kesibukan di berbagai organisasi kewanitaan, Dr Cri Puspa Dewi Motik Pramono, MSc tetap merasa bangga dijuluki sebagai ibu rumah tangga. Baginya, julukan itu lebih mulia dibanding jabatan apapun.

Memang, kesibukan wanita karir ini telah menyita banyak waktu. Namun perempuan berparas ayu ini tidak berpaling dari kodratnya. "Tugas ibu rumah tangga adalah peletak dasar bagi pendidikan dan kesejahteraan keluarga yang berarti juga bagi masa depan bangsa," ujar perempuan berkerudung ini kepada **Percik** di mobil pribadinya.

Sepanjang perjalanan, Dewi Motik berbincang banyak seputar kondisi toilet atau jamban di Indonesia. Sampai saat ini, perempuan yang kerap tampil sederhana ini masih merasa sedih dengan kondisi toilet yang berada di sekolah-sekolah, terutama sekolah milik pemerintah.

Menurut Dewi Motik, masih sangat banyak sekolah-sekolah dari tingkat Sekolah Dasar bahkan sampai perguruan tinggi yang keadaannya masih memprihatinkan. Tidak hanya dari kebersihannya, tapi juga kondisi secara fisik.

"Jangankan kondisi WC sekolah, ruang tempat belajar saja masih jauh dari bersih. Ini bagaimana menteri pendidikannya. Kok berani-beraninya jadi menteri," kata perempuan yang aktif sebagai pengusaha, penulis, dosen, pembicara di berbagai seminar dan juri di berbagai perlombaan ini.

Dewi berkisah, saat salah satu anaknya masuk SMA sengaja ia masukkan ke sekolah negeri bukan swasta seperti saat SD maupun SMP. "Anak saya mengeluh sampai satu ming-



Foto: Bowo Ieksono

gu tidak bisa pipis. Itu karena ia tidak terbiasa pipis di toilet sekolah yang jorok," kenang ibu dua anak dari Moza Pramita Pramono dan Adimaz Prarezeki Indramuda Pramono.

Meski demikian, sebagai pemerhati toilet, Dewi Motik merasa masih banyak tempat-tempat umum yang toiletnya bersih dan nyaman. "Kebersihan toilet itu mencerminkan pemiliknya yang mempunyai perhatian terhadap kebersihan dan kesehatan," ungkap perempuan kelahiran Jakarta, 10 Mei 1949.

Letak Persoalan

Menurut doktor lulusan program Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri

Jakarta ini, persoalan kurangnya perhatian terhadap kebersihan toilet terletak pada tingkat pendidikan dan sosialisasi. Dewi berujar, pendidikan di Indonesia dibenahi dengan baik terlebih dulu, karena itu akan mempengaruhi kesadaran masyarakat.

Dewi mengatakan, bangsa Indonesia tidak mewarisi hal-hal yang baik dari penjajah Belanda. "Saya pikir orang Belanda itu sangat mengajari kebersihan. Ya kita saja yang tidak mau mewarisinya. Apa ini satu pertanda kalau kita tidak siap merdeka?," ujar mantan None Jakarta 1968 dan mantan bermacam even puteri kecantikan ini.

Mengajari anak-anak hidup bersih dan sehat di rumah dan di sekolah,

menurut Dewi, adalah dasar dalam menanamkan perilaku yang baik agar anak-anak tumbuh dengan kualitas yang membanggakan. "Bagaimana mereka menjadi manusia yang berkualitas dan berguna bila lingkungan rumah dan sekolahnya kotor dan tidak terawat," ujar istri Pramono Soekasno ini.

Dewi sempat merasakan sedih sekaligus bangga ketika salah satu organisasinya yaitu Solidaritas Istri Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) mengadakan lomba penulisan esai tentang kebersihan lingkungan untuk pelajar SD hingga SLTA. Di sebuah sekolah dasar, tambahnya, anak-anak seusai mengikuti lomba itu tidak mau langsung pulang karena ingin langsung membersihkan toilet di sekolah mereka.

Dewi Motik mengatakan kita bisa melihat bangsa yang mempunyai tingkat pendidikan tinggi adalah bangsa yang

memperhatikan kebersihan toiletnya dan menganggap kebersihan toilet adalah nomor satu.

Sosialisasi Setiap Detik

Perilaku dan kebiasaan hidup bersih untuk menunjang kesehatan, menurut Dewi, menjadi tanggung jawab bersama dan harus terintegrasi. Tidak hanya urusan masyarakat secara pribadi atau urusan pemerintah semata tapi diperlukan kerjasama yang bahu-membahu.

Untuk menyadarkan masyarakat, menurut Dewi, dibutuhkan sosialisasi atau kampanye dan pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus. "Hitungan tidak sekedar setiap hari tapi setiap detik dan setiap menit," ujarnya.

Dewi mengartikan bahwa kesehatan lingkungan itu apa yang kita masukkan atau kita makan dan apa yang kita keluarkan itu juga harus bersih. "Sesuatu

yang kita makan dan tempat untuk mengolahnya yaitu dapur harus bersih. Demikian pula dengan tempat untuk mengeluarkannya, juga harus bersih," tutur aktifis yang enggan berpolitik praktis ini.

Dewi menceritakan pengalamannya ketika ke negeri Cina. Tidak sekedar persoalan kebersihan dan kenyamanan yang sangat terjaga, tapi juga teknologi yang sangat modern. "Nggak cuma enak dan *anget* saat duduk di toiletnya tapi saat kita mencemplungkan kotoran, ada satu alat di samping kita yang bersuara mengukur kadar kolesterol dan kadar lain dari kotoran kita," ungkap aktifis perempuan yang kerap berkunjung ke luar negeri untuk membawa misi bagi Indonesia ini.

Kebersihan dan kenyamanan toilet, menurut Dewi, juga sangat erat hubungannya dengan martabat bangsa. Percuma saja program yang dicanangkan pemerintah tentang *Visit Indonesia Year 2008* (Tahun Kunjungan Indonesia 2008) untuk menjangkau ribuan bahkan jutaan wisatawan asing ke Indonesia.

"Hal pertama yang dicari orang saat turun dari pesawat adalah toilet. Karena itu kebersihan toilet di bandara menjadi pintu utama dalam menjangkau wisatawan. Bagaimana para turis itu akan betah di Indonesia bila kebutuhan dasar mereka terganggu karena kotornya toilet di bandara," ungkap penyandang master bidang Pengkajian Ketahanan Nasional (PKN) dari Universitas Indonesia.

Memang, bukan berarti toilet yang bersih dan sehat itu harus mewah dan mahal. Menurut Dewi yang penting ada tanggung jawab dari semua pemakainya. Untuk toilet umum harus ada penjaga yang dibayar untuk bertanggung jawab terhadap kebersihan toilet tersebut.

"Sebagai pemakai toilet umum, kita harus menghormati orang yang akan memakai setelah kita memakainya. Demikian arti tanggung jawab bersama dalam menjaga kebersihan," tutur *Chairman for Environment* Aliansi Perempuan untuk Pembangunan Berkelanjutan (APPB) mengakhiri perbincangan. ■ Bowo Leksono



Komunikasi dan Partisipasi Perempuan

Komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang erat antara pemerintah dan masyarakat, terutama partisipasi perempuan dalam sosialisasi pembangunan AMPL, menjaga keberlanjutan pengelolaan sarana dan prasarana AMPL desa. Kesadaran itu kemudian mendorong Kelompok Kerja (Pokja) AMPL Kebumen untuk mengadakan Lokakarya Penguatan Komunikasi dalam rangka mendorong partisipasi perempuan untuk pembangunan AMPL di Kabupaten Kebumen pada 15-16 Juli 2008. Penyelenggaraan sepenuhnya difasilitasi Pokja AMPL Kabupaten Kebumen, dibantu WASPOLA dalam beberapa sesinya.

Dalam pidato pembukaannya, Wakil Bupati Kebumen, K.H Nasiruddin Al-Mansur, menyampaikan bahwa lokakarya ini diharapkan akan lebih mendorong agar kaum perempuan meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan AMPL secara berkelanjutan. "Peran aktif seluruh peserta sangat diharapkan agar pembangunan AMPL bisa tercapai secara optimal," katanya.

Dalam lokakarya yang diselenggarakan di Hotel Benteng Van Der Wijck ini, kesetaraan gender menjadi isu penting yang dibahas. Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam pembangunan AMPL. Dalam pembangunan AMPL, peran perempuan sangat penting, karena sebagian besar urusan domestik rumah tangga diurus oleh perempuan.

Untuk itu, keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan sarana dan prasarana AMPL perlu diperhatikan.

Dalam pembangunan AMPL diperlukan komunikasi yang terbuka dan kerjasama yang erat antarpemangku kepentingan, seperti yang dibuktikan dengan simulasi melalui permainan kelompok *broken T*. Dalam permainan, peserta yang berasal dari berbagai sektor seperti Dinas terkait AMPL, DPRD, institusi pen-

didikan, LSM, unsur desa dan kecamatan ini, ditugaskan untuk bekerja sama menyusun *puzzle* yang berbentuk huruf T.

Salah seorang wakil dari kelompok berperan sebagai pemberi instruksi dan sisanya berperan sebagai penyusun. Mulanya, antara pemberi instruksi dan penyusun diberi sekat. Hal ini menyebabkan informasi yang diberikan tidak maksimal dan hingga waktu yang diberikan habis, tugas tidak dapat diselesaikan. Ketika sekat antara pemberi keputusan dan penyusun ditiadakan, tugas yang diberikan dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, komunikasi pun menjadi lebih efektif dan kerjasama pun dapat terjalin dengan erat.

Selain itu, lokakarya ini sekaligus merupakan proses sosialisasi dalam rangka pemberian bantuan AMPL di 11 desa di Kebumen. AMPL bukan proyek tetapi program, demikian ditanamkan Anna Ratnawati dari Pokja AMPL. Maka sejak awal masyarakat dilibatkan untuk merancang partisipasi dan sosialisasi yang akan dilakukan untuk menimbulkan rasa memiliki dan keberlanjutan terhadap fasilitas AMPL yang akan diterima.

Dalam pelatihan ini, 11 desa menyusun bersama pemetaan permasalahan AMPL dan menyusun rencana kegiatan desa di alokasi tahun 2009. Komitmen dan kesiapan masyarakat jauh lebih penting, sehingga ada jaminan keberlanjutan pemeliharaan sarana dan prasarana di masa mendatang. ■ DHA/WH



Salah satu sesi pada Lokakarya Penguatan Komunikasi dalam Rangka Mendorong Partisipasi Perempuan untuk Pembangunan AMPL di Kabupaten Kebumen pada 15-16 Juli 2008. Foto Dini Haryati

Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Cidahu, Sukabumi

Awalnya hanya ada 10 rumah yang mempunyai dan memakai jamban. Munculnya rasa jijik, malu dan berdosa menjadikan warga Ciseke tidak mau lagi membuang kotoran sembarangan. Jijik dan malu adalah sikap seseorang untuk menolak terhadap suatu obyek psikologi dalam hal ini tinja berserakan.

Dalam tempo sekitar empat bulan, warga yang berjumlah 121 rumah yang dihuni 138 keluarga, mampu membebaskan diri dari buang air besar (BAB) sembarangan. Mereka dengan sukarela dan sesuai kemampuan sendiri membangun jamban dekat tempat tinggalnya. Ketika ditanya kenapa membuat jamban di dalam rumah, seorang ibu menjawab, "Enak saja, tidak usah jauh-jauh pergi BAB kalau malam hari saat sakit perut".

Kecamatan Cidahu menjadi dikenal karena munculnya penyakit Polio pada tahun 2005. Penyebaran penyakit ini dikarenakan lingkungan yang kotor, masyarakat membuang tinja sembarang di sungai, kolam ataupun di kebun. Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi mencoba menerapkan pendekatan pembangunan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) di salah satu dusun di Ciseke.

Pembangunan jamban selama ini kurang optimal khususnya dalam membangun perubahan perilaku masyarakat. Pendekatan tersebut memiliki karakteristik berorientasi kepada konstruksi fisik jamban tanpa upaya pendidikan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) yang memadai.

Desain jamban seringkali mahal bagi keluarga miskin. Subsidi material tidak dapat dilanjutkan baik oleh pemerintah

maupun oleh donor. Proyek tidak efektif menjangkau kelompok masyarakat miskin. Jamban dibangun, tetapi seringkali tidak digunakan masyarakat.

Merasa Malu, Bersalah dan Berdosa

Manusia membuang kotoran karena merasa tinja tidak ada manfaatnya. Tinja dijauhkan dari dirinya karena merasa terganggu, berbau, tidak enak dipandang, dan bagi yang tahu dapat menyebabkan penyakit. Ketika menjauhkan tinja dari dirinya berarti mendekat kepada orang lain bisa anaknya, keluarganya ataupun tetangganya.

Pemahaman ini yang kemudian diangkat oleh fasilitator dengan cara membantu masyarakat menghitung bera-

pa ton tinja orang satu kampung setiap hari dibuang ke kebun atau sungai. Betapa jahat perbuatan BAB sembarangan tersebut yang menyebabkan orang lain terganggu, tidak nyaman dan bahkan menjadi sakit. Dalam ajaran agama Islam diyakini kebersihan adalah bagian dari iman, membuang kotoran sembarangan menyebabkan lingkungan menjadi kotor. Perbuatan membuang kotoran sembarangan bagi sebagian orang menganggap dosa.

Merasa jijik dan malu atas perbuatan yang menyebabkan tinja berserakan dijadikan pintu masuk dalam pendekatan STMB. Rasa jijik dan malu dipicu dengan cara mengajak warga berdiskusi langsung di lokasi dimana mereka biasa melakukan BAB secara terbuka. Pada



Warga desa yang belum bebas dari BAB sembarangan sedang dipicu untuk membuat jamban keluarga.

umumnya semua merasa jijik dan menutup hidung selama berdiskusi. Sebagian dari mereka merasa malu atas perbuatan yang telah mereka lakukan sendiri.

Rasa malu diangkat oleh fasilitator untuk menjadi faktor yang bisa memotivasi mereka melakukan perubahan. Pertanyaan kemudian apakah warga bersedia berubah. Melakukan perubahan merupakan salah satu puncak psikologi masyarakat dalam pendekatan ini.

Kepercayaan dan Harga Diri Masyarakat

Walaupun rasa jijik dan malu telah mengusik pikiran, namun ketika ditawarkan apakah warga mau berubah, umumnya mereka tidak bisa menjawab. Banyak yang memberikan berbagai alasan mengapa BAB sembarangan, seperti tidak punya biaya, tidak ada perhatian pemerintah, proyek jamban yang ada dibangun sembarangan dan sebagainya.

Di Dusun Ciseke, Cidahu, Sukabumi, ketika petugas menawarkan siapa diantara warga yang bersedia menjadi ketua dan membimbing warga lain untuk melakukan perubahan semua diam. Seorang warga yang bernama Ujang mengatakan bahwa tidak mungkin mereka membuat jamban kalau tidak ada bantuan dari pemerintah karena penghasilan warga Ciseke hanya Rp 13 ribu/hari. "Jangankan untuk membuat jamban untuk makan pun susah," tegasnya.

Kemudian dengan setengah emosi, seorang tokoh masyarakat mengatakan, "Wajib mana antara menafkahi keluarga dengan membuat jamban". Kontan perkataannya membuat warga yang lain ikut mengiyakan. Menghadapi warga yang tetap menyatakan tidak mau berubah, pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam untuk memicu rasa malu, takut penyakit, rasa bersalah lebih diper-tajam.

Dalam situasi yang sulit tersebut petugas mengawali sendiri memimpin masyarakat untuk melakukan perubahan. Namun di antara mereka biasanya ada saja satu dua orang yang berani melawan pemikiran warga lainnya yang tidak mau

berubah. Mereka yang berani muncul ini terus diberi semangat untuk dapat mempengaruhi warga lain sampai jumlahnya cukup untuk secara mandiri mengorganisir perubahan warga tersisa lain.

Dengan kepemimpinan Ujang, masyarakat Ciseke membentuk kelompok kerja bernama Tim Pemberantas Kotoran yang beranggotakan tujuh orang yaitu Dudu (tokoh kampung), Ukin (ketua RT), Idim (ketua pemuda), Adah dan Neneng. Setelah tim terbentuk, mereka mulai membuat peta dan rencana kerja masyarakat untuk membuat jamban. Sebagai langkah awal, mereka menutup MCK dan mengeringkan kolam di lokasi MCK. Terbukti pada esok harinya kolam sudah kering.

Dudu adalah orang pertama yang membuat tanki septik. Ia sangat mendukung program ini karena menurutnya program ini akan membuat lingkungan jadi lebih bersih. Karena itu, Dudu mau mencontohkan membuat tanki septik kepada warga. Selain mengeringkan kolam dan menutup MCK, yang dilakukan masyarakat adalah bergotongroyong membuat lubang tanki septik bagi orang yang tidak mempunyainya.

Perkembangan selanjutnya pembuatan jamban menjadi meluas dan muncul rasa harga diri ketika keluarga sudah membuat jamban. Biaya yang dihabiskan masyarakat untuk membuat jamban bervariasi sesuai kemampuan masyarakat, mulai dari Rp 100 ribu- Rp 500 ribu.

Prinsip pembangunan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) tidak menerapkan adanya bantuan finansial atau subsidi secara langsung kepada keluarga. Dalam pemecuan, telah diyakini BAB sembarangan membuat mereka bersalah, jijik dan malu. Mereka berjanji akan memperbaiki perilakunya sendiri. Bantuan finansial akan merusak tatanan psikologi yang sudah dibentuk.

Pendidikan disampaikan dengan semangat tidak menggurui, tidak memaksa dan tidak mempromosikan jamban. Petugas mampu mempengaruhi bahwa masyarakat sendiri sebagai pemimpin. Kepemimpinan masyarakat

mampu secara total mengajak secara totalitas seluruh komponen masyarakat yang ada di Ciseke terlibat dalam analisa permasalahan, perencanaan, pelaksanaan serta pemanfaatan dan pemeliharaan fasilitas yang telah dibangun sendiri.

Hal yang terpenting adalah inisiatif berasal dari masyarakat. Keputusan secara total atau keseluruhan dilakukan masyarakat dan dilaksanakan secara kolektif. Solidaritas masyarakat (laki-laki, perempuan, kaya miskin) sangat diperlukan dalam pelaksanaan pendekatan ini. Semua dibuat oleh masyarakat, tidak ada ikut campur pihak luar. Dengan langkah dan ketulusan petugas umumnya akan muncul *natural leader*.

Bebas dari BAB

Berawal kegiatan sosialisasi di Desa Tangkil yang dihadiri Camat Cidahu, aparat desa, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan para kader desa. Pertemuan ini difasilitasi petugas sanitasi dan petugas promosi kesehatan Puskesmas Cidahu. Langkah selanjutnya mereka menyebutnya dengan istilah 'pemicuan'.

Pemicuan dimaksudkan memberi penjelasan kepada masyarakat bahwa membuang kotoran sembarangan dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor, berbau dan dapat menyebarkan berbagai penyakit. Rencana kerja masyarakat membuahkan hasil. Dalam tempo empat bulan Kampung Ciseke, Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi bebas dari BAB sembarangan.

Masyarakat Desa Ciseke tidak sendiri. Banyak desa di Indonesia telah bebas dari BAB sembarangan melalui intervensi pemerintah daerah, LSM dan organisasi lain. Departemen Kesehatan melaporkan pada 2007 tidak kurang 160 desa bebas dari BAB sembarangan dan 2008 sebanyak 200 kabupaten mencoba pendekatan ini di daerahnya. ■

Dr. Hening Darpito
Water and Environmental Sanitation Specialist
UNICEF

Tekad dan Kegigihan Demi Setetes Air Minum



Masyarakat Desa Mawar bergotong royong mengangkut pipa.
Foto Istimewa

Sulitnya kondisi geografis Desa Mawar, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatu dan berbukit, terbukti bukan merupakan halangan bagi masyarakatnya untuk membangun sarana air minum yang pertama di provinsi itu.

Apabila mendengar nama Desa Mawar disebut, mungkin sebagian besar orang akan menerka bunga mawar banyak bertumbuhan di desa yang terletak di ujung paling timur Pulau Pantar, Kabupaten Alor tersebut, sehingga desa itu dinamakan desa Mawar.

Namun terkaan itu ternyata salah, menurut Abdurahman Sang, Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kabupaten Alor yang juga Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK)

Unicef, nama Mawar diambil dari dua kata dalam bahasa setempat. "Ma" memiliki arti rumah, sedangkan "war" berarti batu. Sehingga terjemahan bebas Mawar adalah rumah di atas batu.

"Penamaan Desa Mawar yang berarti rumah di atas batu itu cukup menggambarkan sulitnya kondisi geografis desa tersebut yang berbatu dan topografinya yang berbukit," tambah Abdurahman Sang yang lebih akrab dengan sapaan Pak Man. Apalagi Desa Mawar hanya dapat dijangkau dengan kapal motor dari kota Kalabahi selama kurang lebih satu setengah jam. Itupun kalau kondisi arus di selat antara Pulau Alor dan Pulau Pantar sedang bersahabat, kalau tidak, perjalanan bisa dua kali lebih lama dari waktu normal.

Namun tingkat kesulitan akses

transportasi yang cukup tinggi tersebut, tidak membuat surut tekad masyarakat Desa Mawar untuk memperoleh air minum. Dibawah kepemimpinan Kepala Desa Yusak Olang, ratusan masyarakat Desa Mawar mulai bergotong royong melaksanakan pembangunan sarana air minum dengan sistem jaringan perpipaan gravitasi sejak bulan Juli.

"Bahkan masyarakat desa kami yang tinggal dan mencari nafkah di Kalabahi datang dan turut membantu pembangunan dengan cara mengangkut material non-lokal seperti pipa dan semen. Sementara itu, anggota masyarakat lainnya berswadaya mengumpulkan material lokal seperti pasir, kerikil dan batu," tukas Yusak yang sudah menjabat sebagai kepala desa selama sepuluh tahun.

Menunggu Tiga Tahun

Desa Mawar merupakan salah satu dari lima desa sasaran pembangunan sarana air minum dengan sistem perpipaan gravitasi di Kabupaten Alor yang proses persiapannya dimulai sejak tahun 2006. "Untuk tahap pertama, pembangunan sarana air minum dukungan Unicef ini dilaksanakan di Desa Mawar, Aimoli dan Maritain. Sedangkan Desa Kuneman dan Purnama akan dilaksanakan paling cepat Oktober 2008 ini," terang Abdurahman.

Pria lulusan Universitas Muhammadiyah Malang ini optimis Desa Mawar akan menjadi desa pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, atau bahkan yang pertama di seluruh Indonesia yang dapat menikmati air siap minum. "Melihat partisipasi masyarakat yang luar biasa, paling lambat November 2008 pembangunan akan selesai 100 persen dan siap diresmikan," tambahnya.

Masyarakat di Desa Mawar, harus menunggu tiga tahun sebelum akhirnya

dapat melaksanakan pembangunan sarana air minum ini. "Tahapan pertama adalah survei kelayakan teknis yang dilaksanakan Unicef beserta tim kabupaten pada akhir tahun 2006 yang lalu," cerita Yusak mengenai tahapan pembangunan sarana air minum di desanya.

Yusak menambahkan, bahwa pada Agustus 2007, tim dari Bappeda Kabupaten Alor kembali ke Desa Mawar untuk melakukan proses penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) setelah beberapa bulan sebelumnya dilakukan survei detail dan penyusunan rencana teknis pembangunan jaringan perpipaan gravitasi.

Dalam rencana teknis itu, sistem perpipaan di Desa Mawar dirancang dengan menggunakan satuan sambungan rumah yang dilengkapi meteran air. "Desa saya akan menjadi desa pertama di NTT yang memiliki sarana air minum dengan sambungan rumah," kata Yusak bangga.

Masih mengenai partisipasi dan kontribusi Desa Mawar, menurut Yonatan Peni, ketua panitia pembangunan sarana air minum Desa Mawar, masyarakat sepakat menanggung pengadaaan material lokal seperti pasir, kerikil dan batu. Material tersebut harus diangkut dari tepi pantai, menuju lokasi pembangunan yang topografinya menanjak dan berjarak dua sampai tiga kilometer.

"Apabila dihitung dalam bentuk uang,



Partisipasi perempuan dalam pembangunan sarana air minum di Desa Mawar. Foto Istimewa

maka kontribusi kami dapat mencapai angka Rp 100 juta," papar Yonatan dengan antusias. Selain itu, juga disepakati untuk mengumpulkan biaya sambungan keran air sebesar Rp 10 ribu untuk satu unit rumah dan Rp 1.000 untuk penggunaan air sebanyak 1 m3. "Dengan sistem sambungan rumah dan penggunaan air yang terukur, maka akan terjamin rasa keadilan bagi masyarakat," Yonatan menambahkan.

Sarana dengan Standar Air Minum

Pembangunan sarana air minum di Desa Mawar ini sedikit berbeda dengan

kebanyakan pembangunan sarana serupa lainnya. Pertama, sarana ini didesain untuk menyediakan air minum, bukan lagi air bersih. Air minum karena sistem ini mengandalkan sumber mata air alami yang jernih dan segar dari sebuah mata air yang terletak di Desa Ombay di dataran tinggi Pulau Pantar.

Mata air tersebut jaraknya sekitar lima kilometer dan melalui jalan berbukit yang terjal dan curam. Bisa dibayangkan betapa sulitnya masyarakat Desa Mawar dalam membangun sarana air minum ini. Setiap hari selama beberapa bulan, dengan berjalan kaki sejauh puluhan kilometer memikul material yang berat seperti semen, pasir, kerikil dan pipa galvanis.

Kegigihan dan tekad masyarakat Desa Mawar dapat dijadikan panutan bagi masyarakat desa lainnya tidak hanya di Kabupaten Alor namun juga di Provinsi NTT. Bahwa dengan tekad yang kuat, gotong royong, kerja keras dan kepemimpinan desa yang berwibawa bukan tidak mungkin untuk mewujudkan sebuah keinginan. "Semoga Desa Mawar dapat menjadi contoh bagi masyarakat desa lainnya," harap Abdurahman Sang. Mari kita tunggu hasil kerja keras masyarakat Desa Mawar. ■

Reza Hendrawam

Technical Project Officer UNICEF NTT



Lokasi reservoir yang sedang dibangun berlatar pemandangan yang sangat indah. Foto Istimewa

Deklarasi Bebas BAB Sembarangan dan Deklarasi Peserta Dana Sehat

"Prestasi ini merupakan kado yang membanggakan bagi saya diakhir masa jabatan. Saya berharap kreatifitas masyarakat ini bisa terus berlanjut dimasa yang akan datang," ucap Achmad Fauzi, Bupati Lumajang, Jawa Timur di depan puluhan warganya.

Hari itu, Selasa, 8 Juli 2008, dua prestasi membanggakan sekaligus disandang dua kecamatan di Kabupaten Lumajang. Prestasi itu ditandai pendeklarasian 100 persen masyarakat Kecamatan Senduro menggunakan sarana sanitasi jamban dan 100 persen masyarakat Kecamatan Gucialit telah menjadi anggota dana sehat yang dipusatkan di Balai Desa Kandangan, Kecamatan Senduro.

Camat Senduro Khodiri pada sambutannya mengatakan deklarasi ini merupakan penutup deklarasi di tingkat dusun dan desa. "Keberhasilan ini merupakan wujud kesadaran bersama masyarakat dalam mengubah perilakunya. Mereka tidak tergantung pada bantuan dana dari pemerintah tapi dengan tekad dan keyakinan untuk hidup bersih dan sehat," tuturnya.

Berawal di Tahun 2005

Selama tiga tahun, yaitu sejak tahun 2005, masyarakat di Kecamatan Senduro mulai melakukan gerakan perubahan perilaku buang air besar di jamban. Metode yang diterapkan adalah *Community Led Total Sanitation (CLTS)* atau yang diadopsi menjadi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

Desa Purworejo menjadi proyek percontohan (*pilot project*) dan pada awal tahun 2006 desa ini telah terbebas dari buang air besar (BAB) sembarang atau *open defecation free (ODF)* lebih dulu



Pembacaan Deklarasi 100 persen masyarakat Kecamatan Senduro menggunakan sarana sanitasi jamban dan 100 persen masyarakat Kecamatan Gucialit menjadi anggota dana sehat, 8 Juli 2008. Foto Bowo Leksono

Wawancara dengan Bupati Lumajang Achmad Fauzi

Bagaimana komentar Anda tentang keberhasilan di kedua kecamatan ini?

Saya selaku pemerintah daerah merasa sangat bangga hati dengan kesuksesan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) karena telah mampu menggerakkan masyarakat dengan segenap kemampuan mereka tanpa subsidi atau bantuannya. Saya sangat bangga dengan keberhasilan ini.

Apa yang akan Anda lakukan dengan keberhasilan masyarakat secara mandiri ini?

Saya berjanji, diakhir jabatan ini untuk memberikan *reward*, secara riil belum tahu bentuknya, tapi saya akan bicarakan dengan DPRD untuk bisa masuk anggaran APBD.

Sebenarnya, apakah ada kebijakan Pemerintah Daerah Lumajang da-

lam sektor sanitasi?

Sanitasi merupakan salah satu program utama dalam bidang kesehatan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Lumajang.

Bantuan konkritnya seperti apa?

Memberi bantuan program Gakin (keluarga miskin) yang diawal program sebesar Rp 500 ribu dan sekarang Rp 3 juta. Bantuan itu termasuk untuk membangun sarana jamban keluarga. Ada juga bantuan program untuk Posyandu dan Poskesdes di setiap desa sebesar Rp 10 juta per tahun selama tiga tahun untuk memotivasi masyarakat agar mau memulai hidup bersih dan sehat. Program unggulan lain adalah Gerbang Mas yang merupakan kepanjangan dari Gerakan Pembangunan Ekonomi Masyarakat. ■ BW

dari 12 desa lainnya di Kecamatan Senduro.

Keberhasilan Desa Purworejo ini mempengaruhi desa-desa lain untuk turut ambil bagian. Maka pada tahun 2006, CLTS dikembangkan di lima desa dan pada akhir tahun 2006, Desa Bedayu berhasil menjadi desa ODF.

Pada pertengahan tahun 2007, metode CLTS dikembangkan di Desa Pandansari, namun hasilnya kurang memuaskan sehingga pada awal tahun 2008 dilaksanakan *workshop* Program SToPS (Sanitasi Total dan Pemasaran Sanitasi) atau *Total Sanitation and Sanitation Marketing* (TSSM) di Kabupaten Lumajang dengan melibatkan unsur lintas sektor seperti PKK, Pemberdayaan, Kimpraswil, UPTD Pendidikan dan Sanitarian Puskesmas. Dari sinilah tim SToPS Kecamatan Senduro dibentuk dan disahkan melalui SK Camat Senduro yang beranggotakan kelima unsur lintas sektor tersebut.

Tim SToPS ini bergerak dengan



Bupati Lumajang, Jawa Timur Achmad Fauzi saat menyimak proses perubahan perilaku masyarakat terbebas dari BAB sembarangan. Foto Bowo Leksono

merencanakan dan menjadwalkan kegiatan pemucuan di desa-desa sasaran program yaitu, Desa Wonocepokoayu, Kandangan, Senduro, Sarikemuning, Burno, Kandangtepus, Argosari dan Pandansari.

Berbagai kendala ditemui Tim SToPS. Namun dengan semangat dan kegigihan, bantuan dari berbagai pihak seperti aparat kecamatan dan desa pun turut melengkapi. Namun dari semua itu, yang terpenting adalah semangat dan kesadaran dari masyarakat sendiri untuk

mau terpicu untuk membangun jamban secara bergotong-royong.

Data Kuantitatif

Hasil yang dicapai Kecamatan Senduro dari tahun 2005, angka kepemilikan jamban yang tadinya berjumlah 6.167 bertambah menjadi 9.081 pada tahun 2008 dengan peningkatan sejumlah 2.917 jamban. Peningkatan ini merupakan murni hasil swadaya masyarakat.

Dalam pembangunan jamban karena berpedoman pada Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), tidak ada tuntutan bagi masyarakat untuk membangun jamban yang mewah. Di Senduro, dari 2.917 jamban, terdata 1.310 jamban cemplung, 127 jamban cor, dan jamban kloset sejumlah 1.477. Sementara jumlah keseluruhan nilai swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan peningkatan kualitas jamban selama kurun waktu tiga tahun sebesar Rp 879.285.000. ■

Dana Sehat bagi Masyarakat Gucialit

Sudah sejak setahun lalu Kecamatan Gucialit mengenyam keberhasilan terbebas dari BAB sembarangan. Tampaknya, keberhasilan masyarakat yang dilandasi kesadaran ini terus memupuk sehingga mampu mempertahankan bahkan mengembangkan program-program lainnya.

Salah satu program yang diterapkan di desa-desa di Kecamatan Gucialit adalah mengembangkan Dana Sehat yang merupakan bagian dari Program Nasional Desa Siaga.

Tidak heran, tahun ini Kecamatan Gucialit kembali mendeklarasikan keberhasilannya yaitu kecamatan dengan 100 persen masyarakat menjadi peserta Dana Sehat.

Seperti apa itu dana sehat? Sariyam, Kepala Desa Jeruk kepada *Percik* mengungkapkan bahwa Dana Sehat adalah merupakan hasil pungutan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. "Kalau di Desa Jeruk, pungutan sebesar Rp 1.000 setiap kepala keluarga (KK) setiap bulan," katanya.

Menurut Sariyam, Dana Sehat di Desa Jeruk dipergunakan untuk membantu masyarakat yang menjalankan persalinan atau mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit. "Jadi bila ada warga yang sakit tapi tidak di rumah sakit ya tidak mendapatkan bantuan," tuturnya.

Bantuan Dana Sehat ini diberikan kepada masyarakat sebesar Rp 100 ribu. Bantuan ini juga tidak memandang apakah penerima bantuan orang yang berada atau orang miskin. "Karena semua warga membayar iuran Dana Sehat. Jadi harus dikembalikan ke warga tanpa memandang status sosial," ujar Sariyam.

Tidak mudah menggerakkan masyarakat untuk membayar iuran sekecil apapun itu. Kondisi ekonomi kerap kali menjadi alasan kuat bagi masyarakat untuk menolak bentuk iuran apapun. Walaupun semua demi kepentingan bersama.

Keberhasilan Desa Jeruk dalam menggerakkan program Dana Sehat tak lepas dari para kader Desa Siaga. "Pada awalnya timbul pro dan kontra. Lambat laun dengan kesabaran para kader, warga mulai menyadari. Apalagi setelah mengetahui betapa berharganya bantuan disaat sakit walaupun hanya Rp 100 ribu," tutur Sariyam.

Di Desa Jeruk, pengadaan Dana Sehat ini sudah dirintis sejak 12 Desember 2007 lalu. Sementara baru April 2008 dimulai pungutan kepada masyarakat. Sejumlah 589 KK telah menjadi peserta Dana Sehat yang merupakan indikator pendanaan berbasis masyarakat. ■ Bowo Leksono



Ditjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri mengadakan *training of trainer* (TOT) STBM di Provinsi Banten. Foto Bowo Leksono

TOT STBM di Provinsi Banten

Modernitas atau pola hidup modern tidak menjamin seseorang atau sebuah keluarga menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Buktinya, warga di daerah yang tidak jauh dari Jakarta atau bahkan warga Jakarta sendiri masih terbiasa buang air besar (BAB) sembarang tempat.

Karena itu, untuk memicu warga agar mulai membiasakan diri BAB di jamban, Dirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Departemen Dalam Negeri mengadakan *training of trainer* (TOT) Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di Cilegon, Provinsi Banten yang terbagi da-

lam dua angkatan.

Angkatan I, TOT digelar pada 27 Juni-1 Juli 2008. Kegiatan ini diikuti peserta yang berasal dari pusat dan daerah (Universitas Tirtayasa, Puskesmas kecamatan, perangkat pemerintah di tingkat kecamatan, Dinas Kesehatan, Pokja AMPL Nasional, Ditjen PMD Depdagri dan Ditjen PP&PL, Depkes). Untuk Angkatan II, digelar pada 11-15 Juli 2008 yang mayoritas pesertanya dari Kabupaten Serang dan Pandeglang serta beberapa peserta dari pusat dan daerah.

Materi yang diberikan dalam pelatihan STBM ini antara lain refleksi penga-

laman proyek sanitasi dan pengenalan STBM di berbagai negara dan daerah, prinsip-prinsip STBM dan tiga pilar PRA (*participatory rural appraisal*) dalam STBM, serta simulasi elemen pemecuan dan faktor penghambat dalam STBM.

Setelah peserta menerima dan menguasai materi STBM maka dilakukan praktik lapangan ke beberapa lokasi yang masih belum terbebas dari BAB sembarangan. Peserta yang mengikuti pelatihan Angkatan I diterjunkan di Desa Tunjung Tiga dan Cilaku. Sementara Angkatan II diterjunkan di tiga desa di Kecamatan Kramatwatu yaitu Desa Pegadingan, Pelamunan dan Margasana.

Tujuan praktik lapangan ini untuk memicu masyarakat agar tidak melakukan praktik BAB sembarangan lagi. Hasilnya masyarakat terpicu dan bersama tim fasilitator membuat rencana tindak lanjut (RTL) yang berisi jadwal mulai dan jadwal selesainya kegiatan pembangunan jamban.

Melalui RTL yang disusun oleh peserta, kelompok-kelompok ini akan terus dimonitoring perkembangannya dan terus didampingi untuk memberikan pengaruh kepada warga lain yang belum terpicu. Peserta TOT diharapkan terus melakukan pemantauan dan pendampingan pada desa-desa yang telah dilakukan pemecuan. Juga diharapkan dua pekan setelah pelatihan dan pemecuan usai, Provinsi Banten dapat terbebas dari BAB sembarangan.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Ayip Mufflich menekankan kegiatan ini memberikan pemahaman mengenai STBM kepada seluruh peserta. "Dengan begitu peserta diharapkan dapat menerapkan STBM pada tingkat masyarakat di Provinsi Banten, yang merupakan laboratorium STBM di Indonesia," tuturnya.

Secara umum, TOT ini telah berhasil memberikan pemahaman mengenai teori STBM kepada seluruh peserta yang terlibat. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan rata-rata nilai tes akhir dari nilai tes awal yang dilakukan peserta, yaitu dari 4,7 menjadi 8,1 atau sebesar 72 persen. ■ WIL/WYU

Merasa Malu Ketika Ada Tamu

Tidak biasanya, di pelataran rumah pak RT 01/RW 04 Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, berkumpul belasan warga yang mayoritas ibu-ibu rumah tangga. Sambil berdiri melingkar, mereka mendengarkan beberapa fasilitator memberi pencerahan berkaitan pola hidup bersih dan sehat di desa tersebut.

Sudah sejak puluhan tahun, sebagian besar rumah warga Desa Pelamunan dan desa-desa tetangga tidak memiliki jamban sendiri. Warga melakukan praktik 'dolbon' (dabol di kebon) atau 'dolli' (dabol di kali), tempat yang menurut mereka dirasa aman dan nyaman untuk membuang hajat.

"Kami, warga di sini, kalau mau berak ya langsung turun ke kali ini," tutur Hajanah, warga RT 04/RW 01 Desa Pegadangan kepada **Percik** seraya menun-

jukan Kali Benyu yang berada tepat di belakang rumahnya. Kali yang kotor dan berbau itu menjadi tumpuan hidup warga untuk buang air besar (BAB) setiap hari. Bahkan untuk semua sistem pembuangan kotoran rumah tangga pun di kali itu.

Pada Senin, 14 Juli 2008, puluhan fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang sudah mendapatkan *training of trainer* (TOT) selama tiga hari sebelumnya diterjunkan ke beberapa RT di tiga desa yaitu Desa Pelamunan, Pegadangan, dan Margasana, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.

Keadaan Ekonomi

Sebenarnya, warga sadar dan mengerti arti pentingnya mempunyai jamban sendiri di rumah. Mereka sangat menyadari saat ditanya fasilitator, bagaima-

na ketika ada tamu dan tiba-tiba ingin membuang hajat.

Rasa bingung dan malu tentu menghinggapi perasaan mereka. Apalagi bila si tamu sampai tutup hidung sesudah mencari kakus ke belakang rumah, tapi ternyata tidak ditemukan. "Biasanya kalau ada tamu yang ingin berak, saya bawa ke rumah saudara yang ada kakusnya," ujar Marsiyah, warga RT 01/RW 04 Desa Pelamunan.

Alasan utama yang selalu diungkapkan warga mengapa sampai saat ini belum memiliki jamban keluarga adalah tidak atau belum mempunyai uang. Keadaan ini sebenarnya bukan persoalan warga yang miskin atau tidak mempunyai uang untuk itu. Terbukti, mereka sebagian besar mempunyai rumah yang cukup bagus, bahkan beberapa diantaranya mempunyai sepeda motor. Paling sederhana, hampir semua dari warga mempunyai telepon seluler.

Melihat kenyataan seperti ini, sebenarnya ketiadaan jamban di setiap keluarga bukan semata faktor keadaan ekonomi. Tapi lebih kepada belum adanya kesadaran warga untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat.

Jamban pun tidak harus mewah dengan biaya yang mahal. Cukup yang sederhana disesuaikan dengan kemampuan ekonomi. Untuk apa jamban yang mewah sementara perilaku BAB masih tetap sembarangan.

Ada faktor lain yang menyebabkan warga ketergantungan pada bantuan pemerintah untuk membangun jamban. Ini merupakan bagian dari kesalahan masa lalu dalam penerapan kebijakan yang justru cenderung memanjakan warga. Sementara dalam program STBM, dituntut kemandirian kemampuan dari warga.

Iwa Rasniwa, salah satu fasilitator mengungkapkan tidak mudah mempengaruhi warga untuk bersegera membangun jamban keluarga. "Perlu kesabaran dalam menyelami keadaan dan keinginan warga," katanya. ■ Bowo Leksono



Seorang fasilitator sedang memberikan pencerahan berkaitan pola hidup bersih dan sehat di Desa Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang, Banten. Foto Bowo Leksono

Diskusi Media dan Kampanye Penyehatan Lingkungan



Jejaring AMPL mengadakan Diskusi Media dan Kampanye Penyehatan Lingkungan menyambut Hari Lingkungan Hidup dan Tahun Sanitasi Internasional 2008. Foto Dini Haryati

Media memainkan peranan sangat penting dalam menyebarluaskan informasi. Peran media tidak hanya memberikan informasi bagi masyarakat tapi juga berupaya mempengaruhi masyarakat untuk bertindak lebih baik dalam memahami masalah lingkungan hidup.

Masalah lingkungan hidup kerap hadir dalam pemberitaan media. Namun frekuensinya tidak sebanyak berita mengenai hukum, politik atau masalah sosial lainnya. Banyak alasan yang mengakibatkan hal ini terjadi, diantaranya isu lingkungan hidup yang belum menjadi prioritas utama dan tidak menarik banyak perhatian.

Dengan memanfaatkan momentum Hari Lingkungan Hidup yang jatuh setiap 5 Juni serta sejalan ditetapkannya tahun 2008 sebagai Tahun Sanitasi Internasional oleh PBB, Jejaring AMPL mengadakan Diskusi Media dan Kampanye Penyehatan Lingkungan, sebagai salah satu upaya mensosialisasikan isu lingkungan hidup khususnya penyehatan lingkungan. Diskusi ini juga menjadi ajang pertemuan anggota Jejaring AMPL.

Diskusi yang dilaksanakan pada 12 Juni 2008, di Ruang Sapta Taruna, Departemen Pekerjaan Umum ini dihadiri para pembicara dari berbagai lembaga seperti Program Studi Lingkungan Universitas Indonesia, DAAI TV, WASPOLA dan Jaringan Air dan Sanitasi. Dalam diskusi ini, disampaikan berbagai pengalaman dalam melakukan kampanye penyehatan lingkungan dengan menggunakan media. Selain itu, disampaikan pula pandangan dari pihak media massa yang melakukan kampanye penyehatan lingkungan.

Seperti yang diungkapkan Irena Pretika dari DAAI TV, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi media massa, yakni sering kali kurangnya materi aktivitas pelestarian lingkungan hidup. Kondisi tersebut juga dipersulit minimnya pengetahuan mengenai lingkungan hidup di kalangan wartawan sendiri sehingga memperlama waktu produksi. "Permasalahan ini dapat diatasi dengan menjalin kerjasama antara media dengan sumber-sumber informasi utama, sehingga tercipta kolaborasi yang efektif," ujarnya.

Selain media massa, terdapat media

lain yang cukup efektif yang dapat digunakan yaitu grup media atau lebih dikenal dengan media rakyat. Media rakyat adalah media yang tumbuh dan berkembang sesuai kultur masyarakat setempat. Media ini bersifat komunikatif, tematik, horisontal, dialogis dan demokratis sehingga masyarakat mampu menjawab permasalahan sendiri.

Dalam presentasi yang disampaikan Wiwit Heris dari WASPOLA, dibutuhkan partisipasi multielemen terutama masyarakat untuk efektifitas dan keberlanjutan pembangunan AMPL. "Media rakyat ini sebagai media alternatif dapat digunakan sebagai ruang ekspresi sekaligus mendorong partisipasi publik," katanya.

Penggunaan media massa dan media rakyat memiliki keunggulan masing-masing. Manfred Oepen dari Jaringan Air dan Sanitasi (JAS) menambahkan, riset membuktikan bahwa kombinasi penggunaan media massa, media rakyat dan komunikasi interpersonal merupakan yang paling efektif. Namun penggunaan multimedia (kombinasi media massa, media rakyat dan komunikasi interpersonal) hanya akan berhasil jika materi komunikasi jelas, persuasif dan mudah diingat.

Selain itu, praktisi komunikasi yang terlibat memang memiliki pengalaman yang cukup. Untuk mengukur sejauh mana efektifitas penggunaan media, dapat dilakukan penelitian KAP. Penelitian KAP digunakan untuk mengukur *Knowledge* (pengetahuan), *Attitudes* (sikap) and *Practices* (perilaku) terkait perilaku kritis sekelompok orang dan kelompok lain sebelum dan selama kampanye media.

Dengan diadakannya Diskusi Media dan Kampanye Penyehatan Lingkungan ini diharapkan para pemangku kepentingan AMPL mendapatkan informasi mengenai pilihan-pilihan media yang dapat digunakan dalam kampanye penyehatan lingkungan. Pemilihan media secara tepat menjadikan komunikasi efektif dan persepsi masyarakat akan AMPL pun terbentuk sehingga secara perlahan ada perubahan perilaku masyarakat menjadi lebih baik. ■ DH

Diskusi Masukan Rancangan PP terhadap UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Seiring terbitnya satu produk hukum, tidak serta-merta dapat langsung diimplementasikan. Produk hukum itu akan diikuti dan diatur oleh produk hukum lain yang sifatnya lebih rendah dan sebagai acuan pelaksanaan.

Demikian pula saat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah disahkan pada 9 Mei 2008 lalu, harus menunggu peraturan pemerintah (PP) dan peraturan daerah (Perda) untuk pelaksanaan secara teknisnya. Jangka waktu untuk menerbitkan PP sebagai pedoman pelaksanaan undang-undang (UU) maksimal satu tahun.

Dalam masa perumusan PP, pemerintah melakukan sosialisasi UU tentang Pengelolaan Sampah ke semua kalangan yang terkait dengan pelaksanaan aturan tersebut, seperti kepada para produsen, pmda, LSM serta masyarakat secara luas.

Rentetan diskusi dalam rangka pembahasan PP tersebut telah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan berbagai masukan. Termasuk yang diselenggarakan Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS) yang tergabung dalam Jejaring AMPL pada Selasa, 19 Agustus 2008 di Kantor Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KNLH) Jakarta.

Pada Diskusi Masukan Persiapan Rancangan PP terhadap UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah tersebut hadir Direktur Permukiman dan Perumahan BAPPE-NAS Budi Hidayat dan Asdep Urusan Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik dan USK Kementerian Negara Lingkungan Hidup Tri Bangun Laksono Sony serta peserta diskusi dari berbagai kalangan.

Poin Penting tentang EPR

Budi Hidayat pada sambutannya mengatakan salah satu substansi penting dalam peraturan pemerintah tersebut adalah *extended producer responsibility* (EPR). "Klausul ini mewajibkan bagi pihak yang melakukan produksi barang untuk mengelola sampah yang timbul akibat penggunaan barang tersebut," tuturnya.

Para produsen harus bertanggung jawab terhadap seluruh *life cycle* produk dan/atau kemasan dari produk yang mereka hasilkan.

Dalam konsep ini, lanjut Budi, mekanisme pemulihan lingkungan dilaksanakan oleh produsen barang yang menimbulkan sampah dan produsen bertanggung jawab membiayai seluruh proses pengelolaan sampah yang bersumber dari produksinya. "Semua aturan main tersebut harus tertuang dengan baik dalam Rancangan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah yang saat ini sedang dalam tahap pengerjaan," ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Tri Bangun Laksono Sony memaparkan dengan strategi EPR, para produsen harus bertanggung jawab terhadap seluruh *life cycle* produk dan/atau kemasan dari produk yang mereka hasilkan. "Ini artinya perusahaan yang menjual dan/atau mengimpor produk dan kemasan yang potensi menghasilkan sampah wajib bertanggung jawab, baik secara finansial maupun fisik terhadap produk dan/atau kemasan yang masa pakainya telah usai," jelasnya.

Pasal Terkait

Pada pasal 14 dan 15 UU No. 18 Tahun 2008 secara tegas amanatkan peran dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah. Kedua pasal tersebut menjadi landasan hukum bagi Pemerintah untuk menuntut peran dan tanggung jawab produsen dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.

Sony mengatakan, dalam waktu dekat akan mengundang 200 produsen mie siap saji untuk menyosialisasikan pasal-pasal tersebut. Karena menurutnya, masih banyak pengusaha yang sudah menerapkan prinsip 3R namun dibebankan pada konsumen.

"Bahkan ada perusahaan yang menerapkan CSR (*corporate social responsibility-red*) dalam bidang lingkungan tapi tetap memproduksi barang-barang dengan kemasan yang tak ramah lingkungan. Percuma saja. Undang-undang ini tidak menghendaki seperti itu," tegas Sony.

Menurut Sony, tujuan dari undang-undang tentang Pengelolaan Sampah ini adalah perubahan paradigma melalui perubahan perilaku dalam jangka panjang. "Memilah sampah adalah bagian dari perubahan perilaku yang mungkin terjadi 10 bahkan 15 tahun mendatang," jelasnya.

Hasil dari lokakarya ini kemudian oleh GTPS-Jejaring AMPL akan disampaikan ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup sebagai bahan masukan penyusunan PP. Diperkirakan, pada akhir Desember 2008, draf lengkap peraturan pemerintah sudah harus jadi untuk kemudian diharmonisasi di Departemen Hukum dan HAM, baru satu bulan kemudian diproses di Sekretariat Negara untuk dibahas di DPR. ■ BW

Air ProAir Mengalir di Sumba

Maria Sulipadaka (35 tahun), warga Desa Welonda, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, tak lagi berdarah-darah naik-turun bukit menuju mata air Watulonda yang berjarak sekitar dua kilometer hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Sebuah gerobak tua teronggok di samping rumah, menjadi saksi bisu kerasnya upaya keluarga itu dalam mengakses air bersih.

Sebuah kran air hadir tepat di depan rumahnya. "Kami merasa senang karena sudah tidak capek lagi berjalan sambil menarik gerobak berisi jerigen-jerigen air," kenang Maria, ibu empat anak ini kepada **Percik**.

Hal serupa dialami Ambukaha (16 tahun). Sebelum kran air dibangun di dekat rumahnya, gadis desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, Sumba Barat Daya ini berjalan setiap hari sejauh delapan kilometer menuju mata air Wailoko.

Perempuan dan anak-anak menjadi tulang punggung keluarga dalam memenuhi akses air bersih. Mereka rela waktu produktifnya tersita karena setiap hari berjalan berkilometer menuju mata air. Saat ini, mereka berhak bergembira.

Kegembiraan Maria dan Ambukaha dirasakan pula oleh ribuan warga di tiga kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yaitu Kabupaten Sumba Barat Daya, Sumba Timur, dan Timor Tengah Selatan. Semua ini berkat program penyediaan air melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat atas kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Federal Jerman melalui KFW dan GTZ.

Keberlanjutan Program

Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP



Perempuan dan anak-anak di Sumba sesuai mengambil air dari kran-kran terdekat.
Foto Bowo Leksono

dan PL) Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun mengatakan hal terpenting setelah pembangunan dan pemanfaatan akses air bersih adalah komitmen masyarakat sendiri dan pemerintah daerah setempat. "Bantuan Pemerintah Jerman tidak akan mengucur terus-menerus, karena itu perlu kemandirian masyarakat dan dukungan pemma melalui APBD," tuturnya saat Kunjungan Lapangan Program ProAir di Kabupaten Sumba Barat Daya dan Sumba Timur.

Kunjungan lapangan dilakukan ke beberapa desa penerima program pada 27-30 Juli 2008. Selain Dirjen PP dan PL, rombongan dari pusat diikuti anggota Komisi IX Charles J. Mesang, Direktur Penyehatan Lingkungan Wan Alkadri, Kasubdit Penyehatan Air, Depkes Zainal I. Nampira, Kasubdit Persampahan dan Drainase Bappenas Oswar Mungkasa, Sekretaris Eksekutif ProAir Deni Mulyana,

perwakilan Pemprov, dan perwakilan KFW dan GTZ.

Perwakilan KFW Bjorn Ties mengatakan sudah banyak orang desa yang menikmati air bersih dari kerja keras mereka sendiri. "Inilah kesempatan untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan harapan, 20 tahun mendatang, sarana-sarana air bersih itu masih tetap berfungsi," katanya.

Dalam mengalirkan air kepada warga di seluruh wilayah program ProAir di NTT, diterapkan sistem gravitasi, karena itu letak *reservoir* berada di dataran tinggi. Sementara sumber-sumber mata air berada di hutan yang membutuhkan perlindungan di masa mendatang.

Mata Air di Sumba Barat Daya

Kabupaten Sumba Barat Daya merupakan kabupaten pemekaran dari Sumba

Barat. Salah satu persoalan utama dari kabupaten baru ini dan kabupaten lain di wilayah NTT adalah kurangnya akses warga terhadap air bersih. Dari 241 ribu jiwa penduduk, sekitar 14 persen atau 27 ribu jiwa telah menikmati air bersih dari Program ProAir.

Kunjungan tidak hanya terbatas mendatangi bangunan kran-kran air di sepanjang jalan, namun hingga ke bagian hulu atau sumber mata air. Di lapangan ditemukan fakta beberapa kerusakan jaringan atau kran air disamping persoalan warga yang berlomba-lomba menanam sayur dengan memanfaatkan air yang menyebabkan beberapa warga yang tidak secara maksimal menerima jatah air bersih.

Menurut Distrik Koordinator ProAir Petrus, kerusakan jaringan masih di bawah tanggung jawab kontraktor dan akan ditindaklanjuti enam bulan mendatang. "Sementara untuk warga yang memanfaatkan air untuk menanam sayur memang menjadi persoalan tersendiri karena warga sudah mengabaikan pemakaian air 40 liter per orang per hari," ungkapnya.

Di kabupaten baru ini, rombongan mengunjungi tiga *reservoir* dan tiga mata air di Desa Welonda, Kecamatan Wewewa Barat, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, dan Desa Pala, Kecamatan Wewewa Utara. Rombongan juga sempat berdialog bersama warga untuk mendapatkan masukan dari warga tentang program ini.

Menanggapi pernyataan wakil KFW tentang peran aktif warga dan pemerintah daerah, Penjabat Bupati Sumba Barat Daya Emanuel B. Eha mengatakan pihaknya bersama DPRD berkomitmen untuk membantu warga berkenaan dengan anggaran dan keberlanjutan kebutuhan air bersih bagi warganya. "Sebagai kabupaten baru, kami juga membutuhkan bantuan dan dukungan dari semua pihak," ungkapnya.

Meskipun tidak melakukan kunjungan ke desa-desa di wilayah Sumba Barat, rombongan sempat dijamu Bupati Sumba Barat Julanus Pateleba. Bagaimana pun, desa-desa di Kabupaten Sumba



Seorang ibu mengambil air di kran yang tak jauh dari tempat tinggalnya di Desa Laindeha, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Foto Bowo Leksono

Hadirnya air bersih di rumah warga mampu meningkatkan kualitas kesehatan. Kesadaran terhadap kesehatan pun meningkat. Terbukti, di Kelompok Sarana Air Bersih (SAB) Nduma Luri Desa Laindeha melakukan arisan jamban.

Barat Daya pada awal program ProAir masih berada di bawah wewenang Kabupaten Sumba Barat.

Air Mengalir di Padang Rumput Savana

Semilir angin tak mampu menahan teriknya matahari di bumi Sumba Timur. Apalagi saat itu memasuki musim kemarau, dimana rumput nan luas terlihat coklat yang berarti tak lagi hujan turun membasahi bumi.

Siapa mengira di dataran tinggi nan tandus itu, air ProAir hadir memenuhi kebutuhan warga di Desa Laindeha, Kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur. Warga, meskipun tidak jauh

dalam mengambil kebutuhan air dari mata air, sudah bisa menikmati air secara lebih dekat.

Hadirnya air bersih di rumah warga mampu meningkatkan kualitas kesehatan. Kesadaran terhadap kesehatan pun meningkat. Terbukti, di Kelompok Sarana Air Bersih (SAB) Nduma Luri Desa Laindeha melakukan arisan jamban.

Setiap bulan Rp 400 ribu berhasil dikumpulkan dari delapan KK yang masing-masing menyeter Rp 50 ribu. Setiap tanggal 30, satu KK mendapat jatah bangunan jamban di belakang rumah dari uang arisan tersebut. "Kami membangun jamban secara beramai-ramai," kata Maria Harabih (33 tahun) yang mengaku sebelum ada jamban buang air besar di rerumputan.

Wakil Bupati Sumba Timur Gidion Mbilijora mengakui model program ProAir dalam memenuhi kebutuhan dasar warganya. "Meskipun dalam pelaksanaan dan pemeliharaan sarana diserahkan sepenuhnya pada masyarakat, tapi kami tidak akan tinggal diam bila warga membutuhkan bantuan pemda," janjinya. ■ Bowo Leksono

Dirjen PP dan PL Departemen Kesehatan
Dr. I Nyoman Kandun, MPH

"Air Menjadi Dasar PHBS"

Tak hanya sampai di reservoir (tempat penampungan air), seorang pejabat eselon I, terus menelusuri jalan setapak dan licin yang di bagian kanannya jurang untuk menuju hulu air. "Saya malu dengan orang desa bila tidak mampu sampai ke mata air. Di sini, orang-orang yang usianya jauh di atas saya setiap hari turun naik mengambil air," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (PP dan PL) Departemen Kesehatan I Nyoman Kandun saat kunjungan lapangan program ProAir di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), 27-30 Juli 2008.

Tiga lokasi mata air di Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu di Desa Welonda, Kecamatan Wewewa Barat, Desa Waiholo, Kecamatan Kodi Utara, dan Desa Pala, Kecamatan Wewewa Utara, semuanya tak luput dari kunjungan Dirjen yang kini memasuki usia 60 tahun.

Bersama rombongan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM, dan negara donor yaitu Pemerintah Federal Jerman, Nyoman juga bertatap muka dan berdialog bersama warga. Ia memberi penjelasan dan bertukarpikiran tentang pentingnya air bersih bagi kehidupan.

Bumi, kata Nyoman, bisa dihuni karena ada oksigen dan air. Air bukanlah segala-galanya tapi tanpa air segala-galanya bukan apa-apa. "Kita bisa tahan tiga hari tanpa makan, tapi akan mati bila selama tiga hari tanpa minum," tutur pejabat yang sebentar lagi memasuki masa pensiun ini di depan puluhan warga.

Daya Jangkkit

Kata-kata bijak 'bersih pangkal sehat' seperti tak lekang ditelan jaman. Nyoman mengatakan bahwa air bersih tidak hanya untuk kebutuhan makan dan minum tapi juga untuk kesehatan seperti membersihkan badan dan cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Air yang tidak sehat atau air kotor, kata Nyoman, adalah penyebab bermacam penyakit menular seperti diare dan malaria. "Air mempunyai daya jangkkit

selesai bubar semua. Atau seperti sinterklas yang dengan enteng membagikan hadiah tanpa ada rasa memiliki bagi yang menerimanya," tutur ayah dua putri ini.

Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Sudah tidak musim di jaman sekarang, membangun akses kebutuhan dasar masyarakat dengan pola sinterklas. "Pendekatan yang bagus yaitu dengan

memberdayakan masyarakat. Yaitu mulai dari perencanaan, pembangunan, pengelolaan, serta pemeliharaan diserahkan kepada masyarakat. Biarkan masyarakat berproses, tugas pemerintah hanya memfasilitasi," tutur Nyoman.

Nyoman mencontohkan, ProAir adalah salah satu program yang dilaksanakan dengan sistem *bottom up* (bawah ke atas) yang memberi kesempatan secara luas kepada masyarakat. "Di Sumba ini, sumber air ada dan bagaimana

membawa air kepada masyarakat dan tentu masyarakat sendiri yang akan melakukannya," ungkap Dirjen yang suka berolahraga ini.

Nyoman mengatakan, dalam menjaga kesehatan lingkungan, jangan dari hilirnya yang berarti bagaimana memberantas penyakit-penyakit menular. Tapi langsung dari hulunya seperti ketersediaan akses air bersih bagi keluarga. "Saya berpesan agar masyarakat dapat mengoptimalkan Pokja AMPL yang sudah dibentuk untuk turut membina dan mendampingi masyarakat dalam memperoleh akses air minum dan penyehatan lingkungan," ujar lelaki yang hobi meniup harmonika ini. ■ Bowo Leksono



Dr. I Nyoman Kandun, MPH. Foto: Bowo Leksono.

yang tinggi, karena itu air menjadi dasar dari perilaku hidup bersih dan sehat," tutur dokter lulusan Universitas Gajah Mada ini.

Dibanyak kesempatan, Nyoman kerap kali bicara tentang Inpres Nomor 5 Tahun 1974 tentang SAMIJAGA (Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga). Ia adalah pengemban tugas dari inpres tersebut saat kejadian KLB kolera di Jambi tepatnya di sepanjang Sungai Batanghari selama tujuh tahun.

Di masa Orde Baru, kata Nyoman, pelaksanaan inpres dengan cara membagi-bagikan jamban kepada warga. "Seperti sebuah pasar malam, setelah

Diskusi

Akses Air Bersih untuk Masyarakat Miskin

Ada 1001 permasalahan air bersih di Indonesia. Demikian menurut Jim Woodcock, seorang konsultan *water and sanitation* Bank Dunia. Ia berpengalaman dibidang proyek desain survai dan uraian pengalaman terbaik dalam akses air bersih untuk masyarakat miskin di Indonesia dan Asia Tenggara.

Jim mengatakan, bila masyarakat miskin mudah mengakses air bersih berupa sambungan rumah dari PDAM, mereka mampu menghemat hingga 12 persen pendapatan. "Kesejahteraan tentu meningkat, karena itu

sambungan rumah ini seperti halnya kekayaan," ungkapnya saat Diskusi Media bertema "Akses Air Bersih untuk Masyarakat Miskin", Rabu, 18 Juni 2008, di Jakarta.

Diskusi panel yang menghadirkan enam pembicara itu digagas USAID/*Environmental Services Program* (ESP) berkerja sama dengan TEMPO Media Group. Banyak hal terungkap dalam diskusi yang juga menghadirkan Mantan Duta Besar MDGs untuk Asia Pasifik Erna Witoelar.

Menurut Erna, akses air bersih dan sanitasi dalam konteks Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) yang masuk dalam Tujuan 7 Target 2 berbunyi 'akses air bersih dan sanitasi yang layak', terkait semua target dan tujuan MDGs lainnya. Ia menekankan tidak hanya akses air bersih semata yang dibutuhkan masyarakat, namun juga sanitasi yang tak bisa dipisahkan.

Lebih lanjut, Erna menilai kebijakan dalam bidang air minum dan sanitasi dasar belumlah optimal yang mampu menjangkau kaum miskin dan kawasan terpencil. "Perlu pendekatan yang tidak selalu berbau birokratis," tuturnya.



Diskusi Media "Akses Air Bersih untuk Masyarakat Miskin", 18 Juni 2008, di Jakarta, digagas USAID/Environmental Services Program (ESP) berkerja sama dengan TEMPO Media Group. Foto: Bowo Leksono.

Regulasi Akses Air Bersih

Dari pihak pemerintah, diskusi menghadirkan Kepala Sub Direktorat Persampahan dan Drainase, Direktorat Permukiman dan Perumahan BAPPENAS Oswar Mungkasa. Ia memaparkan, air minum dan sanitasi adalah hak asasi manusia untuk mencapai kehidupan yang berkualitas seperti yang tercantum pada Rencana Aksi Mar del Plata PBB tahun 1977.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air tersurat dengan jelas bahwa Negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari-hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.

Pada kenyataannya, ujar Oswar, baru 58 persen penduduk Indonesia mendapatkan air yang layak. "Sementara masih sekitar 100 juta penduduk Indonesia belum mengakses kebutuhan air yang layak," katanya.

Menurut Oswar, selama ini fokus pembangunan air minum dan sanitasi lebih pada penyediaan fasilitas dan bukan pelayanan, akibatnya banyak fasilitas yang tidak berumur panjang. "Disamping itu, penduduk miskin belum

menjadi perhatian khusus disamping keterlibatan masyarakat yang sangat terbatas. Tampak kesenjangan antara regulasi dan praktek di lapangan," tuturnya.

Sejak Juni 2003, lanjut Oswar, pemerintah menelurkan Kebijakan Nasional Pembangunan Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM). "Inti dari kebijakan itu memberi fokus pada pelibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan AMPL, memberi perhatian pada penduduk mis-

kin, serta mengedepankan pembangunan berwawasan lingkungan," ungkapnya.

Terobosan Pemenuhan Akses Air Bersih

Praktik terbaik untuk pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat dicontohkan oleh PDAM Tirtanadi, Medan, Sumatera Utara yang menerapkan program *Master Meter*. Program ini untuk meningkatkan akses air bersih perpipaan bagi masyarakat luas. "Sampai sekarang, PDAM Tirtanadi menjangkau hingga sembilan kabupaten di Sumatera Utara," tutur.

Sementara di Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Sidoarjo menerapkan sistem Kredit Mikro, yaitu pinjaman untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mampu membayar secara tunai di muka untuk memasang pipa PDAM. "Program ini hasil kerjasama ESP dan pihak bank seperti BRI dan Bank Jatim," tutur *Micro Credit Specialist* of ESP Gusril Bahar.

Menurut Widi Prayitno, masyarakat pengguna kredit mikro, dengan sistem ini, terasa penghematan biaya belanja keluarga. "Disamping kenyamanan tinggal di rumah dengan menerapkan perilaku hidup sehat," ujarnya. ■ BW

WASH Cluster

Menelisik Kegiatan Tanggap Darurat Bencana pada Aspek AMPL di Indonesia

Pendekatan Cluster

Sudah sangat umum bahwa Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan potensi bencana alam yang sangat besar di dalamnya. Dengan tingginya frekuensi terjadinya bencana alam di Indonesia, kegiatan kebencanaan pada pra-bencana, saat bencana, maupun pas-bencana menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan di Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah semakin menyadari kondisi ini, sehingga kini kegiatan kebencanaan itu semakin menjadi esensial dan terintegrasi ke dalam pembangunan wilayah secara umum, khususnya bagi beberapa daerah rawan bencana di Indonesia.

Dalam rangka memberi dukungan kepada Pemerintah Republik Indonesia dalam hal tanggap darurat bencana alam, *United Nations Office for the Coordination of the Humanitarian Affairs* (UN-OCHA), sebuah badan PBB yang berperan sebagai wadah koordinasi pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, mengambil langkah dengan melakukan pembentukan 10 unit cluster di Indonesia. Kesepuluh unit cluster ini secara spesifik berfungsi sebagai wadah koordinasi bagi seluruh pemangku kepentingan yang bergerak pada berbagai aspek dibidang tanggap darurat bencana di Indonesia.

Pembentukan *cluster* ini diinisiasi oleh UN-OCHA untuk kepentingan tanggap darurat pada saat terjadi gempa bumi di Provinsi Yogyakarta tahun 2005 silam. Hingga saat ini, *cluster* yang notabene terdiri dari NGO asing dan lembaga PBB tersebut masih tetap eksis dan semakin memperkuat diri, serta menjadi bagian penting dalam kegiatan tanggap darurat bencana di seluruh wilayah Indonesia. Sebut saja ketika terjadi bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah di



Dalam kondisi tanggap darurat bencana, bantuan kemanusiaan akan sangat dinantikan.
Foto: Istimewa.

Indonesia, atau saat terjadi gempa bumi pada wilayah hamparan lempengan di pesisir barat Pulau Sumatra, serta pada saat Kejadian Luar Biasa (KLB) Diare di pelbagai wilayah di Papua, masing-masing anggota dari tiap *cluster* ini bergerak menanggapi bencana dibawah naungan koordinasi UN-OCHA.

Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) Cluster

Dari kesepuluh *cluster* yang ada, salah satunya adalah *cluster* yang bergerak pada kegiatan tanggap darurat dalam bidang air minum dan penyehatan lingkungan (AMPL). Saat ini, *cluster* tersebut lebih dikenal sebagai WASH Cluster. Sama halnya dengan sembilan

cluster yang lain, WASH Cluster mayoritas beranggotakan NGO asing dan lembaga PBB yang bergerak di bidang AMPL, sedangkan UNICEF berperan sebagai koordinator dari *cluster* ini.

Dalam masa tanggap darurat bencana, setiap anggota WASH *cluster* berperan untuk menyediakan air bersih dan sanitasi dasar, serta melakukan promosi kesehatan bagi penduduk yang terkena dampak dari bencana. Semua kegiatan tersebut tentunya menggunakan konsep pendekatan tanggap darurat bencana.

Melalui penyediaan air bersih dan sanitasi dasar, WASH Cluster bertujuan untuk mencegah mewabahnya penyakit yang terkait dengan air dan sanitasi, serta

lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan dan memulihkan kondisi psikologi seluruh penduduk yang terkena dampak bencana.

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, WASH *cluster* terus berperan aktif dalam menyediakan air bersih dan sanitasi dasar serta promosi kesehatan bagi penduduk yang merupakan korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui pendekatan tanggap darurat bencana, masing-masing anggotanya membangun berbagai jenis fasilitas air bersih dan sanitasi yang pada umumnya lebih bersifat massal dan bersifat pemenuhan sementara bagi masyarakat yang kehilangan akses akan air bersih dan sanitasi sebagai akibat dari bencana yang terjadi. Hal itu mengingat penyediaan air bersih dan sanitasi tersebut sebagian besar dilakukan pada wilayah-wilayah pengungsian atau tempat tinggal sementara bagi penduduk korban bencana.

Lebih jelas, jika kita melihat bangunan-bangunan tandon air pada barak pengungsian, ataupun sarana MCK umum pada tenda-tenda tempat korban bencana alam, serta mobil truk pengangkut air yang hilir mudik di area pascabencana, itu adalah salah satu bagian dari kegiatan tanggap darurat yang dilakukan oleh WASH *Cluster* selama ini.

Tanggap Darurat di Bidang AMPL

Dalam waktu dua tahun pascapembentukan WASH *Cluster* di Indonesia, sangat dirasakan bahwa kebutuhan akan kegiatan tanggap darurat bencana di Indonesia semakin tinggi, yaitu linear dengan terjadinya bencana di Indonesia. Bencana dari yang paling kecil hingga yang besar dan bersifat Bencana Nasional, seluruhnya membutuhkan pemulihan dalam aspek AMPL.

Kondisi di lapangan saat ini menunjukkan bahwa kegiatan tanggap darurat bencana yang dilakukan oleh WASH *Cluster* masih bersifat sporadis, terpisah-pisah antara satu sama lain, dan tidak menggunakan pendekatan yang sama serta belum ada standar kualitas yang disepakati untuk diacu bersama. Meskipun saat ini sudah ada sebuah dokumen

standar resmi penyediaan AMPL pada masa bencana yang disebut SPHERE Project Standard, namun belum seluruh anggota *cluster* mengacu kepada standar tersebut serta masih adanya persepsi yang berbeda-beda.

Dirasakan juga oleh setiap anggota WASH *Cluster* bahwa semakin meningkatnya frekuensi pelaksanaan tanggap darurat bencana, maka semakin dibutuhkannya sebuah *Grand Strategy* yang bersifat menyeluruh dan dapat dijadikan sebagai acuan pelaksanaan tanggap darurat bencana di bidang AMPL. Oleh karenanya, pada tahun 2007 berbagai wacana ini kemudian bermuara pada sebuah kehendak untuk menyusun sebuah Rencana Kontijensi WASH *Cluster*, yang didalamnya memuat seluruh aspek yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan tanggap darurat di bidang AMPL pada wilayah yang terjadi dan rawan bencana di seluruh Indonesia.

Dalam kurun waktu dua tahun pascapembentukan WASH Cluster, sangat dirasakan kebutuhan akan kegiatan tanggap darurat bencana di Indonesia yang semakin tinggi.

Penyusunan Rencana Kontijensi WASH Cluster

Berdasarkan definisi yang dipresentasikan oleh perwakilan UN-OCHA, Rencana Kontijensi dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang mengandung tujuan yang jelas, strategi secara komprehensif, kebijakan, prosedur, dan pengartikulasian tindakan yang bersifat kritis yang harus dilakukan untuk merespon keadaan bencana.

Secara praktis, Rencana Kontijensi merupakan sebuah rencana menyeluruh pada aspek tanggap darurat bencana di seluruh bidang. WASH *Cluster* sendiri saat ini sedang dalam proses penyusunan Rencana Kontijensi yang secara spesifik

membahas tentang kegiatan tanggap darurat bencana di bidang AMPL.

Pada Januari 2008, UN-OCHA membuka titik awal pembahasan penyusunan Rencana Kontijensi untuk seluruh *cluster* yang ada di Indonesia. Untuk WASH *cluster* sendiri penyusunan Rencana Kontijensi yang secara formal mulai dilakukan pada Mei 2008. Seluruh anggota WASH *Cluster* dan juga berbagai pemangku kepentingan di bidang AMPL berkumpul di Yogyakarta untuk mendiskusikan tentang penyusunan Rencana Kontijensi WASH *Cluster*.

Secara lebih rinci, draft Rencana Kontijensi WASH *Cluster* Indonesia ini mengakomodasi permasalahan mengenai langkah-langkah pelaksanaan tanggap darurat yang harus dilakukan, permasalahan mengenai koordinasi dan pelibatan unsur pemerintah, keterkaitan pelaksanaan tanggap darurat dengan 9 (Sembilan) *cluster* lainnya, hingga rencana pengembangan pengorganisasian WASH *cluster* ini sendiri.

Tentunya harapan dari tiap anggota WASH *Cluster* adalah Rencana Kontijensi WASH *Cluster* dapat menjadi acuan yang dapat digunakan dalam melaksanakan tanggap darurat di bidang AMPL yang selama ini belum dilakukan secara komprehensif. Hal ini sangat penting, mengingat kegiatan tanggap darurat bencana di negeri ini sudah menjadi sebuah kegiatan rutin seiring dengan kerap kali terjadinya bencana alam di berbagai wilayah.

Secara statistik, pada tahun 2007 terjadi 221 kejadian alam yang dapat dikategorikan bencana baik minor maupun major, termasuk 196 gempa bumi di dalamnya. Dengan kondisi seperti itu, Indonesia cukup pantas untuk disebut sebagai *Paradise of Disaster* (surga bencana). Oleh karenanya, rutinitas tanggap darurat dengan frekuensi yang tinggi harus dilakukan, dan Rencana Kontijensi WASH *Cluster* adalah panduan yang dapat dijadikan untuk optimalisasi pelaksanaan tanggap darurat pada bidang AMPL di Indonesia.

Kita lihat kelanjutan kiprah dari WASH *Cluster* selanjutnya. ■ WYU

Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes (B4M) Sektor AMPL Menjadi PR Paling Besar

Persoalan air minum dan sanitasi merupakan pekerjaan rumah yang paling besar yang harus segera diatasi. Persoalan ini tidak cukup diselesaikan hanya satu pihak atau satu departemen saja. Harus diatasi lintas departemen yang bersinergi bersama masyarakat dan *stakeholder* lainnya.

Setidaknya itulah yang termaktub pada saat produksi program televisi Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes (B4M), Rabu, 16 Juli 2008, di sebuah studio di Jakarta. Program acara ini dalam upaya memberikan informasi tentang pembangunan kesehatan dan kebijakan bidang kesehatan, melalui Pusat Komunikasi Publik Departemen Kesehatan.

Talkshow yang mengangkat topik "Sanitasi dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)" itu menghadirkan narasumber antara

lain Koordinator Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) Oswar Mungkasa, Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat Juliarti DJ, Kepala Puskesmas Lembak, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan P. Augustine Siahaan dan beberapa narasumber lainnya.

Dalam kesempatan itu, Oswar

Mungkasa memperkenalkan Pokja AMPL yang merupakan forum lintas departemen dan bekerjasama dengan berbagai *stakeholder* dalam penyediaan informasi seputar AMPL dan pengembangan program STBM.

Sementara Juliarti DJ dan P. Augustine Siahaan berkisah keberhasilan perubahan perilaku masyarakat di wilayahnya. Keberhasilan itu tidak terlepas dari program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dan dua wilayah yaitu Kabupaten Muara Enim dan Sambas merupakan wilayah pertama penerapan STBM.

Pada kesempatan itu, Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menegaskan bahwa keberhasilan bidang sanitasi dan air bersih untuk menuju perilaku hidup bersih dan sehat. "Tanpa kesadaran masyarakat dalam merubah pola pikir, mustahil perilaku hidup bersih dan sehat akan terwujud," tegasnya. ■ BW



Pengambilan gambar untuk program acara Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes (B4M). Foto Bowo Leksono

Kabupaten Sambas Menganggap Penting Penerapan STBM

Ketika Pemerintah Daerah Kalimantan Barat beberapa kali menyelenggarakan pelatihan *Community-Led Total Sanitation* (CLTS) yang kemudian diadopsi menjadi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM), Kabupaten Sambas adalah kabupaten yang tidak pernah diundang dalam pelatihan tersebut.

Namun dengan tidak mepedulikan undangan, Pemerintah Kabupaten Sambas tetap mengirimkan perwakilan untuk hadir. "Kami merasa pelatihan STBM ini sangat perlu bagi daerah kami karena itu kami tidak pernah absen menghadiri pelatihan itu," kenang Wakil Bupati Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat Juliarti DJ kepada *Percik* saat ditemui disela-sela pengambilan gambar program televisi Bincang-Bincang Bareng Bu Menkes (B4M).

Terpilih menjadi salah satu kabupaten percontohan penerapan program STBM pada tahun 2005 merupakan suatu penghargaan bagi Kabupaten Sambas. Sampai pada akhirnya, kabupaten ini mampu menurunkan angka kesakitan yang berarti masyarakat mulai sadar terhadap PHBS.

Penerapan program STBM diawali pembongkaran besar-besaran terhadap jamban-jamban yang banyak berderet di sepanjang bantaran sungai Segaro di Sambas atau yang lebih dikenal dengan jamban helikopter. Lebih dari 500 jamban sepanjang lima km yang melintasi tiga desa saat itu lenyap dari pandangan mata.

Kemana warga dalam melakukan BAB? "Mereka membangun jamban dengan kemampuan sendiri. Hingga saat ini, sudah lebih dari 3.600 jamban berhasil dibangun warga yang tersebar di lima kecamatan," tutur Juliarti.

Keberhasilan masyarakat Kabupaten Sambas menuntut pemerintah daerah untuk memberikan *reward*. Bentuknya adalah bantuan dana kepada 183 desa sebesar Rp 2 juta hingga Rp 10 juta yang dialokasikan dari APBD untuk pelaksanaan program Desa Siaga, termasuk didalamnya pemenuhan akses air bersih dan sanitasi. "Tahun ini, Kabupaten Sambas mampu terlepas dari julukan kabupaten tertinggal," ungkap mantan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dengan bangga. ■ BW

MURI untuk Praktik CTPS di Tangerang



Bupati Tangerang Ismet Iskandar menerima penghargaan MURI terkait praktik CTPS terbesar yang diikuti 3.000 peserta. Foto Bowo Leksono

Sekitar 3.000 orang memadati lapangan di Kecamatan Sepatan, Kabupaten Tangerang. Mereka tidak sedang menonton sepakbola atau kegiatan olahraga lainnya. Masyarakat Tangerang yang sebagian besar anak-anak sekolah dasar, secara bersama-sama mempraktikkan cuci tangan pakai sabun (CTPS), Minggu, 3 Agustus 2008.

Meskipun peserta hanya separuh dari target yang ditetapkan yaitu 7.500 orang yang terdiri dari 3.000 siswa sekolah dan 4.500 masyarakat dari 34 sekolah dasar, 43 desa di 10 kecamatan di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, namun Museum Rekor Indonesia (MURI) tetap mencatat sebagai peristiwa unik di bidang kesehatan.

Acara yang digagas Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, CARE Internasional Indonesia bersama USAID ini juga dihadiri Bupati Tangerang Ismet Iskandar, Kepala Dinas Kesehatan Hani Herianto, Direktur Penyehatan Lingkungan Departemen Kesehatan Wan Alkadri, perwakilan negara donor serta delegasi pemerintah Vietnam dan Laos yang kebetulan sedang berkunjung ke

Indonesia.

Bupati Ismet Iskandar menegaskan bahwa masyarakat Tangerang belum melaksanakan secara baik dan benar praktik CTPS, maka kampanye ini harus terus berkesinambungan. "Saya menaruh apresiasi dan harapan yang besar terhadap derajat kesehatan masyarakat Tangerang," ucapnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Hani Herianto mengatakan jumlah angka pesakitan di

Kabupaten Tangerang 22.362 atau 45 persen dari angka kejadian penyakit. "Penyebab utama besarnya angka pesakitan ini adalah minimnya akses air bersih dan minimnya kepedulian masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS-red)," terangnya.

Puncak Kampanye CTPS

Seperti diketahui, Sepatan merupakan kecamatan di Kabupaten Tangerang yang hampir setiap tahun mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) berupa penyakit diare yang banyak menyerang anak-anak.

Untuk itulah, penyadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) sangat penting dengan melakukan kampanye PHBS secara terus-menerus. Kegiatan kampanye sudah dimulai sejak Februari hingga Juni 2008. Sementara acara puncaknya adalah dengan mempraktikkan CTPS secara serentak yang kemudian berhasil dicatat dalam MURI.

Direktur Penyehatan Lingkungan Depkes Wan Alkadri mengatakan CTPS ini merupakan gerakan yang sangat baik dan mendasar dalam PHBS. "Walau kelihatan sederhana tapi CTPS dapat melakukan pencegahan terhadap bermacam penyakit," tegasnya.

Hidup bersih dan sehat menurut Wan Alkadri merupakan kebutuhan pribadi, keluarga dan masyarakat secara luas. "Semua ini bisa dilakukan bila semua pihak melakukan kerjasama yang baik," katanya. ■ BW

Ibu yang Mengajarkan

Mohammad Fahrul Rozi, siswa yang masih duduk di kelas IV Sekolah Dasar Negeri 3 Sepatan terlihat ceria bersama teman-teman sebayanya usai mempraktikkan cuci tangan pakai sabun secara massal.

Fahrul datang bersama ibunya yang kerap mengingatkannya untuk selalu cuci tangan pakai sabun di rumah. "Saya biasa cuci tangan karena ibu saya yang mengajarkannya," katanya seraya menunjukkan

dimana ibunya berada. Fahrul pun berjanji untuk mengabarkan pengalaman ini kepada teman-teman, saudara, dan masyarakat.

Ternyata hanya sekitar 20 detik untuk bisa hidup bersih dan sehat yaitu dengan CTPS.

Karena dengan CTPS yang baik setiap hari akan mampu menyelamatkan keluarga dari penyakit. Maka dari itu, mari kita cuci tangan pakai sabun tiap hari untuk kualitas hidup keluarga. ■ Bowo Leksono

Kredit Mikro untuk Air Minum

Rendahnya cakupan jaringan air minum disebabkan pengoperasian yang tidak efisien dan investasi yang tidak memadai untuk infrastruktur air baru. Pihak yang melakukan ekspansi layanan penyedia air yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tidak menjamin peningkatan akses terhadap air minum bagi rumah tangga terutama yang berpenghasilan rendah.

Ada biaya sambungan baru yang harus dibayar di muka yang tidak mampu dibayar oleh sebagian besar keluarga. Bayangkan, biaya sambungan bisa mencapai kisaran Rp 1 juta hingga Rp 2 juta. Akibatnya, meskipun tersedia akses jaringan air, banyak keluarga yang tidak melakukan sambungan.

Kerjasama PDAM dan ESP

Untuk meringankan biaya sambung baru bagi rumah tangga, *Environmental Service Program* (ESP) bekerjasama dengan bank dalam negeri dan PDAM menciptakan skema kredit mikro yang dapat memberikan pinjaman kecil kepada calon pelanggan yang ingin memperoleh sambungan air rumah tangga tapi tidak dapat membayar sekaligus biaya sambung barunya.

Menurut *Municipal Finance Specialist* ESP Gusril Bahar, kredit mikro untuk air minum ini adalah sebuah skema pendanaan alternatif skala kecil yang mengutamakan seleksi kelayakan secara teknis perbankan kepada calon penerima kredit. "Sebelumnya dianalisa kelayakan teknis PDAM yaitu kapasitas, kualitas, dan kontinuitas untuk memberikan layanan sambungan air kepada calon pelanggan/calon debitur," tuturnya kepada **Percik**.

Setelah skema kredit mikro diadakan antara PDAM dengan bank, lanjut Gusril, calon pelanggan dapat memperoleh pinjaman antara Rp 400 ribu hingga Rp 3 juta untuk jangka waktu maksimal dua tahun.

Proses Kredit Mikro

Gusril menjelaskan langkah awal dengan mengadakan Perjanjian Induk Kredit Mikro antara PDAM dan kantor cabang dari bank setempat. "Perjanjian tersebut mengatur pedoman proses kredit mikro, termasuk tanggung jawab masing-masing pihak," katanya.

Begitu pedoman terbentuk, tutur Gusril, ESP menyelenggarakan pelatihan internal dan PDAM membuka rekening di bank yang menjadi mitranya. "Kemudian, calon pelanggan dapat mulai mengajukan permohonan memperoleh pinjaman kecil untuk membayar biaya penyambungan," jelasnya.

Hasil yang Telah Dicapai

Hingga pertengahan 2008, ESP telah memfasilitasi pembentukan program

kredit mikro untuk sambungan baru di 10 PDAM di Pulau Jawa. PDAM dimaksud adalah PDAM Kota Surabaya, PDAM Kabupaten Sidoarjo, PDAM Kota Malang, PDAM Kabupaten Malang, PDAM Kota Sukabumi, PDAM Kabupaten Subang, PDAM Kota Bogor, PDAM Kabupaten Sukabumi, dan PDAM Kabupaten Bandung.

Program Kredit Mikro yang dikembangkan ESP untuk calon pelanggan air minum PDAM ini sudah sejak Mei 2006 dan akan berlangsung sampai akhir proyek ESP pada September 2009. Tercatat, Kota Sidoarjo dan Surabaya merupakan kota yang paling berhasil dalam memanfaatkan kredit mikro untuk membiayai sambungan baru karena pendekatan mereka yang luwes. ■ BW

Widi Prayitno, warga Perumahan Jenggolo Asri, Sidoarjo

Bagaimana awal mendapatkan Program Kredit Mikro?

Pada akhir 2006, kami mengajukan permohonan pasang baru air PDAM, namun PDAM belum bisa memenuhi karena belum ada jaringan pipa distribusinya. Kemudian ditawarkan program itu dan kami tawarkan ke warga lain. Ternyata mereka antusias. Hanya dalam waktu tiga bulan, air PDAM sudah mengalir di perumahan kami.

Bagaimana perbandingan saat belum terpasang air PDAM?

Warga membayar rekening bulanan kepada pihak PDAM antara Rp 25 ribu hingga Rp 70 ribu setiap bulan. Ini tergolong murah bila dibanding membayar rekening listrik saat masih menggunakan pompa air.



Warga Perumahan Jenggolo Asri, Sidoarjo, Jawa Timur menikmati air PDAM berkat Program Kredit Mikro. Foto Istimewa

Apa manfaat yang dirasakan?

Warga mulai dapat menerapkan perilaku hidup sehat dengan cara mandi dua sampai tiga kali sehari. Disamping alat-alat rumah tangga dan kamar mandi yang tidak lagi berwarna kuning. Hal ini juga menghemat biaya belanja keluarga karena biaya perawatan menurun sehingga kenyamanan untuk tinggal di rumah pun semakin baik. ■ Bowo Leksono

Pertanyaan dapat disampaikan melalui redaksi Majalah *Percik*
Kontributor: Sandhi Eko Bramono (Sandhieb@yahoo.com), Lina Damayanti (Ldamayanti@yahoo.com)

Kualitas Flok

Tanya

Saya adalah salah seorang operator Instalasi Pengolahan Air Minum di Kebumen, Jawa Tengah. Seringkali saya menemukan kualitas flok yang kurang padat, sehingga sulit diendapkan di bak sedimentasi. Setelah saya mencoba mencari tahu, saya mengetahui bahwa pembubuhan kaporit atau $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ bersamaan dengan koagulan, dapat memperbaiki kualitas flok. Apakah hal ini memang dapat terjadi?

(Buyung, Kebumen)

Jawab

Pembubuhan kaporit atau $\text{Ca}(\text{ClO})_2$ bersamaan dengan proses koagulasi, memang betul dapat meningkatkan kualitas flok. Hal ini dikarenakan terdapat peningkatan beda potensial antara partikel dalam air dengan koagulan yang ditambahkan, sehingga partikel lebih mudah untuk terdestabilisasi serta membentuk ikatan flok yang semakin kuat.

Dengan ikatan flok yang kuat dan semakin padat, akan mengakibatkan kinerja di bak sedimentasi yang akan meningkat pula. Selain itu, pembubuhan kaporit di awal seperti ini, atau yang lebih dikenal sebagai preklorinasi, akan meningkatkan umur teknis media filter, karena akan terjadi pencucian butiran media filter oleh kaporit, khususnya dalam menghilangkan biofilm atau lumut yang mungkin tumbuh di antara butiran media filter, sehingga penggantian media filter dapat dilakukan dengan lebih jarang.

Namun preklorinasi juga berakibat pada pembentukan senyawa Tri Halo Methane (THM) yang berpotensi sebagai senyawa karsinogenik (senyawa pencetus penyakit kanker), jika klor yang terdapat dalam kaporit bereaksi dengan senyawa organik di dalam air. Oleh karenanya, preklorinasi tidak cocok untuk diterapkan pada air baku yang memiliki kan-

oleh:
Sandhi Eko Bramono, S.T., MEnvEngSc*

dungan senyawa organik yang tinggi. THM dapat dihilangkan dengan proses adsorpsi dengan menggunakan *Granular Activated Carbon (GAC)*.

Kehilangan Air

Tanya

Saya adalah salah seorang operator Instalasi Pengolahan Air Minum di Gunung Sitoli, Nias, Sumatra Utara. Saya ingin menanyakan, berapakah kehilangan air yang diizinkan dalam suatu Instalasi Pengolahan Air Minum (unit produksi)?

(Rajagukguk, Gunung Sitoli)

Jawab

Kehilangan air pada unit produksi di instalasi pengolahan air minum adalah 5 persen, yang terdiri dari 3 persen pada unit sedimentasi dan 2 persen pada unit filtrasi. Unit sedimentasi memberikan kehilangan air karena terjadi proses pengurasan lumpur sedimentasi, sementara unit filtrasi memberikan kehilangan air karena proses pencucian filter. Kehilangan air di atas 5 persen di unit produksi dapat dikategorikan instalasi tersebut boros dalam hal kehilangan air.

Untuk mengurangi kehilangan air pada unit sedimentasi dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja unit koagulasi, flokulasi, serta sedimentasi, sehingga flok yang dihasilkan benar-benar padat dan dapat terendapkan dengan baik. Hal ini akan mengakibatkan kadar lumpur (*total solid*) yang tinggi pada lumpur sedimentasi.

Untuk mengurangi kehilangan air pada unit filtrasi dapat dilakukan dengan mengurangi waktu pencucian filter atau pencucian filter dengan menggunakan tenaga (*head*) yang tidak terlalu tinggi, karena filter yang baik seharusnya tidak memiliki flok terendapkan dalam jumlah yang tinggi.

Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki kinerja unit sedimentasi sehingga 95 persen atau lebih flok dapat terendapkan di unit sedimentasi dan flok yang boleh terendapkan di unit filtrasi seharusnya sangat minim. Hal ini akan meringankan beban kerja unit filtrasi, meningkatkan umur kerja unit filtrasi, mengurangi tenaga untuk pencucian filter, mengurangi kebutuhan air untuk pencucian filter, dan akhirnya mengurangi kehilangan air pada unit filtrasi. ■

*) pengasuh adalah kandidat PhD di *Division of Environmental Science and Engineering, National University of Singapore, Singapura.*
Kontak : sandhieb@yahoo.com

Foto: Istimewa



11 KEBIJAKAN NASIONAL AMPL

"Krisis melanda Indonesia". Demikian kalimat yang mengawali sebuah tayangan video tentang 11 Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL di Indonesia. Krisis seperti apa yang sebenarnya sedang menimpa negeri tercinta ini?

Lebih dari 100 juta penduduk Indonesia yang tersebar di 30 ribu desa tidak memiliki akses terhadap air minum dan tinggal di lingkungan tidak sehat. Berdasarkan hasil studi *review* pembiayaan AMPL tahun 2003-2005, anggaran pembangunan AMPL hanya 0,01 persen sampai 1,37 persen

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya, bidang air minum dan sanitasi dasar belum mendapatkan perhatian banyak pihak.

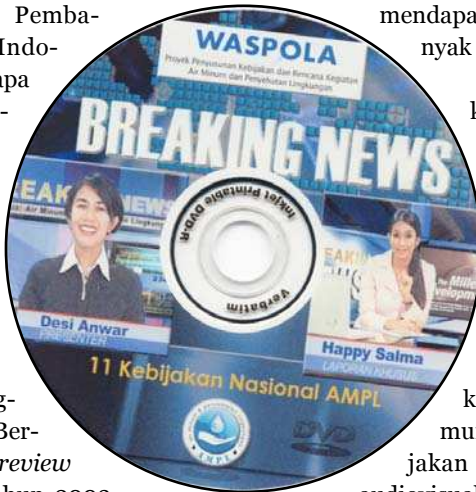
Gambaran nyata krisis air minum dan penyehatan lingkungan yang tidak hanya terjadi di Indonesia tersebut dikemas dalam *breaking news* untuk lebih memudahkan dalam mengomunikasikan 11 kebijakan melalui media audiovisual.

Desi Anwar dan Happy Salma, dua *public figure* yang bertindak sebagai pre-

senter dan pengantar laporan khusus dalam video ini tentang pelaksanaan 11 Kebijakan Nasional Pembangunan AMPL berbasis masyarakat.

Dalam video yang diproduksi WASPOLA dan Pokja AMPL Nasional ini menghadirkan enam kepala daerah di Indonesia yang bercerita bagaimana penerapan 11 kebijakan tersebut. Mereka adalah Gubernur Provinsi Banten Ratu Atut Chosiyah, Gubernur Provinsi Sumatera Barat Gumawan Fa=7uzi, Wakil Gubernur Provinsi NTT Frans S. Leburaya, Bupati TTS D.A Banunaek, Bupati Kabupaten Kebumen Rustriningsih, dan Bupati Kabupaten Solok H. Gusmal.

Video berdurasi 30 menit yang menjadi media advokasi kebijakan AMPL ini tersedia di Perpustakaan Sekretariat Pokja AMPL Nasional, Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta. ■ BW



AIRKU KEHIDUPANKU

Seusai beberes rumah, Wahyuti, seorang ibu rumah tangga, bergegas menuju aula kecamatan. Pagi itu, ia bersemangat mengikuti Pelatihan Media Rakyat dalam rangka Sosialisasi Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) di Kecamatan Pongowarno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Pelatihan selama empat hari dari 3-6 Maret 2008 itu digelar oleh WASPOLA, Pokja AMPL Nasional, Pokja AMPL Daerah, dengan dukungan *Water and Sanitation Program* (WSP) dan AusAID. Pelatihan ini untuk mendukung pelaksanaan program 27 desa yang akan menerima bantuan AMPL di Kabupaten Kebumen tahun 2008-2009.

"Saya ingin berbuat sesuatu untuk masyarakat dengan cara berpartisipasi agar ada sarana air minum di desa saya," gumam Wahyuti mengiringi semangatnya mengikuti pelatihan media rakyat.

Kegiatan pelatihan ini, terangkum dalam sebuah video yang diproduksi WASPOLA dengan pelaksana produksi Studio Audio Visual PUSKAT Yogyakarta.

Pelatihan yang dipusatkan di Kecamatan Pongowarno itu melibatkan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari pemerintah desa hingga kabupaten, ibu-ibu PKK, LSM, wartawan media cetak dan elektronik.

Mereka berkumpul untuk belajar bersama tentang bagaimana membangun keterlibatan semua pihak melalui komunikasi yang baik sehingga permasalahan AMPL bisa diselesaikan secara bersama-sama. Pemerintah daerah, masyarakat, dan semua pihak harus terlibat dalam pembangunan air minum di desa.

Dengan bimbingan fasilitator, para



peserta pelatihan menggali potensi yang ada di sekitar mereka. Hasilnya, beragam media rakyat seperti cerita rakyat, cerita bergambar (cergam), program radio dan televisi. "Pada akhirnya, kami sadar akan potensi dan kemampuan untuk menyelesaikan masalah AMPL karena dari pengalaman pelatihan ini kami tahu bagaimana cara berpartisipasi," tutur Wahyuti usai mengikuti pelatihan.

Kemasan video berdurasi 15 menit ini cukup menarik sebagai contoh pembelajaran bagi masyarakat di daerah lain dalam menggali potensi lokal berhubungan dengan sosialisasi pembangunan AMPL. Tersedia di Perpustakaan Sekretariat Pokja AMPL, Jl. Cianjur No. 4 Menteng, Jakarta. ■ BW

SEPULUH TAHUN KEBOCORAN PAM JAYA

Hampir seluruh kinerja dan pelayanan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) di Indonesia kerap mendapat protes dari para pelanggannya. Maklum, air minum adalah kebutuhan mendasar yang bahkan lebih penting dari peran BBM (Bahan Bakar Minyak). Orang mungkin bisa hidup tanpa minyak, bagaimana bila tanpa air?

Belum lama ini, terbit satu buku bertajuk "Sepuluh Tahun Kerjasama Pemerintah-Swasta pada Pelayanan Air PAM DKI Jakarta 1998-2008". Buku setebal 160 halaman yang ditulis secara keroyokan ini merangkum pengalaman dalam pelayanan air minum di DKI Jakarta melalui pola kerjasama pemerintah daerah dan swasta.

Dalam buku terbitan Badan Regulator PAM Jaya ini dikatakan bahwa Kerjasama

Pemerintah-Swasta (KPS) air minum di DKI Jakarta dibangun di atas pondasi yang ambigu. Kerjasama ini sulit dikatakan fair, baik untuk masyarakat, PAM, mitra swasta, bahkan bagi pemerintah provinsi.

Ada yang mengatakan pengalaman KPS adalah guru yang pahit, dimana suatu kerjasama kemitraan pemerintah-swasta yang seharusnya berjalan di atas kaidah-kaidah yang wajar, menjadi kaidah-kaidah yang serba politis, kurang wajar, dan seterusnya.

Penilaian kurang wajar ini pada tataran kurangnya kualitas pelayanan apalagi setelah PAM Jaya menggandeng mitra swasta yang seharusnya mampu mengerjakan tugas-tugas secara profesional.

Bayangkan, tingkat kebocoran pelayanan air minum warga DKI Jakarta yang dikelola PAM Jaya mencapai angka 44



persen. Selama 10 tahun kerjasama dengan mitra operator PT Pam Lyonnaise Jaya (PALYJA) baru mampu menurunkan 13 persen dari 57 persen tingkat kebocoran. Belum lagi persoalan hutang yang cenderung bertambah. Hutang-hutang ini pada akhirnya menjadi beban para pelanggan.

Semoga buku yang terdapat di Perpustakaan Pokja AMPL ini dapat membantu menangani permasalahan pengelolaan air minum dan dapat pula menjadi bahan pembelajaran bagi PDAM lainnya di seluruh Indonesia. ■ BW

BERGERAK MENGOLAH SAMPAH

Gerakan mengolah sampah sudah lama dirasakan terutama yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Namun mengapa persoalan sampah masih menjadi momok yang tak berkesudahan?

Masih saja masalah klasik yang menghantuinya. Disamping pemahaman tentang pengolahan sampah yang masih terbatas, kesadaran perilaku masyarakat yang belum menyeluruh, juga masih lemahnya peraturan perundang-undangan.

Belum lama ini, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Belum teruji memang kemampuan dari peraturan yang diharapkan mampu mengawal masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Seiring waktu, kesadaran masyarakat



terhadap pentingnya pengolahan sampah, akan terus diuji. Masih banyak masyarakat yang sadar mengolah sampah namun masih pada tingkatan hobi. Artinya, setelah mereka bosan dengan hobinya, bukan tidak mungkin semua itu akan ditinggalkan.

Sementara tidak sedikit buku yang menuntun masyarakat dalam memberi pemahaman dasar dalam mengelola sam-

pah. Salah satunya adalah buku yang ditulis Bagong Suyoto ini. Cukup lengkap dan menarik buku yang terdiri dari 12 bab dan 134 halaman ini.

Buku ini merupakan ulasan *best practices* dari sejumlah *stakeholders* di berbagai daerah di Indonesia dan luar negeri yang sukses mengolah sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) baik skala rumah tangga, komunitas, permukiman/kelurahan, kota dan kawasan TPA. Berbagai pendekatan, model, strategi, rancangan pengelolaan dan pengolahan sampah disajikan dengan gaya populer, total, dan mudah diaplikasikan.

Buku yang menjadi koleksi Perpustakaan Pokja AMPL ini diterbitkan guna menyongsong kehadiran Undang-Undang Pengelolaan Sampah di Indonesia. Untuk itu, penting sebagai salah satu referensi dan panduan bagi semua kalangan. ■ BW

Penyedia Air Bersih
<http://www.dfid.gov.uk>

Departement for International Development (DFID) adalah lembaga donor yang merupakan bagian dari pemerintahan Kerajaan Inggris yang dikhususkan membantu negara-negara berkembang dalam mengurangi kemiskinan. Lembaga donor ini juga aktif menjadi donor untuk penyediaan air bersih di negara berkembang. Saat ini DFID telah memiliki 64 kantor yang tersebar hampir di seluruh belahan dunia. Salah satu strategi yang ditempuh DFID dalam mengurangi kemiskinan adalah dengan menyediakan air bersih. Fakta yang dikutip dari situs ini bahwa sebanyak satu miliar orang di dunia tidak memiliki air bersih untuk diminum dan dengan jumlah lebih dari dua kalinya tidak memiliki



sanitasi yang baik. Oleh karenanya, untuk mencapai tujuan tersebut maka lembaga ini telah menetapkan visi sebagai lembaga yang akan menjadi motor penggerak utama di dunia dalam penyediaan air bersih bagi semua orang pada tahun 2015. Dengan mengunjungi situs ini maka bisa diperoleh informasi mengenai sejumlah proyek-proyek apa saja yang pernah dibiayai DFID, jurnal-jurnal pembangunan dan agenda-agenda internasional yang membahas tentang isu-isu pembangunan.

Membantu Mitra
<http://www.matoa.org>

MATO A adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa komunikasi yang bertujuan membantu mitra Matoa

(klien) dalam hal publikasi, promosi, melaksanakan berbagai kegiatan, serta kampanye dalam berbagai bidang, khususnya lingkungan.



Uniknya, Matoa bukan sekedar event organizer yang hanya terbatas pada produk berupa desain grafis dan merchandise. Hal yang menarik adalah ketika bekerjasama dengan Matoa sebagai konsultan komunikasi lingkungan maka akan memperoleh layanan tambahan sebagai berikut :

- Mendapatkan dukungan berupa konsultasi dan pendampingan sebelum, selama, dan setelah proses produksi atau masa kegiatan.
- Mendapatkan pengalaman di bidang komunikasi lingkungan bersama Matoa.
- Produk atau kegiatan yang dibuat dengan menggunakan jasa layanannya akan dipublikasikan dalam situs Matoa dan media lain.
- Menjadi bagian dalam kerja kampanye yang dilakukan oleh Matoa.

Matoa lebih memfokuskan pada aspek komunikasi dalam program kampanye lingkungan karena menurut Matoa kunci keberhasilan program lingkungan adalah komunikasi. Komunikasi lingkungan yang baik merupakan komunikasi yang mendapatkan dukungan dari khalayaknya.

Menjembatani Isu Lingkungan
<http://www.gdrc.org/>

The Global Development Research Center (GDRC) adalah sebuah organisasi maya dengan fokus penelitian pada bidang lingkungan, perkotaan dan

masyarakat. GDRC berusaha menjembatani isu dan topik-topik yang dinaunginya untuk berada di bawah satu isu payung sehubungan dengan topik-topik tersebut merupakan topik interdisiplin. Oleh karenanya situs ini menjadi tempat pertukaran pengetahuan dan informasi dari kalangan profesional yang terkait bidang tersebut. Banyak sekali hasil penelitian terutama pada tingkat masyarakat yang berkaitan dengan air minum dan kesehatan lingkungan yang bisa diakses melalui situs ini.



Gender and Food Security Environment

<http://www.fao.org/gender/en/env-e.htm>

Situs ini pada dasarnya merupakan bagian dari situs UN FAO. Salah satu alasan dikembangkannya situs lingkungan ini adalah bahwa lingkungan merupakan poin vital dalam mendukung ketahanan pangan. Melalui situs ini juga diperoleh beberapa makalah yang banyak meneliti tentang keterkaitan antara gender dengan kesehatan lingkungan. Situs ini dikembangkan sejak tahun 1980 tepat setelah dilangsungkannya konferensi utama wanita sedunia di Nairobi, Kenya dimana sejak gelaran acara tersebut disadari bahwa wanita dan pembangunan khususnya lingkungan sangat berkaitan erat. Melalui situs ini juga diperoleh beberapa makalah pembelajaran yang berisi tentang pengalaman-pengalaman pembangunan yang dikategorikan berhasil dengan memasukkan aspek kesetaraan gender sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan. ■ WL

PETUNJUK

KUMPULAN MODUL PELATIHAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN SARANA AIR BERSIH, SANITASI DAN PERSAMPAHAN BERBASISKAN MASYARAKAT
Penerbit: GTZ-BRR,2008

PETUNJUK PEMILIHAN DAN PELAKSANAAN SISTEM SANITASI YANG BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE) UNTUK REKONSTRUKSI DI ACEH DAN NIAS
Penerbit: Dinas Perkotaan dan Permukiman Provinsi NAD-BRR, 2007

MODUL PELATIHAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS MASYARAKAT
Penerbit: Environmental Services Program (ESP-USAID), 2008

PERATURAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL (RTRWN)



DIPLOMASI LINGKUNGAN, TEORI DAN FAKTA
Penerbit: UI Press, Jakarta, 2008

MERANGKAI KEBERAGAMAN: PETIKAN PELAJARAN HASIL KONSULTASI PUBLIK RUU PENGELOLAAN SDA
Penerbit: Yayasan KEHATI, Jakarta 2007

STATISTIK AIR BERSIH (WATER SUPPLY STATISTICS) 2001-2005
Penerbit: Badan Pusat Statistik, Jakarta 2006

LAPORAN

KITA SUARAKAN MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS DEMI PENCAPAIANNYA DI INDONESIA
Penerbit: Bappenas, 2007

LAPORAN AKHIR STUDI PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP MODEL PEMBA-NGUNAN PELAYANAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT
Penerbit: Direktorat Permukiman dan Perumahan, Bappenas, 2007



MAJALAH

Enviro Magz
Edisi 2, 2008

Buletin Satu Dunia
Edisi 2, April 2008

Buletin Cipta Karya
Nomor 05, Tahun VI, April 2008

Air Minum
Edisi 153, Juni 2008

Orbit
No. 06 Tahun X

Percik Junior
Edisi 5, Mei 2008

PERCIK
Edisi 23, Agustus 2008

Tekno Limbah
Volume 8, Tahun 2008



BUKU

BUMI SEMAKIN PANAS: JANGAN CUMA KIPAS-KIPAS!
Penerbit: Kementerian Lingkungan Hidup, Jakarta 2008

PERUBAHAN IKLIM, SAAT-NYA UNTUK HIJRAH
Penerbit: Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Sulawesi, Maluku, dan Papua, Makassar, 2008

MENJADI ENVIRONMENTALIS ITU GAMPANG! (SEBUAH PANDUAN BAGI PEMULA)
Penerbit: WALHI, Jakarta, 2007



■ AGENDA ■

NO.	WAKTU	K E G I A T A N
1	12 Juni 2008	Pertemuan <i>Mid Term Review</i> Pokja Komunikasi Program Kerjasama RI-UNICEF, diselenggarakan di Jakarta oleh Bappenas dan UNICEF
2	15 - 20 Juni 2008	Orientasi Keterampilan Dasar Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan AMPL, diselenggarakan di Makassar oleh Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri
3	17 - 20 Juni 2008	Lokakarya Peran Pemerintah Daerah Paska Kegiatan WSLIC-2, diselenggarakan di Bandung oleh Ditjen PP-PL, Departemen Kesehatan
4	18 Juni 2008	Diskusi Media "Akses Air Bersih untuk Masyarakat Miskin", diselenggarakan di Jakarta oleh ESP/USAID
5	25 Juni 2008	Peluncuran Kompetisi Desain Toilet Indonesia 2008 - 2009 "Green Toilet Umum Indonesia", diselenggarakan di Jakarta oleh Asosiasi Toilet Indonesia
6	27 Juni - 1 Juli 2008	Lokalahat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Angkatan I, diselenggarakan di Banten oleh Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri
7	30 Juni - 1 Juli 2008	Lokakarya Penyempurnaan <i>Project Implementation Document (PID)</i> , diselenggarakan di Jakarta oleh Pokja AMPL dan UNICEF
8	8 Juli 2008	Deklarasi "Kecamatan dengan 100% Masyarakat Telah Menggunakan Sarana Sanitasi Jamban", diselenggarakan di Desa Kandangan Kecamatan Senduro oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
9	11 - 15 Juli 2008	Lokalahat Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Angkatan II, diselenggarakan di Banten oleh Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri
10	14 - 20 Juli 2008	Lokalahat Rencana Strategis Pendampingan dan Penguatan Pokja, diselenggarakan di Jayapura oleh UNICEF
11	14 Juli 2008	Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, diselenggarakan di Kabupaten Grobogan oleh Plan Indonesia bekerjasama dengan Pokja AMPL Kabupaten Grobogan dan Pokja AMPL Nasional
12	15 - 16 Juli 2008	Pelatihan Penguatan Komunikasi untuk Mendorong Partisipasi Perempuan dalam Sosialisasi Pembangunan AMPL, diselenggarakan di Gombong oleh Pokja AMPL Kabupaten Kebumen didukung oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan WASPOLA
13	15 - 17 Juli 2008	Lokakarya Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM), diselenggarakan di Padang oleh Pokja AMPL Provinsi Sumatera Barat
14	18 Juli 2008	Pertemuan Komite Pengarah dan Pelaksana Harian Jejaring AMPL, diselenggarakan di Jakarta oleh Jejaring AMPL
15	19 - 20 Juli 2008	Pertemuan Perencanaan dan Evaluasi AMPL, diselenggarakan di Bogor oleh Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri
16	20 - 31 Juli 2008	Lokalahat Pelatihan Dasar I, MPA-PHAST, CLTS, Promosi Higienitas dan Sanitasi Sekolah untuk Fasilitator dan Pokja AMPL, diselenggarakan di Jayapura oleh UNICEF
17	1 - 2 Agustus 2008	Lokakarya Proyek ProAir, diselenggarakan di Bali oleh Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri
18	3 Agustus 2008	Kampanye Cuci Tangan Pakai Sabun, diselenggarakan di Kabupaten Tangerang oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, CARE Indonesia dan USAID
19	4 Agustus 2008	Pertemuan RI-Delegasi Vietnam dan Laos, diselenggarakan di Jakarta oleh Departemen Kesehatan
20	5 - 7 Agustus 2008	Kunjungan Delegasi Vietnam dan Laos ke Lokasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Trenggalek dan Provinsi D.I. Yogyakarta
21	11 Agustus 2008	Sosialisasi Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, diselenggarakan di Kabupaten Rembang oleh Plan Internasional Indonesia bekerjasama dengan Pokja AMPL Rembang dan Pokja AMPL Nasional
22	11 - 15 Agustus 2008	Pelatihan Keterampilan Dasar Fasilitasi, diselenggarakan di Bandung oleh Ditjen PMD, Departemen Dalam Negeri
23	12 - 13 Agustus 2008	Lokakarya Konsolidasi dan Penyusunan Rencana Kerja Jangka Menengah Pokja AMPL Provinsi Jawa Tengah, diselenggarakan di Semarang oleh WASPOLA
24	12 - 13 Agustus 2008	Konsolidasi Program PAMSIMAS Tingkat Pusat, diselenggarakan di Jakarta oleh Departemen Pekerjaan Umum
25	13 Agustus 2008	Lokakarya Review Implementasi Strategi Komunikasi untuk Pembangunan AMPL, diselenggarakan di Jakarta oleh WASPOLA
26	14 Agustus 2008	Diskusi Komitmen Negara dan Realisasi Pemenuhan Hak atas Air Bersih untuk Semua, diselenggarakan di Jakarta oleh LP3ES
27	19 Agustus 2008	Diskusi Rancangan Peraturan Pemerintah terhadap UU No. 18 tahun 2008 mengenai Pengelolaan Sampah, diselenggarakan di Jakarta oleh Gugus Tugas Pengelolaan Sampah (GTPS)-Jejaring AMPL
28	20 - 21 Agustus 2008	Konferensi Nasional Pengelolaan Air Minum Skala Rumah Tangga (PAM-RT), diselenggarakan di Jakarta oleh Departemen Kesehatan bekerjasama dengan Pokja AMPL
29	24 - 27 Agustus 2008	Pelatihan Pengembangan Media Komunikasi untuk Advokasi dan Kampanye Publik di Sektor Air dan Sanitasi, diselenggarakan di Yogyakarta oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi, WASPOLA dan Jejaring AMPL
30	25 - 29 Agustus 2008	Lokalahat Fasilitator Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) untuk Mitra Pokja AMPL, diselenggarakan di Yogyakarta oleh WASPOLA
31	25 - 28 Agustus 2008	Pelatihan Pengembangan Kelembagaan Desa bagi Tim Teknis Kabupaten dan Camat Lokasi ProAir, diselenggarakan di Bali oleh Departemen Dalam Negeri
32	27 - 29 Agustus 2008	Lokakarya Tim Koordinasi Kabupaten Proyek Community Water Services and Health (CWSH), diselenggarakan di Bogor oleh Ditjen Bangda, Departemen Dalam Negeri
33	27 - 29 Agustus 2008	<i>International Workshop on Community-Based Solid Waste Management and Supporting National Policies</i> , diselenggarakan di Surabaya atas kerja sama Pemerintah Kota Surabaya dengan Institute for Global Environment Strategies (IGES), Kitakyushu Initiative Network (KIN) dan didukung oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Pemerintah Jepang dan <i>United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pasific (UNESCAP)</i>
34	28 - 29 Agustus 2008	Lokakarya Gabungan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan pada Kawasan Kumuh Perkotaan di Indonesia Timur, diselenggarakan di Makassar oleh Pokja AMPL Nasional dan WES UNICEF

Kunjungiilah

SITUS POKJA AMPL DAERAH

<http://daerah.ampl.or.id>

The screenshot displays the homepage of the AMPL website. At the top, there is a navigation menu with links for 'Home', 'Sumbar', 'Babel', 'Banten', 'Jateng', 'NTB', 'NTT', 'Sulsel', 'Sultra', and 'Gorontalo'. Below the navigation menu, there is a section titled 'POKJA AMPL DAERAH' with a list of provinces. The main content area features a large banner image of a group of people gathered around a well, with the text 'Kelompok Kerja AMPL Daerah' overlaid. Below the banner, there is a news article titled 'Latar Belakang Pembentukan Pokja AMPL' dated 'Kamis, 15 Mei 2008'. The article discusses the need for improved water supply and sanitation in Indonesia, particularly in rural areas, and mentions the role of AMPL in addressing these issues. To the right of the article, there is a 'BERITA TERBARU' section with a list of recent news items: 'Jateng - Kebumen', 'NTB', 'NTT - TTS', 'Sumbar - Tanah Datar', and 'Sumbar - Solok'. Below the news items, there are several promotional banners for AMPL products and services, including 'AMPL Junior' and 'JEJARING AMPL'. The website footer contains a search bar and a 'start' button.

Latar Belakang Pembentukan Pokja AMPL

Kamis, 15 Mei 2008

Ketersediaan sarana dan prasarana air minum serta penyehatan lingkungan saat ini semakin menjadi kebutuhan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan yang layak maka usia harapan hidup masyarakat suatu negara akan meningkat dan secara tidak langsung hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu negara.

Kedua hal itu berkaitan dengan lainnya karena jika masyarakat suatu negara sehat, maka produktivitas masyarakat dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan hidup akan meningkat dan tingkat kemiskinan di suatu negara juga akan ikut menurun. Hal ini sejalan dengan Millenium Development Goals (MDGs) yang dicanangkan oleh PBB dalam upaya mengurangi kemiskinan dengan cara menetapkan target-target tertentu yang harus dicapai sampai tahun 2015. Salah satunya adalah melalui pemberian akses air minum dan sanitasi dasar.

Faktanya, penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan yang memenuhi persyaratan di Indonesia sampai saat ini belum dapat terpenuhi secara optimal karena berbagai macam faktor

Untuk membantu terwujudnya sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan di Indonesia secara optimal, berbagai macam aspek pendukung berupa aspek teknis, kelembagaan, pembiayaan, sosial dan lingkungan hidup harus dapat terintegrasi dengan baik.

Pembentukan Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL) yang merupakan wadah bagi para stakeholder yang berkepentingan di dalam penanganan masalah air minum dan penyehatan lingkungan diharapkan dapat menjadi wadah untuk berkoordinasi dengan lebih baik dan terarah. Sehingga dengan adanya Pokja AMPL ini, masalah AMPL di Indonesia diharapkan dapat ditangani secara lebih optimal.